RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

Jl. Jenderal Sudirman No. 239 Telp/Fax
(0761) 21593/(0761)37690

Email : dinassosial@riau.go.id

Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah Menjaga Marwah, Takkan Melayu Hilang di Bumi

SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19840326 200903 1 003

DAFTAR ISI

Hal.

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 11
1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 14
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau 23
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Provinsi Riau 23
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Riau 26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020-2024 86
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Riau 26
2.2.1 Permasalahan 26
2.2.2 Isu Strategis Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Riau 26

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 89
3.1 Tujuan 89
3.2 Sasaran 91
3.3 Strategi 91
3.4 Arah Kebijakan 91

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 89
4.1 Program 89
4.2 Kegiatan 91
4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 91
4.4 Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 91
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau 91
4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Sosial Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Riau 91

BAB IV. PENUTUP 89

DAFTAR TABEL

Hal.

Table 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau Berdasarkan Gender...	23
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	24
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan	24
Tabel 2.5	Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Riau.....	25
Table 2.6	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) se Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	26
Tabel 2.7	Data Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar yang dilayani pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa.....	44
Tabel 2.8	Data Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar yang dilayani Tahun 2022.....	45
Tabel 2.9	Data Penyandang Disabilitas Mental Terlantar yang dilayani pada UPT Bina Laras.....	45
Tabel 2.10	Data Warga Binaan Sosial UPT Bina Laras yang dilayani Tahun 2022.....	47
Tabel 2.11	Data Anak Terlantar yang dilayani pada UPT PSPA.....	47
Tabel 2.12	Data Anak Terlantar yang dilayani Tahun 2022.....	48
Tabel 2.13	Data Lanjut Usia Terlantar yang dilayani pada UPT PSTW Khusnul Khotimah.....	49
Tabel 2.14	Data Lanjut Usia Terlantar yang dilayani Tahun 2022.....	50
Tabel 2.15	Data Gelandang dan Pengemis yang dilayani pada Dinas Sosial Provinsi Riau.....	51
Tabel 2.16	Data Capaian terhadap Indikator SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2021.....	52
Tabel 2.17	Rekapitulasi Hasil Penanganan PPKS Tahun 2016 – 2020.....	52
Tabel 2.18	Penguatan Kapasitas PSKS Tahun 2014 – 2018.....	53
Tabel 2.19	Data PSKS Sasaran Garapan Dinas Sosial Tahun 2019 – 2024.....	55
Tabel 2.20	Perkembangan Pembentukan Puskesos SLRT Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	57
Tabel 2.21	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2014-2018.....	59
Tabel 2.22	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2020.....	67
Tabel 2.23	Data PSKS Sasaran Garapan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	67
Tabel 2.24	Perkembangan pembentukan Puskesos SLRT Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	68
Tabel 2.25	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2014-2018.....	70
Tabel 2.26	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2020.....	72
Tabel 2.27	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	74
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	89
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau.....	96
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Riau 2020-2024.....	98

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 100
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020-2024 108
Tabel 6.2 Kegiatan / Sub Kegiatan Responsive Gender pada Perencanaan Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau 111
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 113

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2
Gambar 1.2 Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah 4
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau 22
Gambar 2.2 Infografis Penanganan Bencana di Provinsi Riau 2019-2021 56
Gambar 2.3 Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2021 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial yang disusun berfungsi sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan persiapan,

penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

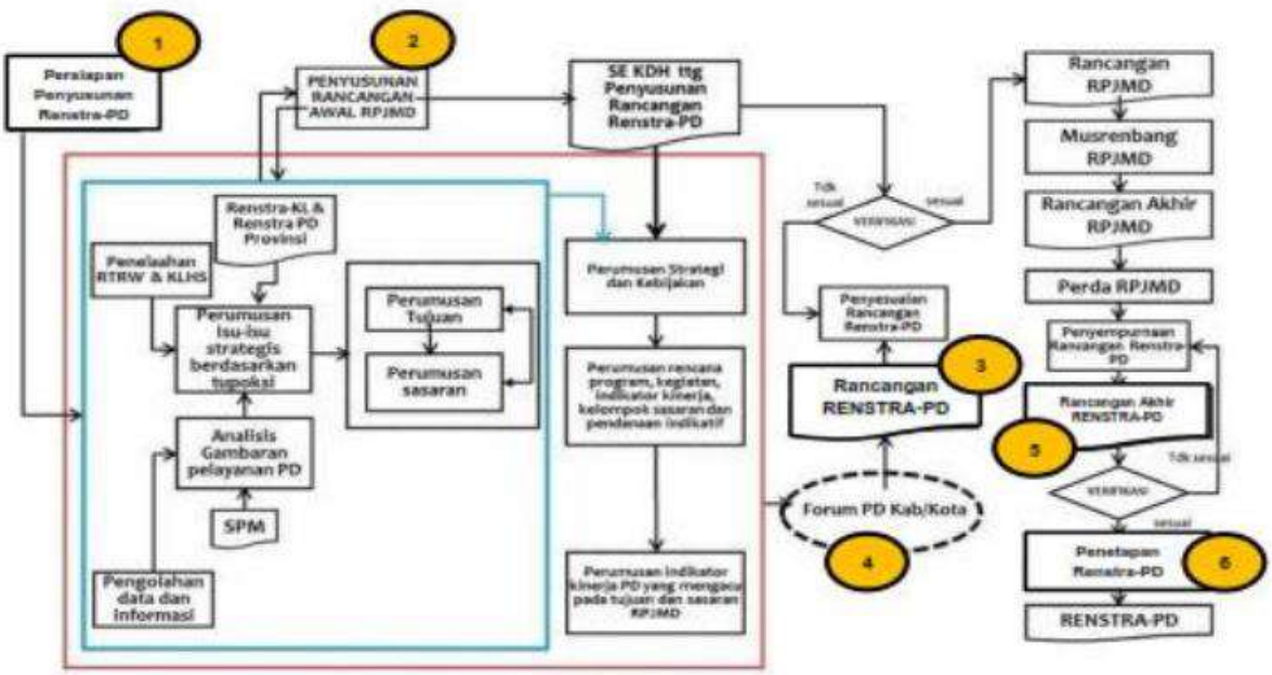

Sumber. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1 **Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra K/L terkait dan Renstra kabupaten/kota terkait, dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan dokumen - dokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut.

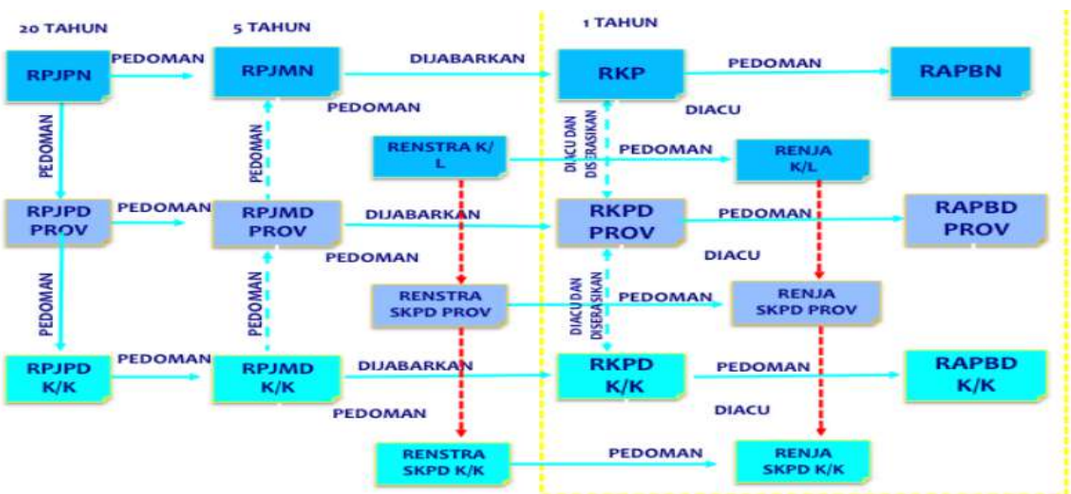

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Riau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu :

1) Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6) Undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

14) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16) Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

21) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

22) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

23) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

24) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3);

25) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

26) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

27) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

28) Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 2);

29) Peraturan Gubenur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);

30) Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

31) Peraturan Gubenur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);
32) Peraturan Gubernur Riau Nomor 139 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis "Bina Laras" pada Dinas Sosial Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 139);
33) Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 57);
34) Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 69);
35) Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2025-2029 dimaksudkan Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif gender dan Inklusif.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial : Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah;
2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

3) Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif
4) Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;
5) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Riau mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangakat Daerah

2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2.8. Identifikasi Permasalahan

2.9. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

3.2. Strategi Perangkat Daerah

3.3. Pentahapan Pembangunan

3.4. Lokus Rensta Perangkat Daerah dimana penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk Provinsi berdasarkan kabupaten/kota dan atau berdasarkan wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah

3.5 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan,sasaran, out come dan out put serta mengacu kepada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri berserta pemutakhirannya

PENUTUP

Berisi kesimpulan ringkas terkait Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan berbagai harapan terhadap pelaksanaannya.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Sosial menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2) Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
4) Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 2.1
BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

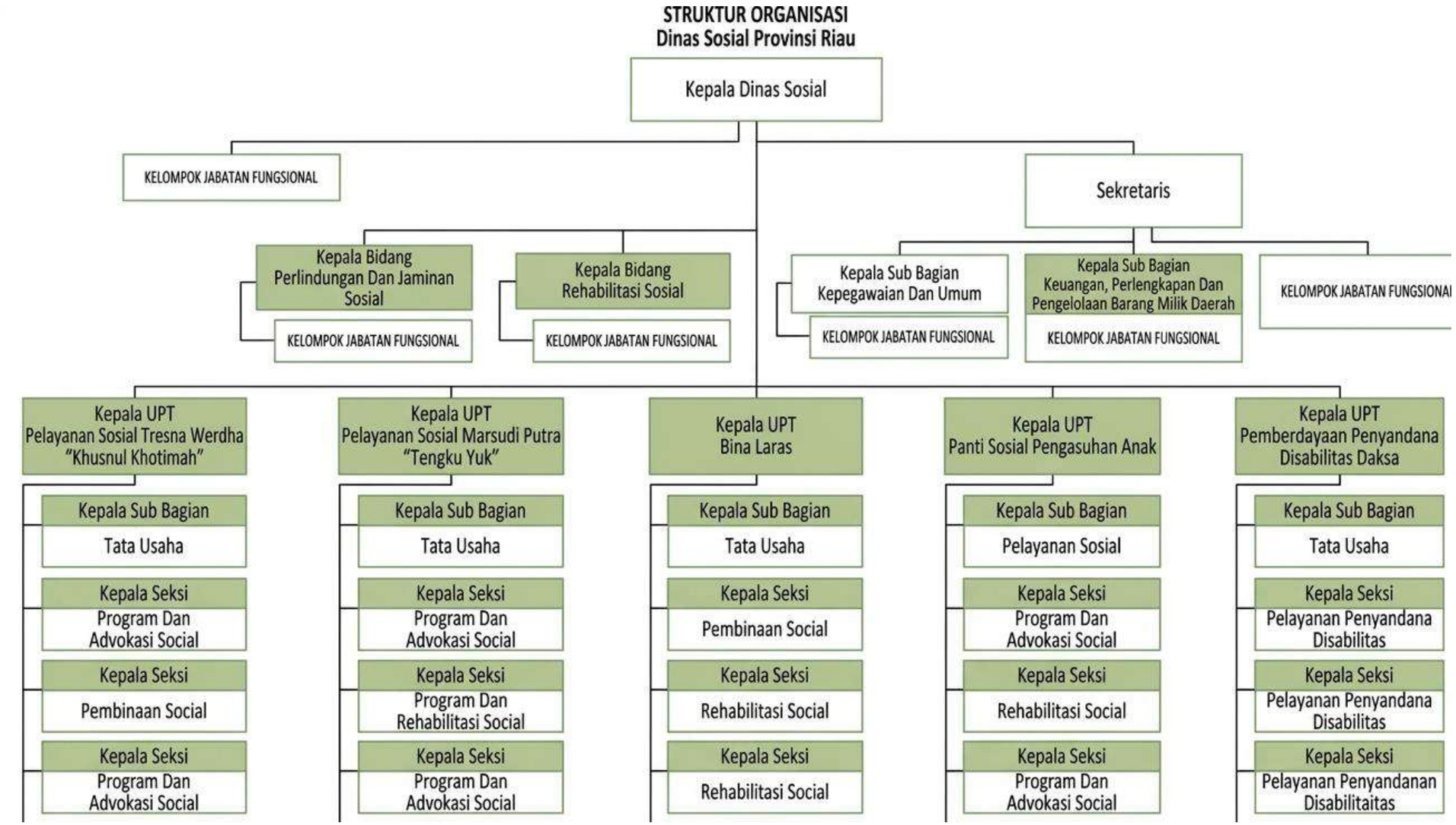

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Riau.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau sejumlah 331 orang terbagi atas 144 orang ASN bertugas pada kantor Dinas Sosial dan UPT serta 187 orang Tenaga Harian Lepas/Honorer.

Kondisi pegawai di Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2025 terdiri dari pegawai dari golongan I hingga golongan IV. Pegawai dengan golongan IV sebagian besar merupakan pegawai yang memangku jabatan struktural dan fungsional yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Riau. Adapun kondisi pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau berdasarkan gender dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.2.1
Jumlah ASN Dinas Sosial Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	PNS		PPPK		Disabilitas		Jumlah Orang
		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		
		L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-		1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-		1
3	Kepala Bidang/UPT	6	3	-	-	-	-	9
4	Kepala Subbagian / Kepala Seksi	11	6	-	-	-	-	17
5	Fungsional Penyuluh Madya	1	-	-	-	-	-	1
6	Fungsional Penyuluh Muda	4	2	-	-	-	-	6
7	Fungsional Penyuluh Pertama	2		-	-	-	-	2
8	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	1	-	-	-	-	2
9	Fungsional Perencana Ahli Pertama	2	-	-	2	-	-	4
10	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	-	1	-	-	-	-	1
11	Fungsional Peksos Madya	2		-	-	-	-	2
12	Fungsional Peksos	5	5	-	-	-	-	10

No	Jabatan	PNS		PPPK		Disabilitas		Jumlah Orang
		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		
		L	P	L	P	L	P	
	Muda							
13	Fungsional Peksos Pertama	1		-	-	-	-	1
14	Fungsional Peksos Mahir	1		-	-	-	-	1
15	Fungsional Peksos Terampil	1		-	-	-	-	1
16	Fungsional Peksos Pertama	1	-	2	2	-	-	5
17	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi		1	-	-	-	-	1
18	Penelaah Teknis Kebijakan	15	16	-	-	-	-	31
19	Pengolahan data dan Informasi	37	12	-	-	-	-	49
20	Pengadministrasi Perkantoran	29	5	-	-	-	-	34
	TOTAL	121	52	2	4	-	-	179

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Prov. Riau, 2025

Berdasarkan data rekapitulasi kepegawaian, Dinas Sosial Provinsi Riau saat ini memiliki kekuatan personel sebanyak 179 orang. Struktur kepegawaian di lingkungan dinas didominasi secara signifikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 173 orang (121 laki-laki dan 52 perempuan), sementara dukungan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 6 orang (2 laki-laki dan 4 perempuan). Secara keseluruhan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 123 laki-laki dan 56 perempuan, yang menunjukkan peran tenaga kerja laki-laki masih mendominasi dengan persentase sekitar 68,7%.

Distribusi jabatan di Dinas Sosial Provinsi Riau menunjukkan bahwa beban kerja organisasi bertumpu pada tiga kelompok besar jabatan pelaksana. Jabatan Pengolah Data dan Informasi menjadi unit dengan personel terbanyak yaitu 49 orang, disusul oleh Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 34 orang, dan Penelaah Teknis Kebijakan sebanyak 31 orang. Konsentrasi pegawai pada ketiga bidang ini mencerminkan fokus dinas yang sangat kuat pada penguatan tata kelola data kesejahteraan sosial, tertib administrasi, serta pengkajian kebijakan teknis di wilayah Provinsi Riau.

Pada aspek fungsional dan manajerial, Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki struktur keahlian yang sangat spesifik. Selain dipimpin oleh jajaran manajerial yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, serta 26 pejabat struktural (Kabid/Kasubbag/Kasi), dinas ini diperkuat oleh beragam tenaga fungsional ahli. Sesuai dengan tupoksinya, jabatan Pekerja Sosial (Peksos) memiliki sebaran jenjang yang paling lengkap mulai dari tingkat Madya hingga Terampil, ditambah dengan tenaga Penyuluh Sosial dan Perencana. Keberadaan tenaga fungsional yang spesifik ini menegaskan kesiapan instansi dalam menjalankan mandat pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Untuk data pegawai dilihat dari golongan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Sosial Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

No	Golongan	PNS		PPPK		Disabilitas		Jumlah Orang	Ket
		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin			
		L	P	L	P	L	P		
1	Golongan IV	16	8					24	
2	Golongan III	54	44					98	
3	Golongan II	19	2					21	
4	Golongan XI								
5	Golongan X								
6	Golongan IX			7	5			12	
7	Golongan VIII			-	-			-	
8	Golongan VII			1	8			9	
9	Golongan VI			-	-			-	
10	Golongan V			28	24			52	
11	Golongan III			2	3			5	
12	Golongan I			2	1			3	
	JUMLAH							179	

Berdasarkan data profil kepangkatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau, kekuatan sumber daya manusia yang berjumlah 179 personel menunjukkan distribusi yang cukup variatif antara jalur PNS dan PPPK. Pada kelompok Pegawai Negeri Sipil,

struktur organisasi didominasi secara signifikan oleh Golongan III yang berjumlah 98 orang, diikuti oleh Golongan IV sebanyak 24 orang, dan Golongan II sebanyak 21 orang. Komposisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar PNS berada pada jenjang penata hingga pembina, yang menjadi motor penggerak utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan teknis di dinas tersebut.

Sementara itu, pada kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), konsentrasi personel terbesar berada pada Golongan V dengan total 52 orang, yang terdiri dari 28 laki-laki dan 24 perempuan. Di samping itu, terdapat penguatan pada jenjang fungsional melalui 12 orang di Golongan IX dan 9 orang di Golongan VII, serta dukungan operasional lainnya di jenjang Golongan III dan I sebanyak 8 orang. Secara keseluruhan, sinergi antara senioritas PNS di Golongan III dan IV dengan besarnya jumlah tenaga teknis PPPK di Golongan V menjadi fondasi utama bagi Dinas Sosial Provinsi Riau dalam mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Untuk data pegawai berdasarkan Pendidikan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Dinas Sosial Provinsi Riau
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS		PPPK		Disabilitas		Jumlah Orang
		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		
		L	P	L	P	L	P	
1	Strata 3							
2	Strata 2	33						33
3	Strata 1	70		12			1	82
4	Diploma 3	11		9				20
5	Sekolah Menengah Atas	28		52		1		81
6	Sekolah Menengah Pertama			5				5
7	Sekolah Dasar	1		3				4

Dilihat dari aspek kualifikasi akademik, Dinas Sosial Provinsi Riau didukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang cukup kuat dan

relevan. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat 33 pegawai PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2), yang memberikan fondasi kuat pada aspek manajerial dan analisis kebijakan. Sementara itu, lulusan Strata 1 (S1) menjadi kelompok terbesar dengan total 82 orang, yang terdiri dari 70 orang PNS, 12 orang PPPK, serta 1 orang tenaga disabilitas. Keberadaan lulusan Diploma 3 (D3) sebanyak 20 orang turut memperkuat lini teknis operasional di lingkungan dinas.

Di sisi lain, kontribusi pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah dan dasar juga masih cukup signifikan dalam mendukung fungsi pelayanan. Sebanyak 81 pegawai merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), di mana kelompok ini didominasi oleh tenaga PPPK sebanyak 52 orang, disusul oleh 28 orang PNS dan 1 orang tenaga disabilitas. Selain itu, terdapat 5 orang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari jalur PPPK serta 4 orang lulusan Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 1 orang PNS dan 3 orang PPPK. Secara keseluruhan, keberagaman tingkat pendidikan ini menunjukkan adanya pembagian peran yang komprehensif, mulai dari tataran strategis hingga dukungan operasional lapangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Riau.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana berupa gedung kantor dan asrama untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sistem kelembagaan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Riau sebanyak 89 unit yang tersebar pada kompleks kantor Dinas Sosial dan TMP Kusuma Dharma Pekanbaru sebanyak 7 unit serta 82 unit bangunan yang tersebar pada 5 Panti Rehabilitasi Sosial di Provinsi Riau. Panti ini merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Riau

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	11 Buah (139.948 M2)	
2	Alat Besar	12 Unit	

No	Nama	Jumlah	Kondisi
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	35 Unit	
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	26 Unit	
5	Alat Pertanian	31 Unit	
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7573 Unit	
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	396 Unit	
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	264 Unit	
9	Alat Persenjataan	19 Unit	
10	Komputer Unit	300 Unit	
11	Peralatan Komputer	383 Unit	
12	Gedung dan Bangunan	133 Unit	
13	Jalan, Irigasi dan Jaringan	79 Unit	
14	Bahan Perpustakaan	775 Buah	
15	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga	34 Buah	

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tahun 2025

Pelayanan yang dilaksanakan melalui panti milik Pemerintah Provinsi Riau ini menggambarkan Standar pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa SPM bidang sosial menyangkut rehabilitasi sosial dalam 5 hal, yaitu orang tua terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas mental terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana.

Adapun UPT yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terdiri dari pelayanan rehabilitasi sosial untuk lanjut usia, anak terlantar, eks psikotik, anak nakal / bermasalah hukum, dan penyandang disabilitas daksa. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Riau

NO	BALAI (UPT)	SK PENETAPAN	SASARAN
1	UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah	Pergub Riau No. 69 Tahun 2017	Lanjut Usia Terlantar
2	UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk	Pergub Riau No. 69 Tahun 2017	ABH dan Tuna Sosial
3	UPT Panti Sosial Pengasuh Anak	Pergub Riau No. 69 Tahun 2017	Anak Terlantar
4	UPT Bina Laras	Pergub Riau No. 69 Tahun 2017	Disabilitas Mental Terlantar
5	UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau	Pergub Riau No. 57 Tahun 2017	Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar

Sumber : Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2017 & No. 69 Tahun 2017

Pelayanan Sosial melalui panti merupakan perwujudan dar kewenangan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Oleh sebab itu dibentuklah pelayanan berbasis panti dengan sasaran layanan bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, dan gelandang pengemis.

UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas merupakan UPT yang bergerak dalam pelayanan rehabilitasi sosial dasar disabilitas daksa terlantar di dalam panti. Jumlah SDM Disabilitas Terlantar yang memberikan pelayanan pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Jumlah Sarana dan Prasarana pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa

NO	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Cukup baik
2	Asrama	6	Belum sesuai standar
3	Ruang Kelas / Teori	4	Belum sesuai standar
4	Ruang Praktek Keterampilan	3	Belum sesuai standar

NO	Nama	Jumlah	Kondisi
5	Rumah Jaga	1	Cukup
6	Rumah Petugas	4	Cukup
7	Ruang Pamer	1	Cukup
8	Gudang dan Garase	1	Cukup
9	Lapangan Upacara	1	Cukup
10	Water Supply	1	Cukup
11	Sarpras Olahraga (Futsal, Sepak Takraw, Volley Ball, tenis Meja, Fitness Center)	4	Belum sesuai standar
12	Pagar	2	Cukup
13	Alat Kesenian /Band	1	Belum sesuai standar
14	Mobil Opersional	1	Belum sesuai standar

Untuk pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap disabilitas mental dilayani di dalam panti UPT Bina Laras. Adapun Sumber Daya Manusia yang ada pada UPT Bina Laras adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Jumlah Sarana dan Prasarana pada UPT Bina Laras

NO	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Perawatan ringan
2	Asrama	4	Perawatan ringan, perlu penambahan
3	Gedung Tempat Makan	1	Perawatan ringan
4	Gedung Keterampilan	1	Perawatan ringan
5	Ruang Isolasi	1	Perlu penambahan
6	Gedung Tempat Belajar	1	Perlu penambahan
7	Rumah Petugas	1	Perlu penambahan
8	Pos Jaga	1	Perlu penambahan
9	Musholla	1	Perawatan ringan
10	Lavangan Volley / Badminton	1	Perawatan ringan
11	Taman	1	Perawatan
12	Kebun dan kolam	1	Perlu penataan

Untuk pelayanan terhadap lanjut usia terlantar di dalam panti dilaksanakan melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah. Adapun jumlah sumber daya manusia pada UPT PSTW Husnul Khotimah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Jumlah Sarana dan Prasarana pada UPT PSTW Husnul Khotimah

NO	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Perawatan ringan
2	Rumah Petugas	5	Perawatan ringan
3	Wisma	13	Perlu rehab
4	Gedung Serba Guna	1	Perlu rehab
5	Aula Keterampilan	1	Perlu rehab
6	Mushalla	1	Perlu rehab
7	Poliklinik	1	Perawatan ringan
8	Dapur Umum	1	Perawatan ringan
9	Tempat Pemandian Jenazah	1	Perlu rehab
10	Gudang	1	Perlu rehab
11	Mobil Operasional L300	1	
12	Tempat Pemakaman Lansia	1000 m2	Perlu perbaikan akses jalan

Untuk gelandangan dan Pengemis hingga Tahun 2021 belum dibentuk UPT pelayanan sosial tersendiri. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau yang perlu menyediakan layanan rehabilitasi dasar bagi gelandang dan pengemis. Hingga saat ini pelayanan masih diberikan dengan menggunakan fasilitas panti PSMP Tengku Yuk. UPT PSMP Tengku Yuk disamping melaksanakan pelayanan gelandangan pengemis selama ini juga melaksanakan pelayanan terhadap anak nakal dan anak berhadapan dengan hukum.

Untuk pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti dilaksanakan melalui UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak. Adapun jumlah sumber daya manusia pada UPT PSPA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Jumlah Sarana dan Prasarana pada UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak

NO	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Perawatan ringan
2	Aula / Ruang Pertemuan	4	Perawatan ringan, perlu penambahan
3	Poliklinik	1	Perawatan ringan
4	Perpustakaan	1	Perawatan ringan
5	Asrama Putra	1	Perlu rehab
6	Asrama Putri	1	Perlu rehab
7	Mushalla	1	Perawatan ringan
8	Ruang konseling Psikolog dan Pekerja Sosial	1	Perawatan ringan
9	Ruang Bimbingan Sosial	1	Perawatan ringan
10	Arena Olahraga dan permainan Anak	1	Perawatan ringan
11	Ruang keterampilan	1	Perawatan Ringan
12	Kebun	1	Perlu Pengelolaan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau

2.3.1. Capaian Kinerja Indikator Utama dan Capaian Kinerja Kunci

Dalam Undang- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk pilar pelayanan bidang Pemberdayaan Sosial kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah dalam penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi serta Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.

Pada pilar pelayanan bidang Rehabilitasi Sosial, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah menyelenggarakan rehabilitasi sosial yang bukan

/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* yang memerlukan rehabilitasi pada panti. Khusus untuk penaganan warga negara migran korban tindak kekerasan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah menyelenggarakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipuangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal.

Selanjutnya dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah menyelenggarakan penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Selanjutnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi. Dalam hal penanganan bencana, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi. Untuk tugas tambahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah dalam pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.

Disamping kewenangan yang jelas diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah pelayanan bagi PPKS yang berada di dalam panti. Upaya pelayanannya pun yang dilakukan adalah rehabilitasi sosial dasar yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dari PPKS tersebut sehingga dapat menyatu dalam kehidupan masyarakat kembali.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau sesuai dengan tabel 2.20 di dibawah merupakan gambaran dari pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam rentang waktu pembangunan jangka menengah 2020-2024, yang dalam hal ini sampai tahun anggaran 2023 yang telah dievaluasi. Indikator pertama yaitu Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial menunjukkan bahwa target di tahun 2020 adalah 2,45 persen, dengan realisasi sebesar 2,74 persen. Pada tahun 2021 untuk indikator yang sama memiliki target 2,45

persen, dengan realisasi 3,15 persen. Pada tahun 2022 target sebesar 2,45 persen dan terealisasi 1,93 persen, dan tahun 2023 target sebesar 2,65 persen dan realisasi 1,58 persen. Dari data tersebut untuk tahun 2022 dan 2023 target tidak tercapai. Namun hal ini bukan serta merta menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial tidak baik. Data ini dapat dijelaskan bahwa semakin sedikit pemberian pelayanan berarti permasalahan sosial tidak begitu banyak sehingga nilai kinerja pembangunan sosial malah lebih baik. Dengan demikian koordinasi dan Kerjasama dalam pelayanan sosial antara Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat bersinergi dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah berjalan baik.

Selanjutnya terkait keberhasilan kinerja dari indikator ke dua yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 ditargetkan 16,5 persen namun realisasi hanya 0,42 persen. Pada tahun 2021 ditargetkan 16, 5 persen juga, namun realisasi hanya sebesar 0,59 saja. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 kondisi Sebagian besar Indonesia dan dunia khususnya di Provinsi Riau masih pandemi Covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat pertemuan dan koordinasi tatap muka dikurangi sesuai dengan prosedur Kesehatan yang berlaku. Untuk tahun 2021 mulai mengalami kenaikan, namun dengan kondisi pemulihan Covid-19 kegiatan bersifat pemberdayaan kelembagaan dan PSKS lainnya belum dapat terkoordinir dengan maksimal.

Tabel 2.20
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020- 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial				2,45	2,45	2,45	2,65	2,75	2,74	3,15	1,93	1,58		1,12	1,28	0,78	0,56	
2	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS				16,5	16,5	16,5	17	17,3	6,87	9,69	23,14	17		0,42	0,59	1,4	1	

Jumlah PPKS yang terbesar terlihat dari jenis PPKS Fakir Miskin. Data Fakir Miskin yang ada di Provinsi Riau merupakan data yang bersumber dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Jumlah PPKS yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.112 Perkembangan PPKS Provinsi yang Terlayani Tahun 2020-2024

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Berhadapan Hukum (Anak Nakal)	297	297	456	330	330
2	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	154	154	91	99	99
3	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	58	58	80	22	22
4	Keluarga Rentan (Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	37	49	49
5	Korban Tindak Kekerasan	9	9	63	55	55
6	Korban Trafficking	29	29	1	13	13
7	Kelompok Minoritas	8	8	20	5	5
8	Anak Jalanan	142	142	125	43	43
9	Pengemis	153	153	132	145	145
10	Gelandangan	263	263	186	250	250
11	Pemulung	160	160	6	352	352
12	Bekas BWBLP	91	91	15	380	380
13	Orang Dengan HIV/AIDS (OD HA)	555	555	158	892	892
14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	83	83	90	418	418
15	Korban Bencana Sosial	817	2419	1156	579	579
16	Tuna Susila	211	211	43	104	104
17	Komonitas Adat Terpencil	5.914	5.914	20.775	1.198	1.198
18	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	1.477	1.477	1.001	1.970	1.970
19	Anak Balita Terlantar	14	14	32	6.190	6.190
20	Penyandang Disabiltas (Cacat)	3.018	3.018	268	382	7.659
21	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	0	0	43	2.665	2.665

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
22	Korban Bencana Alam	4.520	27.458	32.933	17.728	17.728
23	Anak Terlantar	751	751	4977	35.047	35.047
24	Lanjut Usia Terlantar	33.895	33.895	5.710	32.253	32.253
25	Fakir Miskin	1.344.150	1.344.150	2.075.684	1.907.359	1.907.359
26	Anak Korban Tindak Kekerasan (KTK)/Diperlakukan salah	0	0	78	275	275
	Total Populasi PPKS Yang Terlayani	1.404.466	1.428,852	2.155.167	2.016.080	2.0160.080

Sumber: Dinas Sosial Provins Riau Tahun 2025

Perkembangan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS) di Provinsi Riau selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan volume pelayanan secara keseluruhan. Pada awal periode (2020-2021), total populasi yang terlayani berada di kisaran 1,4 juta jiwa, kemudian melonjak signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai puncaknya di angka 2.155.167 jiwa. Memasuki tahun 2023 dan 2024, jumlah pelayanan sedikit terkonsolidasi namun tetap terjaga pada angka yang tinggi, yaitu sekitar 2,01 juta jiwa per tahun. Fakir miskin menjadi kelompok PPKS dengan volume pelayanan terbesar secara konsisten, di mana pada tahun 2022 jumlahnya sempat menembus angka 2,07 juta jiwa sebelum berada di level 1,9 juta jiwa pada dua tahun terakhir.

Selain kelompok fakir miskin, beberapa kategori menunjukkan lonjakan pelayanan yang sangat tajam dalam dua tahun terakhir (2023-2024). Sebagai contoh, kelompok Anak Terlantar mengalami kenaikan luar biasa dari hanya 751 jiwa di tahun 2020 menjadi 35.047 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan signifikan juga terlihat pada kategori Anak Balita Terlantar yang melonjak dari angka puluhan menjadi 6.190 jiwa, serta Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang kini menyentuh angka 2.665 jiwa. Sementara itu, kelompok Lanjut Usia Terlantar menunjukkan stabilitas pelayanan yang tinggi dengan cakupan rata-rata di atas 32.000 jiwa pada periode terakhir, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan drastis di tahun 2022.

Dinamika pelayanan pada sektor kebencanaan juga mencatatkan angka yang mencolok, terutama pada kelompok Korban Bencana Alam yang mencapai puncaknya di tahun 2022 dengan 32.933 jiwa terlayani sebelum menurun ke angka 17.728 jiwa pada tahun 2024. Di sisi lain, beberapa kategori PPKS berbasis komunitas dan kesehatan juga tetap menjadi perhatian serius, seperti pelayanan terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang naik mencapai 892 jiwa dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang meningkat ke angka 418

jiwa. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan perluasan jangkauan layanan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam merespons berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks, baik yang bersifat struktural maupun situasional.

Peran kabupaten/kota dalam pelayan PPKS juga sangat diperlukan karena terkait kewenangannya dalam melayani orang diluar panti dan memverifikasi orang yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi dasar di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial yang merupakan kewenangan Provinsi. Adapun kabupaten/kota terlebih dahulu melakukan layanan di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang di berikan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PPKS yang ada. Adapun kabupaten yang tertinggi jumlah PPKS nya adalah kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 349.169 jiwa dan kabupaten yang terendah jumlah PPKS nya adalah kabupaten Pelalawan sebanyak 9.945 jiwa, Kondisi jumlah PPKS kabupaten/kota tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel berkut.

Tabel 2.113 Jumlah PPKS Kabupaten/Kota Yang terlayani Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS	Jenis PPKS					
		1	2	3	4	5	6
Kuantan Singingi	2	1	1	0	0	0	0
Indragiri Hulu	27	26	1	0	0	0	0
Indragiri Hilir	21	13	8	0	0	0	0
Pelalawan	82	60	0	20	0	0	2
Siak	75	70	2	0	0	0	3
Kampar	38	38	0	0	0	0	0
Rokan hulu	126	7	67	0	0	52	0
Bengkalis	76	23	5	1	47	0	0
Rokan Hilir	14	14	0	0	0	0	0
Kepulauan Meranti	24	10	14	0	0	0	0
Pekanbaru	62	48	1	1	2	3	7
Dumai	21	20	0	0	0	0	1

Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS	Jenis PPKS					
		7	8	9	10	11	12
Kuantan Singingi	2	0	0	0	2	0	0
Indragiri Hulu	12	0	0	0	0	12	0
Indragiri Hilir	35	0	2	18	10	5	0
Pelalawan	0	0	0	0	0	0	0
Siak	0	0	0	0	0	0	0
Kampar	170	0	0	15	15	0	140
Rokan hulu	4	0	0	0	0	4	0
Bengkalis	62	0	10	2	5	5	40
Rokan Hilir	30	0	0	0	30	0	0
Kepulauan	23	0	0	0	23	0	0

Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS	Jenis PPKS					
		7	8	9	10	11	12
Meranti							
Pekanbaru	762	5	31	100	100	326	200
Dumai	75	0	0	10	65	0	0

Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS	Jenis PPKS					
		13	14	15	16	17	18
Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	0	0
Indragiri Hulu	0	0	0	51	0	0	126
Indragiri Hilir	379	190	16	30	20	123	0
Pelalawan	224	173	1	0	0	50	0
Siak	716	21	5	171	7	235	277
Kampar	516	0	244	14	0	0	258
Rokan hulu	506	6	0	29	0	0	477
Bengkalis	406	0	3	222	17	149	15
Rokan Hilir	0	0	0	0	0	0	0
Kepulauan Meranti	658	0	0	7	0	641	10
Pekanbaru	883	2	149	0	60	0	672
Dumai	0	500	0	55	0	0	135

Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS	Jenis PPKS					
		19	20	21	22	23	24
Kuantan Singingi	2.303	1	218	44	1.639	10	391
Indragiri Hulu	19.782	0	186	0	5.376	377	13.843
Indragiri Hilir	927	0	506	0	412	6	3
Pelalawan	2.554	0	500	200	1.849	0	5
Siak	52.957	6.168	1.430	0	229	34.290	10.840
Kampar	6.278	0	2.163	1.685	1.821	13	596
Rokan hulu	10.336	1	1.709	0	4.480	0	4.146
Bengkalis	1.910	3	98	0	1.772	10	27
Rokan Hilir	450	0	0	0	0	50	400
Kepulauan Meranti	443	0	52	0	9	0	382
Pekanbaru	1.656	17	503	736	98	283	19
Dumai	1.946	0	294	0	43	8	1.601

Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS	Jenis PPKS	
		25	26
Kuantan Singingi	29.182	29.148	34
Indragiri Hulu	148.721	148.715	6
Indragiri Hilir	347.807	347.784	23
Pelalawan	7.085	7.085	0
Siak	2.117	2.072	45
Kampar	271.069	271.050	19
Rokan hulu	212.372	212.313	59
Bengkalis	195.327	195.324	3
Rokan Hilir	305.202	305.202	0
Kepulauan Meranti	147.231	147.230	1
Pekanbaru	162.803	162.754	49
Dumai	78.718	78.682	36

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Tabel 2.114 Jumlah Total PPKS Kabupaten/Kota Yang terlayani Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Total PPKS per Kabupaten/Kota
Kuantan Singingi	31.491
Indragiri Hulu	168.542
Indragiri Hilir	349.169
Pelalawan	9.945
Siak	55.865
Kampar	278.071
Rokan hulu	223.344
Bengkalis	197.781
Rokan Hilir	305.696
Kepulauan Meranti	148.379
Pekanbaru	166.166
Dumai	80.760

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap PSKS, maka sangat dibutuhkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelayanan kesejahteraan sosial PSKS berperan melalui penguatan kapasitas dan motivasional dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana operasional kinerja, pemberian bantuan sarana prasarana organisasi PSKS. Jumlah PSKS sebagai berikut:

Tabel 2.115 Jumlah Perkembangan PSKS Provinsi Riau dari Tahun 2020-2024

Jenis PPKS	2020	2021	2022	2023	2024
Perorangan	4080	4080	3591	3591	3591
Pekerja Sosial Profesional (PKH, Peksos, PKSA)	770	770	690	690	690
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1207	1207	1009	1009	1009
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	602	602	572	572	572
Karang Taruna (KT)	927	927	882	882	882
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	294	294	160	160	160
Penyuluh Sosial	109	109	127	127	127
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	171	171	151	151	151
Pekerja Sosial Profesional (PKH, Peksos, PKSA)	0	0	0	0	0
Keluarga	31	31	31	31	30
Keluarga Poineer	30	30	30	30	30
Family Care Unit (FCU)	1	1	1	1	0
Lembaga	295	295	276	276	276
Dunia Usaha	50	50	0	0	0
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	198	198	223	223	223
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga berbasis Masyarakat (HKSKBM)	37	37	24	24	24
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10	10	29	29	29
Total Jumlah PSKS yang ada	4406	4406	3898	3898	3897

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Sebaran PSKS yang ada terdapat dikabupaten/kota dalam upaya melakukan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS terbanyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah 349.169 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Pelalawan dengan jumlah 9.945 jiwa. Kondisi jumlah PSKS di kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut.

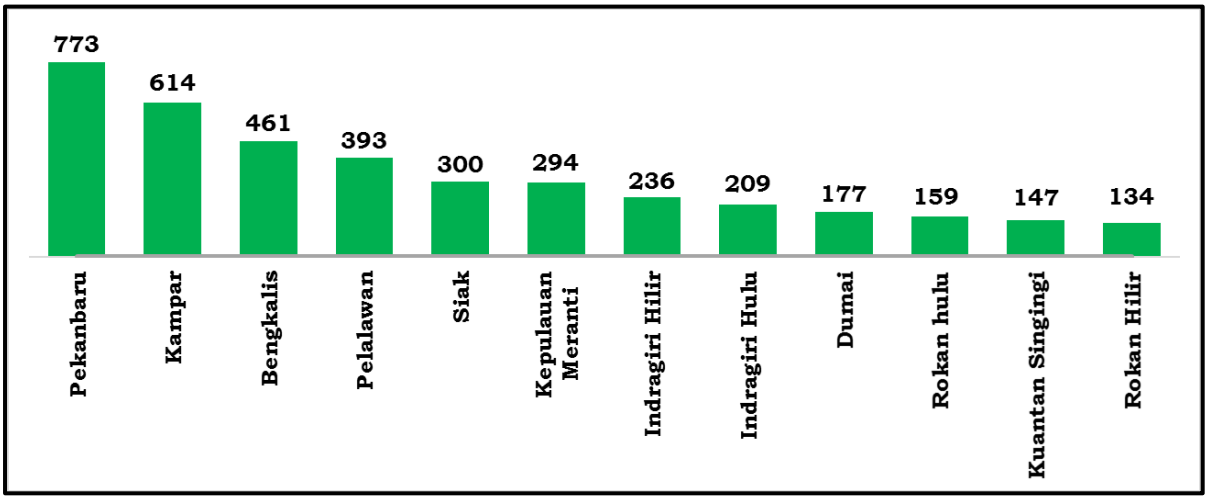

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Gambar 2.57 Jumlah PSKS di Kabupaten/Kota Tahun 2024

Dasar hukum Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk Bidang Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100%. Secara rinci capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.116 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Provinsi Riau Tahun 2021-2023

No	Jenis SPM Sosial	Indikator	Capaian			Capaian Terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana
			2021	2022	2023	2023
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	100	100	100	60
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	100	100	100	70
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	100	100	100	70
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	100	100	40
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	100	70

No	Jenis SPM Sosial	Indikator	Capaian			Capaian Terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana
			2021	2022	2023	2023
	Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2024

Untuk mendukung pelayanan dasar sosial yang menjadi kewenangan Provinsi sangat dibutuhkan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan layanan kesejahteraan sosial di dalam panti sesuai dengan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di dalam panti. Oleh sebab itu sebagai bagian dari pelayanan dasar, pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan, memberikan dan melakukan pembinaan sarana pelayanan tersebut.

Sarana pelayanan sosial cukup banyak ditemukan di tengah masyarakat, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Sarana pelayanan sosial dapat berupa Lembaga, kelompok, dan juga perorangan yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan adanya sarana pelayanan sosial ini dirasakan sangat membantu Pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada PPKS, karena program dan kegiatan dari Pemerintah saja memang belum cukup untuk dapat menampung dan memberikan pelayanan kepada seluruh PPKS yang ada.

Jumlah PPKS yang di rehab Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Swasta di Provinsi Riau mengalami peningkatan yaitu di tahun 2024 sebesar 3.604 jiwa. Dan ini merupakan bagian dari Standar Pelayan Minimal yang ada. Berikut perkembangan kondisi jumlah PPKS khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan anak terlantar di dalam panti yang merupakan Standar Minimal Pelayan kewenangan Provinsi yang terlayani.

Tabel 2.117 Perkembangan Jumlah PPKS Berdasarkan Pelayanan Minimum (SPM) Bidang yang Terlayani Sosial Kewenangan Provinsi Tahun 2020-2024

Jenis SPM Sosial	2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	105	194	199	204	199

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	591	3.710	3.875	4.020	3.309
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	80	80	90	90	83
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	20	0	20	40	13
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					
JUMLAH	796	3.984	4.184	4.354	3.604

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pada bagian ketujuh pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah Provinsi terdiri atas :

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti khususnya bagi disabilitas daksa terlantar dilaksanakan melalui UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa. UPT ini beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 57 KM 9 Rumbai Pekanbaru. UPT yang berdiri berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 ini memilik kapasitas sebanyak 30 orang.

Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal berupa :

a. Penyediaan Permakanan
b. Penyediaan Sandang
c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
d. Penyediaan Alat Bantu
e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

i. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Adapun jumlah pemerlu pelayanan khususnya disabilitas yang sudah dilayani dalam kurun 5 tahun ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Data Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar yang dilayani pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Laki-laki	7	0	6	18	20	21	35
2	Perempuan	12	0	9	0	0	12	25
	Jumlah	19	0	15	18	20	33	60

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah yang disabilitas terlantar yang dilayani berkisar di bawah angka 20 orang. Pada tahun 2017 dan 2018 pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa belum memiliki klien yang dilayani. Sedangkan untuk tahun 2020 UPT juga tidak menyelenggarakan pelayanan dikarenakan puncak pandemic Covid-19 sehingga kegiatan mengumpulkan orang banyak tidak dilaksanakan dengan menimbang protokol Kesehatan.

Sebagai salah satu panti yang bergerak dalam pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas daksa terlantar, UPT ini memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.7

Sarana Prasarana yang dimiliki UPT Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas Daksa

No.	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kantor	1	Cukup baik
2	Asrama	6	Belum sesuai standar
3	Ruang Kelas / Teori	4	Belum sesuai standar
4	Ruang Praktek Keterampilan	3	Belum sesuai standar
5	Rumah Jaga	1	Cukup
6	Rumah Petugas	4	Cukup
7	Ruang Pamer	1	Cukup
8	Gudang dan Garase	1	Cukup
9	Lapangan Upacara	1	Cukup
10	Water Supply	1	Cukup
11	Sarpras Olahraga (Futsal, Sepak Takraw, Volley Ball, tenis Meja, Fitness Center)	4	Belum sesuai standar
12	Pagar	2	Cukup
13	Alat Kesenian /Band	1	Belum sesuai standar
14	Mobil Operasional	1	Belum sesuai standar

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, 2025

Dari beberapa sarana prasarana yang ada masih terdapat permasalahan sehingga belum sesuai dengan standar pelayanan. Bangunan Gedung UPT belum memiliki aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas yang dibutuhkan seperti handrail, ramp atau bidang miring, kloset duduk di asrama, dan kelengkapan lainnya untuk penyandang disabilitas daksa. Selain permasalahan tersebut, kondisi

di beberapa bangunan Gedung UPT sudah mengalami kerusakan mulai dari skala ringan hingga berat dikarenakan faktor usia bangunan yang memang sudah lama.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Meneri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, standar asrama yang diperlukan adalah :

a. Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran 4,5 m2 per orang;
b. Kamar mandi yang akses terhadap penyandang disabilitas dengan rasio 1 kamar mandi untuk 10 penerima layanan;
c. Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup;
d. Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya.

Selain pelayanan bagi penyandang disabilitas daksa, terdapat juga layanan bagi penyandang disabilitas mental. Layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas mental dilaksanakan melalui UPT Bina Laras. UPT Bina Laras berdiri berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 139 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pelaksana Teknis ”Bina Laras”. UPT yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM.20 Muara Fajar Rumbai Pekanbaru ini memiliki kapasitas sebanyak 30 orang, dan direncanakan akan dilakukan penambahan kapasitas pada tahun 2023 menjadi 50 orang.

Data jumlah WBS dari 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.8
Data Penyandang Disabilitas Mental Terlantar yang dilayani pada UPT Bina Laras

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Laki-laki	30	30	30	48	48	60
2	Perempuan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	30	30	30	48	48	60

Sumber : UPT Bina Laras, 2025

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah Warga Binaan Sosial

(WBS) pada UPT Bina Laras sebanyak 30 orang (sesuai kapasitas). Jumlah WBS pun seluruhnya laki-laki. Hal ini dikarenakan sarana prasarana yang tersedia belum mendukung untuk dilaksanakan pelayanan bagi WBS dengan gender perempuan.

Kondisi sarana prasarana UPT Bina Laras dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9

Sarana Prasarana yang dimiliki UPT Bina Laras

No.	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung Kantor	1	Perawatan ringan
2	Asrama	4	Perawatan ringan, perlu penambahan
3	Gedung Tempat Makan	1	Perawatan ringan
4	Gedung Keterampilan	1	Perawatan ringan
5	Ruang Isolasi	1	Perlu penambahan
6	Gedung Tempat Belajar	1	Perlu penambahan
7	Rumah Petugas	1	Perlu penambahan
8	Pos Jaga	1	Perlu penambahan
9	Musholla	1	Perawatan

No.	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
			ringan
10	Lavangan Volley / Badminton	1	Perawatan ringan
11	Taman	1	Perawatan
12	Kebun dan Kolam	1	Perlu penataan

Sumber : UPT Bina Laras, 2023

2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;

UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak merupakan panti yang didirikan guna melaksanakan tugas pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Layanan yang diberikan adalah :

a. Pengasuhan
b. Penyediaan Makanan
c. Penyediaan Sandang
d. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
h. Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, NIK, dan KIA
i. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
l. Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti Kapasitas

panti ini adalah 50 anak. Adapun data anak yang telah dilayani 5 tahun terakhir ini jika dilihat berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10
Data Anak Terlantar yang dilayani pada UPT PSPA

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

1	Laki-laki	16	20	19	24	24	24
2	Perempuan	15	17	17	22	22	21
	Jumlah	31	37	36	46	46	45

Sumber : UPT PSPA, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan pada UPT PSPA berkisar di bawah kapasitas 50 anak. Jumlah anak terlantar laki-laki pun dominan dibandingkan anak terlantar perempuan. Fasilitas pelayanan yang perlu untuk dilengkapi lagi antara lain bangunan asrama yang perlu direhab dan keperluan keseharian anak di dalam panti yang menjadi prioritas di tahun-tahun kedepannya.

Sarana prasarana UPT PSPA merupakan salah satu perhatian yang diperlukan dalam pembanguna di tahun-tahun selanjutnya. Menurut standar pelayanan minimal, standar asrama yang perlu dipersiapkan adalah :

a. Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m2 per orang;
b. Kamar mandi yang mudah diakses anak dengan rasio 1 kamar mandi untuk 10 penerima layanan;
c. Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup;
d. Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya;
e. Memiliki tempat bermain anak.

Adapun kondisi sarana prasarana pada UPT Panti Sosial pengasuhan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11

Sarana Prasarana yang dimiliki UPT PSPA

No.	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung Kantor	1	Perawatan ringan
2	Aula / Ruang Pertemuan	4	Perawatan ringan, perlu penambahan
3	Poliklinik	1	Perawatan ringan
4	Perpustakaan	1	Perawatan ringan
5	Asrama Putra	1	Perlu Rehab
6	Asrama Putri	1	Perlu Rehab
7	Mushalla	1	Perawatan Ringan
8	Ruang konseling Psikolog dan Pekerja Sosial	1	Perawatan Ringan
9	Ruang Bimbingan Sosial	1	Perawatan ringan

10	Arena Olahraga dan permainan Anak	1	Perawatan ringan
11	Ruang keterampilan	1	Perawatan Ringan
12	Kebun	1	Perlu Pengelolaan

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam panti;

Untuk melaksanakan tugas pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dilakukan pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werddha Khusnul Khotimah dengan pelayanan yang diberikan sebagai berikut :

a. Penyediaan Permakanan
b. Penyediaan Sandang
c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
d. Penyediaan Alat Bantu
e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan
i. Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
l. Pemulasaraan

Adapun data lansia terlantar yang telah dilayani dalam kurun 5 tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Lanjut Usia Terlantar yang dilayani pada UPT PSTW Khusnul Khotimah

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Laki-laki	41	41	41	41	41	48
2	Perempuan	39	32	39	32	32	32
	Jumlah	80	73	80	73	73	80

Sumber : UPT PSTW Khusnul Khotimah, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan yang dilaksanakan bagi lansia terlantar dari 2017 hingga 2020 mencapai 80 orang per tahunnya. Sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 73 orang. Lansia terlantar yang dilayani di dalam panti ini mendapatkan layanan kebutuhan dasar (sandang, pangan,

tempat tinggal, keterampilan) serta pemulasaran bagi lansia yang meninggal dunia. Sebagian besar lansia terlantar yang dilayani berjenis kelamin laki-laki.

Selain mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui anggaran kegiatan, bantuan dari masyarakat dan kelompok/Lembaga lainnya juga sering disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung ke panti. Hingga saat ini guna peningkatan pelayanan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal, Dinas Sosial Provinsi Riau terus berbenah dengan melengkapi setiap sarana prasarana yang dibutuhkan bagi lasia terlantar yang tinggal di Panti.

Sarana prasarana yang tersedia pada UPT PSTW Khusnul Khotimah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar. Adapun standar asrama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 adalah :

a. Ramah terhadap lanjut usia;
b. Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m^2 per orang;
c. Kamar mandi yang akses terhadap lanjut usia dengan rasio 1 kamar mandi untuk 10 penerima layanan;
d. Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup;
e. Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya;
f. Menyediakan alat bantu kursi roda, kacamata, pemeriksaan dan pengukuran serta penyediaan alat bantu dengar, kruk, lansia walker, tripod, dan tongkat.

Adapun kondisi sarana prasarana pada UPT PSTW Khusnul Khotimah adalah sebagai berikut **:**

Tabel 2.1 Sarana Prasarana yang dimiliki UPT PSTW Khusnul Khotimah

No.	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2	Rumah Petugas	5	Perawatan ringan
3			
4	Gedung Serba Guna	1	Perlu Rehab
5			
6	Mushalla	1	Perlu Rehab
7			
8	Dapur Umum	1	Perawatan Ringan
9			
10	Gudang	1	Perlu Rehab
11			
12	Mobil Operasional L300	1	
13			

Sumber : UPT PSTW. 2025

4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;

Jenis pelayanan sosial ini diperuntukkan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan pengemis. Pemberian pelayanan dilakukan berbasis panti. Dinas Sosial Provinsi Riau belum memiliki pani khusus untuk melaksanakan pelayanan dalam panti termasuk struktur organisasi dan tupoksi dari Panti. Untuk itu agar pelayanan terhadap gelandang dan pengemis dapat tetap berjalan, selama ini dilakukan pelayanan menggunakan panti yang ada yaitu UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk.

Bentuk pelayanan yang diberikan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2018 adalah :

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
- Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemulangan ke Daerah Asal

Adapun data pelayanan yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel 2.14
Data Gelandang dan Pengemis yang dilayani pada Dinas Sosial Provinsi Riau

No	Jenis Kelamin	Tahun Pelayanan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Laki-laki	10	-	10	-	15	0
2	Perempuan	10	-	10	-	-	0
	Jumlah	20	-	20	-	-	0

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan terhadap gelandang pengemis baru dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 20 orang gelandang pengemis. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan ini adalah bahwa Dinas Sosial Provinsi Riau hingga Tahun 2022 belum memiliki UPT khusus yang dapat melaksanakan pelayanan rehabilitasi dasar terhadap gelandang dan pengemis. Untuk pelayanan di Tahun 2020 dilaksanakan pada UPT PSMP Tengku Yuk yang merupakan panti sosial pelayanan terhadap anak nakal/anak berhadapan hukum.

Mengingat Rehabilitasi Sosial Dasar terhadap Gelandang dan Pengemis merupakan salah satu SPM bidang sosial, makapembentukan UPT Pelayanan Sosial terhadap Gelandang dan Pengemis perlu menjadi prioritas selanjutnya mengingat data gelandang pengemis yang cukup banyak di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.6.

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Bidang kebencanaan merupakan salah satu tanggung jawab pelayanan bidang sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Sesuai Standar Pelayanan Minimal, maka pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi meliputi :

1. Penyediaan Permakananan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

5. Pelayanan Dukungan Psikososial

Adapun data penanganan bencana di Provinsi Riau 3 tahun terakhir ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Penyediaan Permakanan	13.760 Orang	26.192 Orang	10.238 Orang
2	Penyediaan Sandang	2428 Orang	890 Orang	199 Orang
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	143 Orang	3081 Orang	127 Orang
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	17.522 Orang	2794 Orang	100 Orang

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2025

Kelima layanan di atas merupakan layanan yang termasuk dalam standar pelayanan minimal bidang sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota secara implisit dan ekplisit mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dengan/atau menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal Bidang kesejahteraan Sosial sebagai peta jalan perumusan program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan.

Selanjutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana program bantuan yang telah dilaksanakan secara reguler dapat dilakukan lebih teliti agar lebih tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran penerima bantuan atau jaminan sosial terutama bagi masyarakat di kelompok kesejahteraan terendah (kuintil 1 atau 20% terendah). Tabulasi kepemilikan salah satu dari Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, atau Kartu Keluarga Sejahtera dalam rumah tangga, atau setidaknya dimiliki oleh salah satu anggota keluarga. Sebagaimana dapat dilihat dari data capaian berikut:

Gambar 2.58 Kepemilikan Jaminan Sosial Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Sosial (Jumlah dan Persentase) di Provinsi Riau Tahun 2024

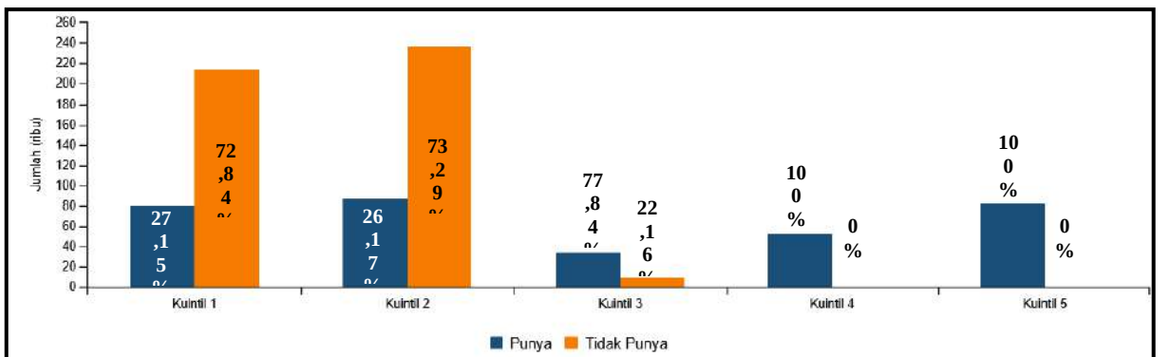

:::	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5	Total
Punya	79,746	86,442	34,002	53,147	82,510	**335,847**
Tidak Punya	214,020	237,143	9,679	0	0	**460,842**
Total	**293,766**	**323,585**	**43,681**	**53,147**	**82,510**	**796,689**

Sumber: Sepakat (Sakernas) Bappenas 2024

2.3.2 Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada periode 2021-2024 menunjukkan peran krusial instansi dalam memitigasi dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021 hingga 2022, fokus perlindungan sosial yang tercatat dalam tabel evaluasi selaras dengan isu pemulihan ekonomi nasional dan meningkatnya angka kerentanan sosial akibat kehilangan pekerjaan. Realisasi penyaluran bantuan sosial dan penanganan fakir miskin yang mencapai target 100% merupakan jawaban atas tingginya ekspektasi publik terhadap jaring pengaman sosial pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Memasuki tahun 2023 hingga 2024, fokus pelayanan bergeser pada penguatan rehabilitasi sosial seiring dengan meningkatnya isu-isu sosial kompleks di masyarakat, seperti kenaikan angka penyalahgunaan NAPZA dan permasalahan lanjut usia terlantar di wilayah perkotaan. Data evaluasi yang menunjukkan realisasi fisik maksimal pada seluruh UPT (seperti UPT Bina Laras dan Tresna Werdha) mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menangani isu kesehatan mental dan penuaan penduduk (*ageing population*) yang menjadi tren pembicaraan di tingkat provinsi. Optimalisasi layanan panti menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan bagi kelompok yang tidak lagi memiliki sistem pendukung keluarga yang memadai.

Selain itu, tingginya realisasi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial juga merespons isu perubahan iklim yang memicu peningkatan frekuensi bencana alam di Riau, seperti banjir musiman dan kebakaran lahan. Sinkronisasi target fisik korban bencana yang selalu terpenuhi menunjukkan bahwa manajemen logistik dan tanggap darurat menjadi prioritas utama untuk meredam keresahan masyarakat terkait ancaman bencana. Meskipun terdapat kendala pergeseran anggaran yang tercatat dalam tabel, konsistensi serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa isu-isu mendesak di masyarakat tetap diprioritaskan melalui penyesuaian kebijakan fiskal daerah yang responsif.

Data capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Evaluasi Renstra Perangkat Daerah

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Persentase PPKS yang terjamin keberfungsian sosialnya	2,45		2,45		2,65		2,75		3,15		1,93		1,58		2,45		1,29		0,79		0,60		0,89	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	2,45		2,45		2,65		2,75		3,15		1,93		1,58		2,45		1,29		1,29		1,29		1,29	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan**	100	299.999.803	100	299.997.260	100	350.000.000	100	370.000.000	100	330.777.900	100	407.619.900	100	616.061.200	100	534.029.600	1,00	1,10	1,00	1,36	1,00	1,76	1,00	1,44

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten /Kota Asal	**Persentase warga negara migran yang difasilitasi kepulangannya**	100	299.999.803	100	299.997.260	100	350.000.000	100	370.000.000	100	330.777.900	100	407.619.900	100	616.061.200	100	534.029.600	1,00	1,10	1,00	1,36	1,00	1,76	1,00	1,44
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangka	550	299.999.803	550	299.997.260	600	350.000.000	650	370.000.000	828	330.777.900	750	407.619.900	1.202	616.061.200	929	534.029.600	1,51	1,10	1,36	1,36	2,00	1,76	1,43	1,44

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Kabupaten/ Kota Asal	n ke Daerah Kabupaten /Kota																								
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PPKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya**	100	4.536.910.629	100	9.154.671.907	100	9.805.252.711	100	10.010.912.694	100	4.156.128.949		7.572.986.436	100	10.614.265.441	100	10.614.072.614	1,00	0,92	-	0,83	1,00	1,08	1,00	1,06
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	100	1.878.216.265	100	9.020.429.188	100	3.034.400.000	100	3.174.855.289	100	1.862.423.564		7.949.412.431	100	9.795.060.359	100	9.062.397.146	1,00	0,99	-	0,88	1,00	3,23	1,00	2,85

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Kembali keberfungsi sosialnya**	100	1.061.892.503	100	4.609.992.984	100	4.599.714.287	100	4.623.584.287	100	608.976.853	100	2.460.011.738	100	2.703.104.600			1,00	0,57	1,00	0,53	1,00	0,59	-	-
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40	417.684.000	50	949.950.000	70	950.945.000	80	950.945.000	19	106.052.500	18	330.726.237	16	687.490.745	33	613.679.510	0,48	0,25	0,36	0,35	0,23	0,72	0,41	0,65

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40	55.330.078	50	237.800.419	70	243.580.461	80	243.580.461	19	27.745.000	18	136.680.000	16	203.665.598	33	174.862.227	0,48	0,50	0,36	0,57	0,23	0,84	0,41	0,72
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	40	314.607.304	50	1.908.434.541	50	1.800.000.000	6	1.800.000.000	19	298.814.603	18	1.435.003.073	16	1.251.221.712	33	1.827.615.425	0,48	0,95	0,36	0,75	0,32	0,70	5,50	1,02
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		-	50	45.200.006	70	49.720.007	80	53.570.007	19	56.341.269	18	10.200.000	16	399.913	33	40.150.920			0,36	0,23	0,23	0,01	0,41	0,75

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40	68.468.179	50	234.279.533	70	237.707.486	80	238.807.486	19	25.020.000	18	111.642.260	16	128.767.838	33	144.204.796	0,48	0,37	0,36	0,48	0,23	0,54	0,41	0,60
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40	31.770.000	50	700.994.248	70	731.093.673	80	731.093.673	19	89.632.500	18	139.492.400	16	169.776.000	33	193.958.485	0,48	2,82	0,36	0,20	0,23	0,23	0,41	0,27
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	40	140.462.942	50	255.470.237	70	281.017.261	80	287.617.261	-	-	18	184.596.200	16	215.017.707	33	228.224.590	-	-	0,36	0,72	0,23	0,77	0,41	0,79

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi		-	50	11.725.000	70	12.897.500	80	13.994.750	-	-	18	2.100.000	16	1.575.000	33	2.100.000			0,36	0,18	0,23	0,12	0,41	0,15
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		-	50	11.750.000	70	12.925.000	80	14.025.000	-	-	18	3.500.000	16	1.925.000	33	2.100.000			0,36	0,30	0,23	0,15	0,41	0,15
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga		-	50	95.725.000	70	105.297.500	80	109.697.500	-	-	18	42.765.000	16	42.321.750	33	41.033.500			0,36	0,45	0,23	0,40	0,41	0,37

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Kewenangan Provinsi																								
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	40	33.570.000	50	102.440.000	70	112.684.000	80	116.206.750	19	61.712.250	18	42.378.000	16	47.165.000	33	19.325.000	0,48	1,84	0,36	0,41	0,23	0,42	0,41	0,17
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	-	-	50	56.224.000	24	61.846.400	24	64.046.400	-	-	1	20.928.568	1	27.833.855	12	48.386.262			0,02	0,37	0,04	0,45	0,50	0,76

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Kembali keberfungsi sosialnya**	100	1.642.485.487	100	4.609.992.984	100	4.599.714.287	100	4.623.584.287	100	1.744.668.279	100	1.820.307.693	100	6.483.362.954	100	4.516.076.349	1,00	1,06	1,00	0,39	1,00	1,41	1,00	0,98
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30	210.002.000	50	949.950.000	70	950.945.000	80	950.945.000	30	452.793.000	30	637.104.000	30	862.249.000	59	1.353.501.886	1,00	2,16	0,60	0,67	0,43	0,91	0,74	1,42

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30	19.336.320	50	237.800.419	70	243.580.461	80	243.580.461	30	19.290.000	30	29.910.000	30	231.263.019	59	110.567.033	1,00	1,00	0,60	0,13	0,43	0,95	0,74	0,45
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	30	910.893.719	50	1.908.434.541	50	1.800.000.000	6	1.800.000.000	30	865.995.203	30	410.306.700	30	4.568.798.005	59	2.248.123.431	1,00	0,95	0,60	0,21	0,60	2,54	9,83	1,25
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		-	50	45.200.006	70	49.720.007	80	53.570.007			30	15.600.000	30	35.240.000	56	52.420.000			0,60	0,35	0,43	0,71	0,70	0,98

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30	87.986.752	50	234.279.533	70	237.707.486	80	238.807.486	30	53.731.500	30	9.978.600	30	10.986.300	56	41.947.000	1,00	0,61	0,60	0,04	0,43	0,05	0,70	0,18
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30	339.744.768	50	700.994.248	70	731.093.673	80	731.093.673	30	339.288.576	30	517.982.080	30	521.225.280	56	648.034.018	1,00	1,00	0,60	0,74	0,43	0,71	0,70	0,89
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	30	381.928	50	255.470.237	70	281.017.261	80	287.617.261			30	111.558.800	30	231.798.350	56	64.721.231	-	-	0,60	0,44	0,43	0,82	0,70	0,23

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi		-	50	11.725.000	70	12.897.500	80	13.994.750			30	7.000.000	30	3.850.000	56	2.975.000			0,60	0,60	0,43	0,30	0,70	0,21
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		-	50	11.750.000	70	12.925.000	80	14.025.000			30	9.970.000	30	10.809.997	56	61.950.000			0,60	0,85	0,43	0,84	0,70	4,42
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga		-	50	95.725.000	70	105.297.500	80	109.697.500			30	25.644.000	30	70.118.000	56	35.975.500			0,60	0,27	0,43	0,67	0,70	0,33

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Kewenangan Provinsi																								
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	30	74.140.000	50	102.440.000	70	112.684.000	80	116.206.750	30	13.570.000	30	11.442.500	30	57.043.000	56	49.181.750	1,00	0,18	0,60	0,11	0,43	0,51	0,70	0,42
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	-	-	50	56.224.000	24	61.846.400	24	64.046.400			1	33.811.013	1	93.668.730	12	50.198.897			0,02	0,60	0,04	1,51	0,50	0,78

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	**Jumlah Anak Terlantar yang direhabilitasi di dalam panti**	40	1.496.161.815	40	4.685.307.323	40	2.422.841.612	50	2.510.655.773	40	1.496.161.815	40	3.642.121.418	40	4.697.038.842	40	2.690.549.205	1,00	1,00	1,00	0,78	1,00	1,94	0,80	1,07
Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	-	40	440.000.000	40	444.000.000	50	444.000.000	-	-	40	437.213.840	40	442.928.416	46	273.680.000			1,00	0,99	1,00	1,00	0,92	0,62
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40	505.041.550	40	657.000.000	40	700.700.000	50	700.700.000	40	505.041.550	40	596.663.557	40	1.036.516.000	46	1.108.468.802	1,00	1,00	1,00	0,91	1,00	1,48	0,92	1,58

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40	89.091.320	40	178.000.000	40	195.800.000	50	215.380.000	40	89.091.320	40	176.839.000	40	392.510.402	46	232.326.858	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	2,00	0,92	1,08
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	40	261.450.300	40	2.789.996.767	40	400.000.000	50	400.000.000	40	261.450.300	20	1.883.564.535	20	2.084.838.595	46	431.681.806	1,00	1,00	0,50	0,68	0,50	5,21	0,92	1,08
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenanga	40	2.190.000	40	20.600.556	40	22.660.612	50	24.926.673	40	2.190.000	40	20.590.800	40	22.530.000	46	81.071.764	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,92	3,25

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	n Provinsi																								
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40	473.616.096	40	210.000.000	40	231.000.000	50	254.100.000	40	473.616.096	40	209.840.000	40	195.070.816	46	78.044.352	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84	0,92	0,31
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	40	143.702.549	40	85.000.000	40	93.500.000	50	102.850.000	40	143.702.549	40	43.548.000	40	164.111.353	46	139.731.563	1,00	1,00	1,00	0,51	1,00	1,76	0,92	1,36

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	40	5.000.000	40	5.500.000	50	6.050.000	-	-	40	4.550.000	40	5.425.000	46	5.950.000			1,00	0,91	1,00	0,99	0,92	0,98
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	40	202.710.000	40	222.981.000	50	245.279.100	-	-	40	202.710.000	40	280.981.000	46	280.981.000			1,00	1,00	1,00	1,26	0,92	1,15

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	40	20.000.000	40	22.000.000	50	24.200.000	-	-	40	11.040.000	40	16.427.500	46	15.245.000			1,00	0,55	1,00	0,75	0,92	0,63
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	40	21.070.000	40	50.000.000	40	55.000.000	50	60.500.000	40	21.070.000	40	37.766.000	40	32.782.500	46	20.195.000	1,00	1,00	1,00	0,76	1,00	0,60	0,92	0,33
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	-	-	40	5.000.000	40	5.500.000	50	6.050.000	-	-	40	-	40	4.602.500	46	4.617.500			1,00	-	1,00	0,84	0,92	0,76

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	-	-	1	17.795.686	1	18.314.760	1	18.555.560			1,00	0,81	1,00	0,76	1,00	0,70
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	**Jumlah lanjut usia terlantar yang direhabilitasi di dalam panti**	73	2.118.924.148	73	6.999.813.164	73	3.668.896.812	73	3.695.339.634	73	2.118.924.148	73	6.538.083.833	73	3.999.911.088	73	6.027.409.497	1,00	1,00	1,00	0,93	1,00	1,09	1,00	1,63
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi	73	1.043.335.400	73	1.415.192.000	73	1.525.811.200	73	1.525.811.200	73	1.043.335.400	73	1.051.967.900	73	1.509.640.750	73	1.532.517.627	1,00	1,00	1,00	0,74	1,00	0,99	1,00	1,00

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Minimal Kewenangan Provinsi																								
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	73	57.596.853	73	81.707.283	73	89.878.011	73	98.865.812	73	57.596.853	73	81.446.000	73	89.776.023	73	235.046.340	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,38
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	73	166.477.798	73	3.999.997.880	73	400.000.000	73	400.000.000	73	166.477.798	73	3.929.113.163	73	702.286.848	73	3.191.933.551	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	1,76	1,00	7,98

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-	-	73	149.976.637	73	164.974.301	73	164.974.301	-	-	73	149.970.000	73	164.533.150	73	46.941.897			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,28
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	73	23.717.945	73	65.000.000	73	71.500.000	73	71.500.000	73	23.717.945	73	64.900.000	73	71.310.000	73	373.118.856	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,22
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenanga	73	736.550.352	73	714.259.980	73	785.685.978	73	785.685.978	73	736.550.352	73	695.691.751	73	766.722.040	73	458.758.768	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	0,98	1,00	0,58

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	n Provinsi																								
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	73	91.245.800	73	249.997.384	73	274.997.122	73	274.997.122	73	91.245.800	73	249.232.900	73	389.344.910	73	58.961.708	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,00	0,21
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	73	5.000.000	73	5.500.000	73	5.500.000	-	-	73	7.320.000	73	5.395.000	73	4.882.500			1,00	1,46	1,00	0,98	1,00	0,89

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	73	10.000.000	73	11.000.000	73	11.000.000	-	-	73	10.000.000	73	11.000.000	73	5.425.000			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,49
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	73	75.000.000	73	82.500.000	73	82.500.000	-	-	73	74.853.000	73	52.927.000	73	47.935.750			1,00	1,00	1,00	0,64	1,00	0,58
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	73	75.000.000	73	82.500.000	73	82.500.000	-	-	73	72.640.500	73	60.903.750	73	10.770.000			1,00	0,97	1,00	0,74	1,00	0,13
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan	-	-	73	25.000.000	73	27.500.000	73	30.250.000	-	-	73	20.000.000	73	27.200.000	73	27.500.000			1,00	0,80	1,00	0,99	1,00	0,91

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Kewenangan Provinsi																								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	1	133.682.000	1	147.050.200	1	161.755.220	-	-	1	130.948.619	1	148.871.617	1	33.617.500			1,00	0,98	1,00	1,01	1,00	0,21
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	**Jumlah gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi di dalam panti**	50	235.848.553	80	925.000.000	80	1.197.700.000	80	1.343.488.289	50	235.848.553	20	226.419.752	40	466.387.670	13	380.772.528	1,00	1,00	0,25	0,24	0,50	0,39	0,16	0,28

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50	95.000.000	80	684.000.000	80	752.400.000	80	752.400.000	50	95.000.000	20	105.115.500	40	153.170.000	13	120.000	1,00	1,00	0,25	0,15	0,50	0,20	0,16	0,00
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50	49.730.440	80	65.200.000	80	71.720.000	80	71.720.000	50	49.730.440	20	22.800.000	40	42.284.340	13	8.163.350	1,00	1,00	0,25	0,35	0,50	0,59	0,16	0,11

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50	21.184.356	80	18.000.000	80	200.000.000	80	328.430.289	50	21.184.356	20	14.270.000	40	132.379.080	13	308.557.428	1,00	1,00	0,25	0,79	0,50	0,66	0,16	0,94
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50	21.640.980	80	2.500.000	80	2.750.000	80	3.025.000	50	21.640.980	20	2.330.000	40	2.640.000	13	3.016.500	1,00	1,00	0,25	0,93	0,50	0,96	0,16	1,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50	20.542.657	80	20.300.000	80	22.330.000	80	24.563.000	50	20.542.657	20	4.160.000	40	25.500.000	13	2.000.000	1,00	1,00	0,25	0,20	0,50	1,14	0,16	0,08

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	50	17.450.120	80	10.000.000	80	11.000.000	80	12.100.000	50	17.450.120	20	3.760.000	-	-	13	-	1,00	1,00	0,25	0,38	-	-	0,16	-
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	80	80.000.000	80	88.000.000	80	96.800.000	-	-	20	33.400.000	40	44.000.000	13	14.235.000			0,25	0,42	0,50	0,50	0,16	0,15
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau	-	-	80	5.000.000	80	5.500.000	80	6.050.000	-	-	20	-	-	-	13	-			0,25	-	-	-	0,16	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi																								
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	80	7.500.000	80	8.250.000	80	9.075.000	-	-	20	-	40	5.320.000	13	1.925.000			0,25	-	0,50	0,64	0,16	0,21

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/ Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	50	10.300.000	80	25.000.000	80	27.500.000	80	30.250.000	50	10.300.000	20	9.800.000	40	16.975.000	13	4.743.750	1,00	1,00	0,25	0,39	0,50	0,62	0,16	0,16
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1	7.500.000	1	8.250.000	1	9.075.000	-	-	20	30.784.252	1	44.119.250	1	38.011.500			20,00	4,10	1,00	5,35	1,00	4,19

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi di dalam panti**	40	1.502.299.875	90	954.987.624	160	950.500.000	160	1.012.700.000	40	1.502.299.875	30	482.133.982	30	1.393.360.983	59	2.141.008.769	1,00	1,00	0,33	0,50	0,19	1,47	0,37	2,11
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40	202.580.000	90	134.500.000	160	147.950.000	160	154.075.000	40	202.580.000	30	99.855.000	30	224.358.000	59	484.583.000	1,00	1,00	0,33	0,74	0,19	1,52	0,37	3,15

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40	23.888.850	90	58.987.624	160	64.900.000	160	68.650.000	40	23.888.850	30	34.755.600	30	38.397.231	59	232.267.722	1,00	1,00	0,33	0,59	0,19	0,59	0,37	3,38
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	40	1.114.496.507	90	304.000.000	160	234.400.000	160	246.425.000	40	1.114.496.507	20	189.979.372	30	970.757.199	59	981.325.127	1,00	1,00	0,22	0,62	0,19	4,14	0,37	3,98
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	40	10.579.220	90	17.500.000	160	19.250.000	160	21.550.000	40	10.579.220	30	4.975.700	30	5.499.725	59	5.496.170	1,00	1,00	0,33	0,28	0,19	0,29	0,37	0,26

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Kewenangan Provinsi																								
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40	66.455.386	90	225.000.000	160	247.500.000	160	267.650.000	40	66.455.386	30	41.467.400	30	41.495.250	59	50.000.000	1,00	1,00	0,33	0,18	0,19	0,17	0,37	0,19
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	40	5.498.527	90	40.000.000	60	44.000.000	60	44.000.000	40	5.498.527	30	37.966.200	30	43.092.050	59	239.646.000	1,00	1,00	0,33	0,95	0,50	0,98	0,98	5,45
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenanga	40	47.376.385	90	20.000.000	60	22.000.000	60	22.000.000	40	47.376.385	30	19.511.000	30	21.964.528	59	68.407.000	1,00	1,00	0,33	0,98	0,50	1,00	0,98	3,11

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	n Provinsi																								
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	40	-	90	5.000.000	60	5.500.000	60	5.500.000	40	-	30	4.900.000	30	5.425.000	59	-	1,00		0,33	0,98	0,50	0,99	0,98	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Kewenangan Provinsi																								
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40	-	90	5.000.000	60	5.500.000	60	5.500.000	40	-	30	4.900.000	30	5.425.000	59	11.100.000	1,00		0,33	0,98	0,50	0,99	0,98	2,02

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	40	31.425.000	90	35.000.000	60	38.500.000	60	47.000.000	40	31.425.000	30	43.823.710	30	20.500.000	59	20.800.000	1,00	1,00	0,33	1,25	0,50	0,53	0,98	0,44
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	-	-	3	110.000.000	24	121.000.000	24	130.350.000	-	-			1	16.447.000	12	47.383.750			-	-	0,04	0,14	0,50	0,36

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
dan NAPZA	HIV/AIDS dan NAPZA																								
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi di dalam panti**	40	1.449.424.963	90	884.987.624	160	873.500.000	160	935.700.000	40	1.449.424.963	43	353.320.451	51	378.417.418	30	381.493.300	1,00	1,00	0,48	0,40	0,32	0,43	0,19	0,41

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40	202.580.000	90	134.500.000	160	147.950.000	160	154.075.000	40	202.580.000	43	21.150.000	51	27.407.000	30	9.667.000	1,00	1,00	0,48	0,16	0,32	0,19	0,19	0,06
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40	23.888.850	90	58.987.624	160	64.900.000	160	68.650.000	40	23.888.850	43	5.880.000	51	9.122.000	30	13.634.000	1,00	1,00	0,48	0,10	0,32	0,14	0,19	0,20

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	40	1.114.496.507	90	304.000.000	160	234.400.000	160	246.425.000	40	1.114.496.507	43	87.175.588	51	84.778.920	30	73.160.378	1,00	1,00	0,48	0,29	0,32	0,36	0,19	0,30
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40	10.579.220	90	17.500.000	160	19.250.000	160	21.550.000	40	10.579.220	43	2.033.000	51	7.889.000	30	6.185.000	1,00	1,00	0,48	0,12	0,32	0,41	0,19	0,29
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40	66.455.386	90	225.000.000	160	247.500.000	160	267.650.000	40	66.455.386	43	175.584.863	51	168.019.920	30	177.348.672	1,00	1,00	0,48	0,78	0,32	0,68	0,19	0,66

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	40	31.425.000	90	35.000.000	60	38.500.000	60	47.000.000	40	31.425.000	43	0	51	0	18	32.167.000	1,00	1,00	0,48	-	0,85	-	0,30	0,68
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	-	-	3	110.000.000	24	121.000.000	24	130.350.000	-	-	5	61.497.000	33	81.200.578	12	69.331.250			1,67	0,56	1,38	0,67	0,50	0,53

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
dan NAPZA	HIV/AIDS dan NAPZA																								
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**	100	267.692.169	100	340.690.200	100	1.394.759.220	100	1.504.235.142	100	223.447.000	100	361.446.100	100	3.018.869.715	100	347.688.982	1,00	0,83	1,00	1,06	1,00	2,16	1,00	0,23
	Persentase PPKS yang tertangani	100	55.965.843	100	66.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	100	21.704.000	100	47.057.042	100	78.643.220	100	72.177.120	1,00	0,39	1,00	0,71	1,00	1,08	1,00	0,90

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	**Persentase anak yang diadopsi**	100	55.965.843	100	66.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	100	21.704.000		47.057.042	100	78.643.220	100	72.177.120	1,00	0,39	-	0,71	1,00	1,08	1,00	0,90
Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20	55.965.843	20	66.000.000	20	72.600.000	20	79.860.000	12	21.704.000	20	47.057.042	12	78.643.220	12	72.177.120	0,60	0,39	1,00	0,71	0,60	1,08	0,60	0,90
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-										

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Berlaku Kewenangan Provinsi																								
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	**Persentase Data Fakir Miskin yang tekelola**	100	267.692.169	100	340.690.200	100	1.394.759.220	100	1.504.235.142	100	223.447.000		361.446.100	100	3.018.869.715	100	347.688.982	1,00	0,83	-	1,06	1,00	2,16	1,00	0,23
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	-	-		-	4.653	2.182.114.544	1	87.205.000					4.653,00	8,73	1,00	0,35

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten /Kota	36	267.692.169	168	340.690.200	2	594.759.220	2	654.235.142	1	223.447.000	1	361.446.100	160	522.910.750	150	248.934.982	0,03	0,83	0,01	1,06	80,00	0,88	75,00	0,38
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	4	550.000.000	4	600.000.000	-	-		-	50	313.844.421	1	11.549.000					12,50	0,57	0,25	0,02
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	100	2.799.922.674	100	985.000.000	100	1.083.500.000	100	1.191.850.000	100	483.143.386	100	1.630.415.249	100	2.111.556.560	100	1.500.560.047	1,00	0,17	1,00	1,66	1,00	1,95	1,00	1,26

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	**Persentase Korban bencana yang mendapat perlindungan sosial**	100	2.799.922.674	100	985.000.000	100	1.083.500.000	100	1.191.850.000	100	483.143.386		1.630.415.249	100	2.111.556.560	100	1.500.560.047	1,00	0,17	-	1,66	1,00	1,95	1,00	1,26
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	15.000	2.535.311.155	2.800	420.000.000	3.000	462.000.000	3.000	516.175.000	12	258.971.000	12	1.164.324.915	33.434	1.382.465.550	26.193	881.750.436	0,00	0,10	0,00	2,77	11,14	2,99	8,73	1,71

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	60	8.775.960	383	145.000.000	500	159.500.000	500	167.475.000	10	1.316.394	12	142.950.684	830	382.873.675	891	376.488.770	0,17	0,15	0,03	0,99	1,66	2,40	1,78	2,25
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	-	-	12	300.000.000	3.000	330.000.000	3.000	363.000.000		-	12	242.384.650	12	224.770.500	12	112.673.500			1,00	0,81	0,00	0,68	0,00	0,31
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok	60	86.213.957	50	98.000.000	3.000	107.800.000	3.000	118.580.000	10	53.334.680	12	80.755.000	400	106.946.835	3.081	118.539.841	0,17	0,62	0,24	0,82	0,13	0,99	1,03	1,00

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Rentan Kewenangan Provinsi																								
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	60	169.621.602	50	22.000.000	3.000	24.200.000	3.000	26.620.000	10	169.521.312	12	-	25.000	14.500.000	2.794	11.107.500	0,17		0,24	-	8,33	0,60	0,93	0,42

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penanganan PPKS	16,50		16,50		17		17		10		23,14 Persen		17 Persen		16,5 Persen		0,59							
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	25,00	24.744.009.209	25,00	450.000.000	25,00	31.211.006.920	25,00	31.368.006.170	25,00	24.965.915.969	25 Persen	3.298.548.671	25 Persen	29.585.360.611	25 Persen	10.702.662.200	1,00	1,01		7,33		0,95		0,34

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	18,40	619.500.000	17,91	520.000.000	17,79	906.314.703	17,66	1.470.207.775	18,40	578.500.000	14,08 Persen	25.538.705.400	41,86 Persen	1.249.440.375	17,66 Persen	636.989.500	1,00	0,93		49,11		1,38		0,43
	Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS yang di tingkatkan kapasitasnya	18,84	146.085.969	18,38	300.000.000	18,27	590.000.000	18,16	900.000.000	18,84	117.014.516	16,85 Persen	248.418.500	14,73 Persen	673.773.135	18,16 Persen	437.420.830	1,00	0,80		0,83		1,14		0,49
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah	**Jumlah dokumen izin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu)**	-	-	-	-	1	173.910.567	1	200.000.000		-		-	1	125.119.500	1	31.567.032					1,00	0,72	1,00	0,16

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Provinsi	**Daerah Provinsi yang dikeluarkan**																								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	-	-	1	173.910.567	1	200.000.000		-		-	1	125.119.500	1	31.567.032					1,00	0,72	1,00	0,16
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang**	100	25.509.595.178	100	1.270.000.000	100	32.533.411.055	100	33.538.213.945	100	25.661.430.485		29.085.672.571	100 Persen	32.720.261.321	100 Persen	12.952.613.030	1,00	1,01	-	22,90	#VALUE!	1,01	#VALUE!	0,39

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	diberdayakan																								
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	45	146.085.969	116	300.000.000	120	315.000.000	120	600.000.000	45	117.014.516	200	248.418.500	48	673.773.135	120	437.420.830	1,00	0,80	1,72	0,83	0,40	2,14	1,00	0,73
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-	-	-	-	169	275.000.000	169	300.000.000	-	-		-	169	1.211.687.200	169	1.175.540.500					1,00	4,41	1,00	3,92

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	360	619.500.000	663	520.000.000	675	906.314.703	675	1.470.207.775	347	578.500.000	100	25.538.705.400	675	1.249.440.375	371	636.989.500	0,96	0,93	0,15	49,11	1,00	1,38	0,55	0,43
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	155	24.744.009.209	109	450.000.000	120	31.037.096.353	120	31.168.006.170	133	24.965.915.969	24	3.298.548.671	9	29.585.360.611	120	10.702.662.200	0,86		0,22	7,33	0,08	0,95	1,00	0,34
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Kondisi Taman Makan Pahlawan yang terpelihara**	100	248.114.548	100	220.000.000	100	242.000.000	100	250.000.000	100	233.702.264	100	670.172.703	100	269.467.746	100	179.401.985	1,00	0,94	1,00	3,05	1,00	1,11	1,00	0,72

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**Jumlah TMP yang dipelihara**	1	248.114.548	1	220.000.000	1	250.000.000	1	320.000.000	1	233.702.264		670.172.703	1	269.467.746	1	179.401.985	1,00	0,94	-	3,05	1,00	1,08	1,00	0,56
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	248.114.548	1	220.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000							1	179.401.985	-	-	-	-	-	-	0,33	0,72
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-	-	-	3	50.000.000	3	70.000.000	1	233.702.264	1	670.172.703	1	269.467.746							0,33	5,39	-	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		2		2		3		3		2		1,93 Persen		1,58 Persen			1,58 Persen	1,00							
		2		2		3		3		2		1,93 Persen		1,58 Persen			1,58 Persen	1,00							

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	30.041.865.340	100	30.364.215.166	100	38.057.260.878	100	38.073.489.618	100	28.820.036.051	100	29.988.816.905	100	35.915.833.204	100	34.790.755.571	1,00	0,96	1,00	0,99	1,00	0,94	1,00	0,91
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi**	1	25.098.510.060	1	25.069.504.467	1	25.696.242.079	1	26.338.648.131	1	23.951.571.779	1	23.959.215.758	1	26.971.490.764	1	27.673.626.416	1,00	0,95	1,00	0,96	1,00	1,05	1,00	1,05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170	25.098.510.060	170	25.069.504.467	170	25.696.242.079	170	26.338.648.131	172	23.951.571.779	142	23.959.215.758	150	26.971.490.764	150	27.673.626.416	1,01	0,95	0,84	0,96	0,88	1,05	0,88	1,05
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat**	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-	-		-	1	56.950.000	1	61.704.890					1,00	0,57	1,00	0,62

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Daerah yang dikelola																								
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-	-		-	1	56.950.000	1	61.704.890					1,00	0,57	1,00	0,62
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian**	-	-	-	-	1	400.000.000	1	425.000.000	-	-		-		-							-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	170	400.000.000	170	425.000.000	-	-		-		-							-	-	-	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi**	5	770.242.985	5	1.018.633.538	5	1.583.664.400	5	1.920.000.000	5	695.351.977	5	1.020.412.626	7	1.490.448.504	7	1.147.152.950	1,00	0,90	1,00	1,00	1,40	0,94	1,40	0,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	24.999.456	5	30.000.000	5	35.000.000	5	55.000.000	9	24.997.500	9	40.000.000	5	58.947.366	5	27.597.375	1,50	1,00	1,80	1,33	1,00	1,68	1,00	0,50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	69.998.239	25	79.999.508	25	200.000.000	25	275.000.000	29	69.741.100	29	99.135.575	25	349.088.228	25	217.863.575	1,00	1,00	1,16	1,24	1,00	1,75	1,00	0,79
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	59.618.000	3	150.000.000	3	265.000.000	3	310.000.000	3.280	59.192.000	400	89.027.000	3	142.996.530	3	203.510.001	1,00	0,99	133,33	0,59	1,00	0,54	1,00	0,66

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	19.999.290	8	59.906.030	8	150.000.000	8	235.000.000	17	19.827.200	8	77.074.800	6	94.635.075	8	72.036.100	2,43	0,99	1,00	1,29	0,75	0,63	1,00	0,31
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	10	100.000.000	10	150.000.000	-	-		-	10	99.418.482	10	75.503.308					1,00	0,99	1,00	0,50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-	-		-	1	1.400.000	1	3.292.500					1,00	0,01	1,00	0,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	595.628.000	1	698.728.000	1	733.664.400	1	795.000.000	1	521.594.177	218	715.175.251	1	743.962.823	1	547.350.091	1,00	0,88	218,00	1,02	1,00	1,01	1,00	0,69

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	1	653.136.786	1	299.477.050	3	1.600.000.000	3	800.000.000	1	653.136.786	1	1.004.058.780	2	971.672.662	3	174.210.150	1,00	1,00	1,00	3,35	0,67	0,61	1,00	0,22
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	2	1.000.000.000	-	-	-	-		-		-							-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-		-		-	3	-								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	8	100.000.000	8	100.000.000	-	-		-	8	121.264.608	17	-					1,00	1,21	2,13	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58	653.136.786	30	299.477.050	30	500.000.000	40	500.000.000	58	653.136.786	30	1.004.058.780	30	850.408.054	40	174.210.150	1,00	1,00	1,00	3,35	1,00	1,70	1,00	0,35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi**	3	3.026.999.509	3	3.428.024.111	3	3.577.354.399	3	3.249.841.487	3	3.026.999.509	3	3.038.439.934	3	3.235.328.115	3	3.693.258.802	1,00	1,00	1,00	0,89	1,00	0,90	1,00	1,14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	-	-	250	2.500.000	1	2.000.000	1	2.400.000			250,00	1,00	1,00	0,67	1,00	0,80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	499.991.712	1	551.169.712	1	700.000.000	1	715.000.000	1	499.991.712	48	349.033.195	12	424.468.931	1	613.239.204	1,00	1,00	48,00	0,63	12,00	0,61	1,00	0,86

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2.527.007.797	1	2.874.354.399	1	2.874.354.399	1	2.531.841.487	1	2.527.007.797	100	2.686.906.739	12	2.808.859.184	1	3.077.619.598	1,00	1,00	100,00	0,93	12,00	0,98	1,00	1,22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	2	492.976.000	2	548.576.000	2	5.100.000.000	2	5.240.000.000	2	492.976.000	2	966.689.807	7	3.189.943.159	7	2.040.802.363	1,00	1,00	1,00	1,76	3,50	0,63	3,50	0,39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	1	98.320.000	1	199.000.000	11	500.000.000	11	565.000.000	1	98.320.000	36	363.709.343	11	251.973.501	11	246.261.330	1,00	1,00	36,00	1,83	1,00	0,50	1,00	0,44

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jabatan	Pajaknya																								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	42	1.000.000.000	44	1.200.000.000	-	-		-	42	777.259.724	44	137.248.245					1,00	0,78	1,00	0,11
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	10	200.000.000	10	200.000.000	-	-		-	10	107.063.940	3	2.500.000					1,00	0,54	0,30	0,01
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	120	200.000.000	120	200.000.000	-	-		-	120	137.180.278	120	66.760.000					1,00	0,69	1,00	0,33

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) ,Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	2.000	2.800.000.000	250	2.500.000.000	-	-		-	2.000	1.519.235.247	1	1.049.458.884					1,00	0,54	0,00	0,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	-	-		-	2	199.206.000	1	538.573.904					1,00	1,00	0,50	2,69
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	394.656.000	5	349.576.000	10	200.000.000	10	375.000.000	5	394.656.000	7	602.980.464	10	198.024.469	2	-	1,00	1,00	1,40	1,72	1,00	0,99	0,20	-

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial penanganan terhadap PPKS dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta melaksanakan 2 (dua) pendekatan yakni penanganan PPKS berbasis kelembagaan melalui Panti Rehabilitasi Sosial dan berbasis peran serta masyarakat bekerjasama dengan Institusi Sosial di Kabupaten/Kota. PPKS yang ada di Provinsi Riau sebagai berikut.

a) Anak Balita Telantar

Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu dengan kriteria :

a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
b. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi anak balita terlantar ini antara lain dilakukan dengan proses adopsi anak bagi anak yang benar- benar tanpa asuhan atau kehilangan hak asuh dari orangtua / keluarga. Tercatat selama 5 tahun terakhir ini ada sebanyak 33 anak balita terlantar dana anak terlantar yang dilakukan proses adopsi.

Namun upaya utama yang perlu dilakukan adalah dengan pendekatan keluarga. Yang perlu dilakukan adalah upaya agar anak dapat dipelihara di lingkungan keluarganya, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap anak balita terlantar di dalam keluarga tersebut. Sedangkan pelayanan melalui panti adalah opsi terakhir yang bisa diberikan jika upaya pendekatan keluarga dan penanganan lainnya di luar panti tidak bisa dilaksanakan.

b) Anak terlantar

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

.

Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki panti khusus yang memberikan pelayanan dasar bagi anak terlantar yaitu UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak. Selain panti milik pemerintah, anak terlantar juga banyak yang dipelihara melalui panti anak milik masyarakat. Berdasarkan Data dari Forum Panti Provinsi Riau, terdapat sebanyak 134 Panti anak yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Dari jumlah ini, sebanyak 84 Panti diberikan bantuan permakanan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang memelihara sebanyak 3.245 anak terlantar.

c) Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

a. Disangka;
b. Didakwa; atau
c. Dijatuhi pidana

Anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum ini penanganannya dilakukan melalui rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan di dalam panti. Untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Riau berada di dalam panti, dilakukan pelayanan rehabilitasi sosial dasar melalui UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk. Kapasitas panti ini adalah sebanyak 30 anak dalam satu tahun.

d. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

a. Menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Penanganan bagi anak dengan kedisabilitasan dilaksanakan dengan pelayanan sosial di luar panti dengan melibatkan berbagai macam OPD yang terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan , dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
c. Pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria:

a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
b. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
c. Korban perdagangan manusia;
d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
e. Korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
g. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
h. Terinfeksi HIV/AIDS.

g. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- Terlantar secara psikis, dan sosial.

Penanganan untuk kriteria lanjut usia terlantar ini dilakukan di luar panti dan di dalam panti. Proses pelayanan di luar panti diupayakan adengan pendekatan kekeluargaan, dan jika tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keluarga maka selanjutnya diberikan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Pelayanan ini dilaksanakan melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau.

h. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

1) Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
2) Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
3) Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
4) Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
5) Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
6) Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Penanganan bagi penyandang disabilitas untuk kewenangan provinsi adalah upaya rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan melalui UPT Bina Laras bagi disabilitas mental dan UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa bagi penyandang disabilitas daksa terlantar.

i. Tuna Susila

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

j. Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang

tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Jumlah gelandangan di Provinsi Riau tidak menunjukkan angka peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 131 orang. Pada Tahun 2017 meningkat sedikit menjadi 158 orang. Pada Tahun 2018 bertambah cukup banyak menjadi 678 orang. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat menurun menjadi 316 orang, dan di tahun 2020 menurun menjadi 263 orang.

k. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

1. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
2. Berpakaian kumuh dan compang camping;
3. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
4. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

l. Pemulung

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

1. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
2. Mengumpulkan barang bekas.

m. Kelompok Minoritas

Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

1. Gangguan keberfungsian sosial;
2. Diskriminasi;
3. Marginalisasi; dan
4. Berperilaku seks menyimpang *(tambahakan narasi seperti LGBT)*

n. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
2. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

o. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
2. Telah terinfeksi HIV/AIDS.

p. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah

menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;

2. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
3. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

q. Korban trafficking

Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria:

1. Mengalami tindak kekerasan;
2. Mengalami eksploitasi seksual;
3. Mengalami penelantaran;
4. Mengalami pengusiran (deportasi); dan
5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

r. Korban tindak kekerasan

Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

1. Mengalami perlakuan salah;
2. Mengalami penelantaran;
3. Mengalami tindakan eksploitasi;
4. Mengalami perlakuan diskriminasi;
5. Dibiarkan dalam situasi berbahaya.

s. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

1. Pekerja migran domestik;
2. Pekerja migran lintas negara;
3. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
4. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
5. Pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
6. Pekerja migran miskin;
7. Mengalami masalah sosial dalam bentuk :
    a. Tindak kekerasan;
    b. Eksploitasi;
    c. Penelantaran;
    d. Pengusiran (deportasi);
    e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
    f. Mengalami traffiking.

t. Korban bencana alam

Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban terluka atau meninggal;
2. Kerugian harta benda;
3. Dampak psikologis; dan
4. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Bencana alam yang cukup sering terjadi di Provinsi Riau adalah Bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan angin putting beliung. Penanganan yang menjadi kewenangan provinsi disesuaikan dengan skala bencana provinsi. Sedangkan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 adalah korban bencana yang berada di pengungsian.

u. Korban bencana sosial

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa manusia;
2. Kerugian harta benda; dan
3. Dampak psikologis.

v. Perempuan rawan sosial ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

1. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

w. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria:

1. Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskinyang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga

per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).

4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
6. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
8. Sulit memperoleh air yang bersih

x. Keluarga bermasalah sosial psikologis

Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

1. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun social kurang terpenuhi.

y. Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

1. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
4. Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsistem;
5. Peralatan dan teknologinya sederhana;
6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan

7. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelayanan kesejahteraan sosial PPKS berperan melalui penguatan kapasitas dan motivasional dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial,

Penanganan masalah sosial di daerah memerlukan harmonisasi antara berbagai instansi untuk memastikan pelayanan diberikan secara tuntas dari hulu hingga ke hilir. Jika Dinas Sosial berperan sebagai "pintu masuk" dan pengelola rehabilitasi, maka instansi lain berperan dalam menutup celah kebutuhan dasar lainnya:

a) Dinas Kesehatan: Bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan, mulai dari pemeriksaan rutin di dalam panti, penanganan kesehatan mental bagi eks psikotik hingga pembiayaan melalui jaminan kesehatan daerah bagi warga yang tidak mampu.
b) Dinas Dukcapil: Berperan vital dalam aspek administratif. Tanpa dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga, seorang PPKS tidak akan bisa mendapatkan akses bantuan sosial pemerintah. Sinergi ini memastikan setiap individu terlantar memiliki identitas hukum yang jelas.
c) Dinas Pendidikan: Menjamin keberlanjutan masa depan anak-anak jalanan atau anak terlantar melalui program pendidikan inklusif, baik sekolah formal maupun paket kesetaraan, agar mereka memiliki bekal untuk keluar dari garis kemiskinan.
d) Dinas Tenaga Kerja dan UMKM: Fokus pada fase pasca-rehabilitasi (hilir). Setelah mendapatkan pembinaan mental di panti, para penyandang disabilitas atau mantan tuna susila membutuhkan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha agar tidak kembali ke jalanan dan mampu hidup mandiri secara ekonomi.
e) Satpol PP dan Kepolisian: Berperan dalam fungsi perlindungan dan penertiban yang bersifat persuasif dan humanis, terutama dalam menjangkau PPKS di ruang publik untuk kemudian diserahkan ke Dinas Sosial demi mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Selain instansi pemerintah, peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti TKSK, Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat menjadi ujung tombak dalam deteksi dini masalah di tingkat desa/kecurahan. Kolaborasi ini juga diperkuat oleh sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat memberikan dukungan sarana prasarana yang tidak tercover

penuh oleh APBD. Melalui kerja sama lintas sektor ini, penanganan PMKS tidak lagi hanya sekadar "memberi makan," tetapi menjadi upaya sistematis untuk memulihkan martabat dan keberfungsian sosial warga negara secara utuh.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelayanan kesejahteraan sosial PPKS berperan melalui penguatan kapasitas dan motivasional dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana operasional kinerja, pemberian bantuan sarana prasarana organisasi PSKS.

PSKS terdiri dari :

1. Pekerja Sosial Profesional

   Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

   Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana)

   Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

6. Karang Taruna

   Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama

bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

   Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

8. Keluarga pioner

   Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

9. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)

   Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

10. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial

    Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

11. Penyuluh Sosial

    Penyuluh Sosial terbagi atas 2 (dua), yaitu Penyuluh Sosial Fungsional dan Penyuluh Sosial Masyarakat.

12. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

    Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

13. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

    Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

kecamatan.

14. Dunia usaha

Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Riau didukung secara fundamental oleh 12 pilar Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kehadiran mereka merupakan manifestasi dari kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk menjangkau persoalan sosial hingga ke pelosok desa, wilayah pesisir, hingga komunitas adat. Secara kolektif, PSKS berfungsi sebagai mitra strategis Dinas Sosial yang bergerak mulai dari level pencegahan, pendampingan, hingga penanganan darurat di lapangan.

Di garis depan koordinasi, terdapat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berperan sebagai penyambung lidah antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Di wilayah Riau yang luas, TKSK memastikan verifikasi data kemiskinan (DTKS) akurat di tingkat kecamatan, sementara PSM menjadi radar sosial di tingkat desa yang mendeteksi warga telantar atau difabel yang belum tersentuh layanan. Pendampingan ini diperkuat oleh Pekerja Sosial Profesional dan Penyuluh Sosial yang memberikan intervensi klinis serta edukasi untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan sejahtera.

Peran pemberdayaan dan pencegahan turut dipegang erat oleh Karang Taruna, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM). Karang Taruna berfokus pada pembinaan pemuda Riau agar produktif dan menjauhi penyakit sosial, sementara WPKS fokus pada penguatan ekonomi perempuan rawan sosial. WKSBM sendiri menghidupkan kembali kearifan lokal gotong royong di Bumi Lancang Kuning, di mana masyarakat secara swadaya saling membantu tetangga yang mengalami krisis ekonomi mendadak tanpa harus selalu menunggu bantuan formal dari pusat.

Untuk urusan penanganan khusus, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Dunia Usaha, dan Relawan Sosial bekerja menyediakan infrastruktur dan dukungan materil. LKS di Riau menjadi pilar yang mengelola panti-panti swasta, sedangkan Dunia Usaha menyalurkan CSR untuk pembangunan fasilitas publik yang inklusif. Terakhir, dalam menghadapi risiko kebencanaan dan konflik, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Pelopor Perdamaian menjalankan fungsi

perlindungan. Tagana Riau sangat krusial dalam manajemen logistik saat banjir atau karhutla, sementara Pelopor Perdamaian menjaga harmonisasi masyarakat Riau yang heterogen agar tetap rukun dan terhindar dari disintegrasi sosial.

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian layanan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ini pada dasarnya merupakan mitra Dinas Sosial Provinsi Riau dalam memberikan layanan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial di Provinsi Riau. Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Pendamping Sosial, dan TKSK merupakan perpanjangan tangan Dinas Sosial dalam memberikan layanan sosial di tingkat kelurahan/desa. Karang Taruna hingga Dunia Usaha yang tergabung dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) terus bereran dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan sosial masyarakat khusus di tempat Lembaga tersebut menjalankan usaha. Pemerintah Provinsi Riau sendiri telah menjalin kesepakatan Kerjasama dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Riau Nomor : 1/KSB/I/2023 / Nomor : 09/FCSRI-TJSLBU/I/2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau.

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Riau merupakan bentuk nyata kolaborasi antara sektor perbankan daerah dan Dinas Sosial dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Peran ini diwujudkan melalui kemitraan strategis dalam penyaluran berbagai bantuan sosial, di mana BRK Syariah menyediakan ekosistem perbankan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana bantuan sampai ke tangan penerima manfaat, seperti fakir miskin dan lansia, secara tepat waktu. Selain fungsi distribusi, Bank Riau juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga mereka memiliki akses terhadap sistem perbankan formal yang dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan ekonomi keluarga.

2.7. Kerjasama Daerah Yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Selain itu Kerjasama juga dilakukan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau melalui MoU Nomor : 460/MoU/DINSOS/531 / Nomor : 230/MoU/BAZNAS-PR/V/2023 terkait Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) se Provinsi Riau melalui Pemanfaatan Dana Infak dan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Melaui kegiatan ini telah terselenggara sejumlah layanan sosial seperti pemulangan orang terlantar, santunan bagi masyarakat miskin, lansia terlantar, dan disabilitas terlantar.

2.8. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan kesejahhteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Riau sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Pokok Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(2)	(3)	(4)
Masih rendahnya Pelayanan terhadap PPKS di Provinsi Riau	Belum optimalnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana di Provinsi Riau
		Belum tersedianya sumber daya penanggulangan bencana yang terampil dan handal
		Belum terciptanya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS yang terkoordinasi dengan baik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti
		Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Panti yang melayani PPKS di Provinsi Riau
		Belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi PPKS di dalam panti di Provinsi Riau
		Belum tercapainya sistem pelayanan dan penanganan masalah terkait PPKS di Provinsi Riau
	Belum optimalnya upaya penanganan fakir miskin	Belum Sinkronnya data Fakir Miskin
		Belum terlaksananya koordinasi yang baik dalam penanganan fakir miskin
		Belum optimalnya tata kelola kerjasama dengan multihelix dan pemanfaatan pendanaan dari sumber lainnya dalam penanganan kemiskinan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(2)	(3)	(4)
		Masih kurangnya pemahaman terkait kebijakan penanganan fakir miskin berdasarkan kewenangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan data kesejahteraan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial
Masih rendahnya Peran PSKSdalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Riau	Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial bagi PSKS	Belum terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu di setiap Kabupaten Kota di Provinsi Riau
		Belum terberdayakannya seluruh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Provinsi Riau

	Belum terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah dan PSKS yang ada di Provinsi Riau
	Belum tergalinya seluruh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimiliki di Riau
	Masih rendahnya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(2)	(3)	(4)
		nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat

Pemetaan permasalahan sebagaimana tabel di atas merupakan perumusan dari masalah pokok Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Tujuan ke 5 RPD Provinsi Riau pada sasaran yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Apabila dirinci hingga akar masalah maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

a. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga pelayanan terhadap yang dapat diberikan kepada PPKS masih rendah. Khusus untuk pelayanan di dalam panti guna pemenuhan SPM bidang sosial, UPT khusus pelayanan bagi gelandang dan pengemis masih belum dibentuk sehingga mengurangi kualitas pelayanan bagi gelandang dan pengemis;
b. Belum simultannya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
c. Belum optimalnya Sumber Daya aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama karena masih minimnya jumlah pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Panti Rehabilitasi Sosial dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
d. Belum optimalnya kemitraan strategis dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang mampu mendorong pengalokasian anggaran APBD Kabupaten/Kota dan penyediaan shelter (Camp Asessment) untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
e. Belum optimalnya peran Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Riau yang perlu didorong dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

f. Belum optimalnya intergrasi program dan kegiatan secara menyeluruh antar unit teknis Dinas Sosial yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PPKS.

g. Masih kurangnya dukungan penganggaran untuk program kegiatan di daerah dari sumber lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa banyak program dan kegiatan prioritas yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Namun tidak semua komponen dapat terpenuhi dibiayai oleh APBD oleh karena anggaran yang terbatas.

2.9. Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa Provinsi dan beberapa negara tetangga. Wilayahnya yang sebagian besar daratan dengan bentuk topografinya turut pula mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Berbagai macam aspek tersebut menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Riau yang majemuk. Penduduk yang menetap di Riau tidak hanya suku bangsa melayu, namun juga banyak dari suku minang, jawa, banjar, bugis, keturunan cina, dan suku pedalaman. Permasalahan sosial yang muncul pun beraneka ragam.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya adalah pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini tercantum dalam **"Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju"**. Program dan kegiatan yang dicanangkan dalam OPD Dinas Sosial Provinsi Riau mengacu pada Misi ketiga yaitu memerangi Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam pembangunan bidang sosial di Provinsi Riau. Pembangunan ini terlihat dari pemberian pelayanan bagi PPKS dalam bentuk bantuan dan selanjutnya peningkatan keberdayaan PPKS agar dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga PPKS dapat bertumbuh menjadi individu yang potensial. Pemberdayaan PSKS pun adalah faktor penting dalam pembangunan sosial berkelanjutan di ProvinsiRiau.

Dengan adanya Tenaga penyuluh, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang taruna, keluarga pioneer, dan lainnya diharapkan menjadi potensi yang akan mengembangkan dan menggerakkan pembangunan sosial sehingga kesejahteraan sosial dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat Riau.

Isu strategis yang dihadapi dalam bidang sosial saat ini adalah masih rendahnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani yang hingga saat ini baru mencapai 36,6 Persen. Dari isu utama ini berbagai permasalahan muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain:

1. Masih belum terpenuhinya pelayanan sosial yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Masih rendahnya kualitas, pemanfaatan, dan ketepatan sasaran Data Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau
3. Belum maksimalnya peran dari Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mendukung penanganan PPKS.
4. Rendahnya Akses Masyarakat Miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar

Berbagai macam permasalahan yang muncul tersebut adalah bagian dari perjalanan proses pembangunan kesejahteraan sosial di Riau. Berbagai isu tersebut masih terkait dengan kebutuhan akan perlindungan dan jaminan sosial, kebutuhan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial khususnya bagi PSKS, serta penanganan fakir miskin.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Riau

Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin di Wujudkan selama 5 (lima) tahun untuk mengambarkan kebermanfaatan Dinas Sosial Provinsi Riau berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian penjabaran dari Sasaran RPJMD Provinsi RiauTahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif. Dari sasaran RPJMD tersebut, Dinas Sosial Provinsi Riau menetapkan Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif".**

Sasaran adalah rangkaian kinerja yangyang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnyapencapaian tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari penjabaranOutcome RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitumeningkatnyakualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas.

Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Riau

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatnya Kesejahteraan		Indeks Keseiahteraan Sosial (poin)	56,90	56,95	56,99	57,05	57,15	57,20	57,25

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Sosial yang Inklusif	Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi) (%)	82	84,62	86	87	88	89	90
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	71,15	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka sasaran yang ditetapkan berbeda-beda. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dari jumlah pelayanan yang dapat diberikan terhadap PPKS. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu hal yang turut diperhatikan juga dalam menetapkan sasaran program kegiatan tiap tahunnya.

Dengan memberikan bantuan dan pelayanan saja pada dasarnya upaya untuk menurunkan kemiskinan belum bisa tercapai, oleh sebab itu perlu juga untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di masyarakat yang dapat diberdayakan dan dilibatkan dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat.

Penurunan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja,sebagaimana perubahan sosial tidak dapat dilakukan sendirian. Mengubah keadaan hendaknya dilakukan Bersama-sama dengan berbagai pihak. Hanya kolaborasilah yang memungkinkan suatu masyarakat untuk dapat terlepas dari kemiskinan, dapat maju dan terus berkembang. Upaya kedepan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak tidak hanya dengan metode multi helix sebagaimana dilakukan selama ini antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha saja, namun lebih dari itu perlu dilakukan kolaborasi yang lebih berkembang dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media.

Akademisi pada konteks perubahan sosial dapat berperan sebagai konseptor, seperti misalnya melakukan penelitian dengan tujuan untuk membantu menganalisa kesejahteraan sosial dan kemiskinan di masyarakat, disamping itu melalui kerjasama dengan akademisi dapat pula membantu melakukan pendataan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Dunia usaha merupakan salah satu pilar yang telah ada dan terus diharapkan bersibergi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang kini dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020. Regulasi ini mendorong Badan usaha tidak hanya mengejar keuntungan namun juga berperan aktif membantu pemerintah dalam penanganan kesejahteraan sosial masyarakat.

Media dalam konteks pembangunan sosial dapat berperan sebagai fungsi informasi dan alat kontrol sosial. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan era digital saat ini informasi begitu penting dan menetukan dalam setiap kondisi bahkan dalam mengambil keputusan serta perubahan. Tidak jarang kita temukan kondisi ketimpangan sosial atau permasalahan sosial yang tidak terendus sama sekali akhirnya diketahui oleh semua kalangan akibat menjadi viral dengan adanya teknologi informasi khususnya media online. Dengan hal itu akhirnya permasalahan tersebut mendapatkan perhatian dan dapat diselesaikan.

Dalam bidang kemiskinan, kondisi inclusion error serta exclusion error juga dapat dicegah dan diminimalisir dengan peran media sosial yang terus memonitor dan memberitakan kondisi riil ke berbagai pihak. Oleh karenanya media sosial sangat besar perannya dan perlu untuk dikembangkan dalam upaya kolaborasi ini.

3.2 Strategi Dinas Sosial Provinsi Riau

Dalam upaya untuk menerapkan tujuan serta sasaran Dinas Sosial Provinsi Riau dalam pembangunan bidang sosial maka diperlukan strategi atau langkah-langkah yang disusun guna penerapan untuk mendapatkan hasil. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun (2025-2029).

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan sosial Dinas Sosial Provinsi Riau selain pencapaian tujuan dan sasaran dalam visi dan misi juga memperhatikan: (1) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan ekstrim; dan (2) Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dirangkum dalam isu strategis daerah.

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam menyusun strategi dalam mewujudkan pembangunan sosial Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya angka kemiskinan yang menggambarkan tingkat kemiskinan suatu daerah Kabupaten/Kota sehingga dalam penyusunan program dan kegiatan serta menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan dapat dipertimbangkan sehingga program kegiatan bisa menjadi tepat guna, efektif, dan efisien.
2. Pendekatan pembangunan yang berbasis pada peningkatan kualitas SDM (human skill) dengan melihat data potensi sumber daya kesejahteraan sosial yang ada atau yang dapat dikembangkan sehingga mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar, termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Tercapainya transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan modal manusia dan modal sosial budaya. Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk :

1. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam segala bentuk;
2. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan Kesehatan, gizi, Pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan;
3. Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang;
4. Membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
5. Membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status;
6. Melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia terutama hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
7. Mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang;
8. Meningkatkan peran masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan;
9. Mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Dalam upaya melaksanakan transformasi sosial tersebut, salah satunya yang perlu dilaksanakan adalah memastikan terciptanya

perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Kebijaksanaan ini dilaksanakan melalui :

1. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem data kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh;
2. Penguatan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal;
3. Pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim;
4. Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
6. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
7. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai Angkatan kerja, antara lain melalui penerapan care economy, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan;
8. Inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya pengembangan *social impac bonds, social impact investment*, dan optimalisasi dana jaminan sosial;
9. Penguatan tata Kelola dan kelembagaan data untuk penentuan target penerima manfaat termasuk data kesejahteraan sosial.

Guna menjamin keberfungsian sosial setiap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tersebut maka dilakukan upaya peningkatan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta peningkatan peran dari potensi sumber kesejahteraan sosial yang merupakan upaya kolaborasi pemerintah dengan berbagai macam pihak terkait. Upaya ini dilakukan tidak hanya agar masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara terus menerus dengan ditanggung oleh negara, namun lebih dari itu adalah upaya "*to help people to help themselves*", (membantu masyarakat agar masyarakat tersebut bisa membantu dirinya sendiri). Upaya ini dilakukan dengan menghoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial serta mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial. Selain itu pemberdayaan setiap potensi sumber kesejahteraan sosial melalui kolaborasi 5 aspek (multi helix) pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media akan menciptakan upaya pembangunan bidang kesejahteraan sosial kearah yang lebih baik, efektif, dan tepat sasaran

3.3 Pentahapan

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial dilakukan dengan tahapan berikut ini. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pemerataan layanan untuk masyarakat miskin, pemberdayaan, jaminan sosial, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Pengembangan lanjut layanan untuk masyarakat miskin, pemberdayaan, jaminan sosial, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Perluasan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, dan inklusif	Penguatan jiwa usaha/ enterpreneur, pelatihan dan pelingkatan peluang usaha masyarakat miskin	Pemantapan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pengurangan keenjangan antar masyarakat dan antar wilayah

3.5 Kebijakan

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	Pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Meningkatnya tata Kelola Taman Makam Pahlawan Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Dilaksanakan melalui Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Pemberdayaan Sosial, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dan Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1(Bagan)

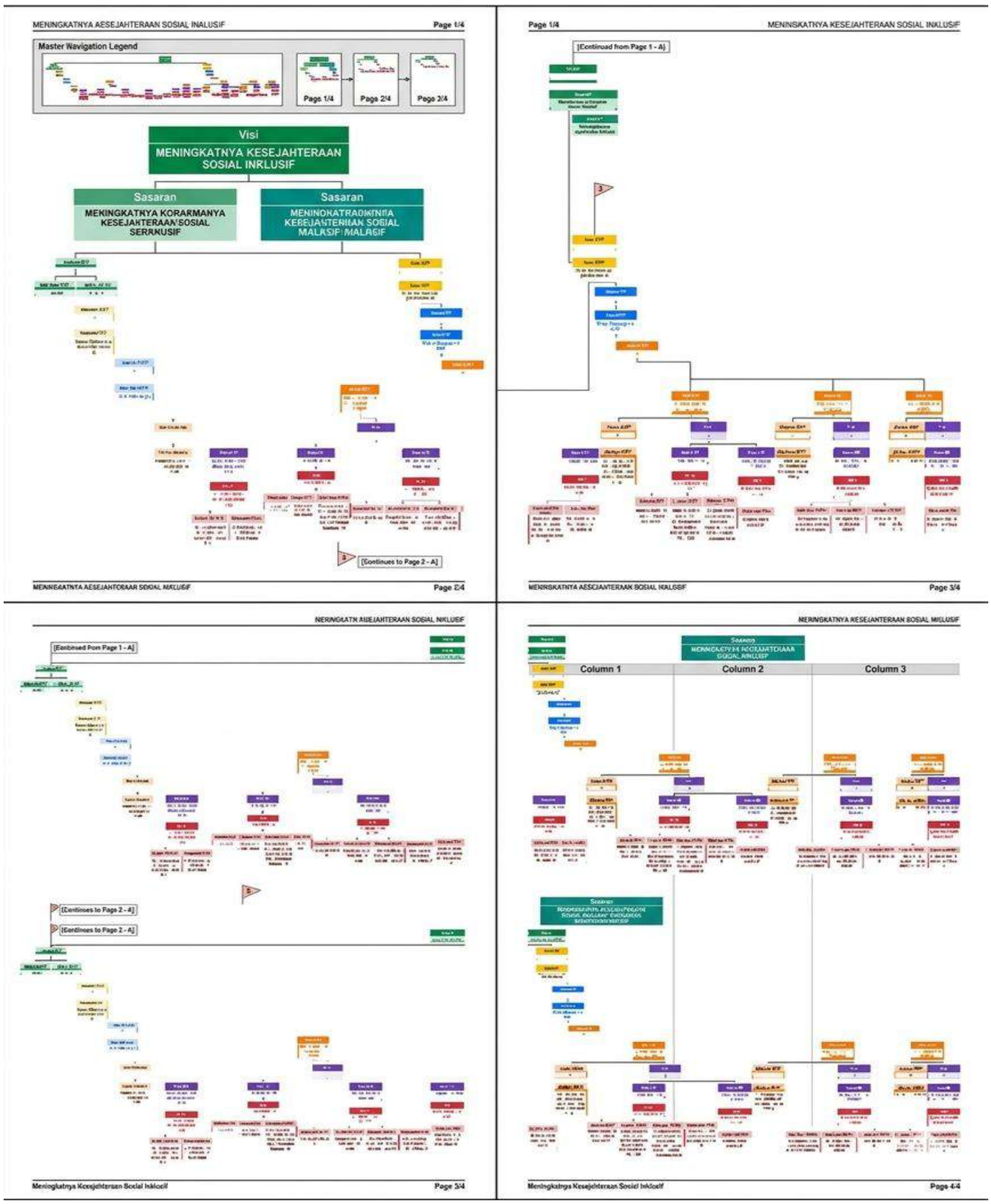

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL							
- Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif				Indeks Keseiahteraan Sosial (poin)		
		Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial (Persentase)		
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan (Persentase)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.1.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.1.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Nilai)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Nilai)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Peranan Sosial (Nilai)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandang Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0017 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen)	1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0022 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
					Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut UsiaTerlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0015 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.04.0013 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Orang)	1.06.04.1.05.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0013 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar WNI	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01.0002 - Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (Dokumen)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi (Orang)	1.06.05.1.02.0009 - Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (Dokumen)	1.06.05.1.02.0010 - Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota (Orang)	1.06.05.1.02.0011 - Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0012 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
		Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial			Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi) (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.1.01 - Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Badan Usaha)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar (Layanan)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	1.06.02.1.02.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.1.02.0008 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	1.06.02.1.02.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	1.06.02.1.02.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar (Layanan)	1.06.02.1.02.0012 - Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi (Orang)	1.06.02.1.02.0013 - Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	1.06.02.1.02.0014 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Badan Usaha)	1.06.02.1.02.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	
					Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.1.02.0016 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional (Orang)	1.06.02.1.02.0017 - Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan		Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Laporan)	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1.06.07.1.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Laporan)	1.06.07.1.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial			Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar WNI	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01.0002 - Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (Dokumen)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi (Orang)	1.06.05.1.02.0009 - Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (Dokumen)	1.06.05.1.02.0010 - Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota (Orang)	1.06.05.1.02.0011 - Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0012 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.06.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar, yang memiliki kinerja, indikator, target dan pagu indikatif sendiri. Pagu indikatif adalah perkiraan awal anggaran yang di alokasikan untuk suatu kegiatan atau sub kegiatan, yang menjadi podoman dalam penyusunan rencana kerja, rencana subkegiatan dan pendanaan Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANGURUSAN/PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATANOUTPUT	INDIKATOROUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN2024	TARGETDANPAGUINDIKATIFTAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				52.576.760.478,00		54.507.985.158,00		56.244.638.489,00		58.025.437.318,00		59.539.880.855,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				36.628.722.121,00		38.699.703.769,00		39.723.342.793,00		40.770.172.241,00		41.756.488.738,00		
Terpenuhinyakebutuhanpelayanan administrasiperkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	36.628.722.121,00	100	38.699.703.769,00	100	39.723.342.793,00	100	40.770.172.241,00	100	41.756.488.738,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
1.06.01.1.01 - Perencanaan,Penganggaran,danEvaluasiKinerja PerangkatDaerah				25.000.000,00		62.500.000,00		85.250.000,00		108.275.000,00		131.602.500,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
JumlahDokumen	Jumlah Data Statistik SektoralDaerahyangTelahDikumpulkandanDiperiksaLingkupPerangkatDaerah	0	1	-	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
	Jumlah Berita Acara Hasil ForumPerangkat Daerah BerdasarkanBidangUrusanyangDiampudalamRangka Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkatDaerah	0	1	-	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
	JumlahLaporanEvaluasiKinerjaPerangkatDaerah	0	2	-	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
	JumlahDokumenPerencanaanPerangkatDaerah	5	5	25.000.000,00	5	27.500.000,00	5	30.250.000,00	5	33.275.000,00	5	36.602.500,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
	Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraanWalidataPendukungStatistikSektoral Daerah	0	1	-	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
1.06.01.1.01.0001 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangka tDaerah	5	5	25.000.000,00	5	27.500.000,00	5	30.250.000,00	5	33.275.000,00	5	36.602.500,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
1.06.01.1.01.0007-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	2	-	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
1.06.01.1.01.0008 – Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	-	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
1.06.01.1.01.0009-Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000- DINASSOSIAL	
			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	-	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				-		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	-	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30.638.279.721,00		31.170.000.000,00		31.900.000.000,00		32.616.821.267,00		32.647.663.087,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	170	30.638.279.721,00	170	31.170.000.000,00	170	31.900.000.000,00	170	32.616.821.267,00	170	32.647.663.087,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30.638.279.721,00		31.170.000.000,00		31.900.000.000,00		32.616.821.267,00		32.647.663.087,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	170	30.638.279.721,00	170	31.170.000.000,00	170	31.900.000.000,00	170	32.616.821.267,00	170	32.647.663.087,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		255.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		235.421.023,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	-	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1	-	1	250.000.000,00	0	-	10	-	1	223.421.023,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		250.000.000,00		-		-		223.421.023,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1	-	1	250.000.000,00	0	-	10	-	1	223.421.023,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	-	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.280.000.000,00		1.423.000.000,00		1.569.800.000,00		1.730.780.000,00		1.907.358.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	7	300.000.000,00	7	330.000.000,00	7	363.000.000,00	7	399.300.000,00	7	439.230.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	8	20.000.000,00	8	22.000.000,00	8	24.200.000,00	8	26.620.000,00	8	29.282.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42	42	315.000.000,00	42	346.500.000,00	42	381.150.000,00	42	419.265.000,00	42	461.191.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	178	178	145.000.000,00	178	159.500.000,00	178	175.450.000,00	178	192.995.000,00	178	212.294.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19	19	90.000.000,00	19	99.000.000,00	19	108.900.000,00	19	119.790.000,00	19	131.769.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20	20	70.000.000,00	20	77.000.000,00	20	84.700.000,00	20	93.170.000,00	20	102.487.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	32	320.000.000,00	32	352.000.000,00	32	387.200.000,00	32	425.920.000,00	32	468.512.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	10	20.000.000,00	10	22.000.000,00	10	24.200.000,00	10	26.620.000,00	10	29.282.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	-	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	-	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.100.000,00	5	13.310.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				145.000.000,00		159.500.000,00		175.450.000,00		192.995.000,00		212.294.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	178	178	145.000.000,00	178	159.500.000,00	178	175.450.000,00	178	192.995.000,00	178	212.294.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				315.000.000,00		346.500.000,00		381.150.000,00		419.265.000,00		461.191.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42	42	315.000.000,00	42	346.500.000,00	42	381.150.000,00	42	419.265.000,00	42	461.191.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	8	20.000.000,00	8	22.000.000,00	8	24.200.000,00	8	26.620.000,00	8	29.282.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				320.000.000,00		352.000.000,00		387.200.000,00		425.920.000,00		468.512.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	32	320.000.000,00	32	352.000.000,00	32	387.200.000,00	32	425.920.000,00	32	468.512.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				90.000.000,00		99.000.000,00		108.900.000,00		119.790.000,00		131.769.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19	19	90.000.000,00	19	99.000.000,00	19	108.900.000,00	19	119.790.000,00	19	131.769.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	-	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.100.000,00	5	13.310.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20	20	70.000.000,00	20	77.000.000,00	20	84.700.000,00	20	93.170.000,00	20	102.487.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	7	300.000.000,00	7	330.000.000,00	7	363.000.000,00	7	399.300.000,00	7	439.230.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	10	20.000.000,00	10	22.000.000,00	10	24.200.000,00	10	26.620.000,00	10	29.282.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	-	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.000.000,00		709.000.000,00		876.382.089,00		543.844.200,00		1.641.685.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	10	65.000.000,00	10	91.500.000,00	10	300.650.000,00	10	110.715.000,00	10	421.786.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	1	200.000.000,00	0	-	1	300.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	21	135.000.000,00	25	407.500.000,00	20	184.732.089,00	20	219.529.200,00	30	481.939.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	32	50.000.000,00	32	105.000.000,00	32	115.500.000,00	32	127.050.000,00	32	139.755.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	8	50.000.000,00	8	105.000.000,00	8	75.500.000,00	8	86.550.000,00	8	98.205.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		200.000.000,00		-		300.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	1	200.000.000,00	0	-	1	300.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				65.000.000,00		91.500.000,00		300.650.000,00		110.715.000,00		421.786.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	10	65.000.000,00	10	91.500.000,00	10	300.650.000,00	10	110.715.000,00	10	421.786.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				135.000.000,00		407.500.000,00		184.732.089,00		219.529.200,00		481.939.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

			TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN		

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah UnitPeralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	21	135.000.000,00	25	407.500.000,00	20	18 4.732.08 9 ,00	20	219 .529 .200,00	30	48 1.9 39 .000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		200.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah UnitGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		105.000.000,00		115.500.000,00		127.050.000,00		139 .755.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah UnitSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	32	50.000.000,00	32	105.000.000,00	32	115.500.000,00	32	127.050.000,00	32	139 .755.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		105.000.000,00		75.500.000,00		8 6.550.000,00		9 8 .205.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah UnitSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	¦	50.000.000,00	¦	105.000.000,00	¦	75.500.000,00	¦	8 6.550.000,00	¦	9 8 .205.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.29 0.200.000,00		3.564.724.000,00		3.68 9 .28 6.400,00		3.9 8 3.8 15.040,00		4.115.558 .220,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyang Disediakan	72	72	1.054.200.000,00	72	1.134.620.000,00	72	1.216.08 2.000,00	72	1.304.19 0.200,00	72	1.38 0.353.220,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	1	1	6.360.000,00	1	7.500.000,00	1	9 .000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	120.500.000,00	2	131.550.000,00	2	143.205.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	72	2.129 .640.000,00	72	2.312.604.000,00	72	2.343.704.400,00	72	2.538 .074.8 40,00	72	2.58 0.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.08 .0001 - Penyediaan Jasa SuratMenyurat				6.360.000,00		7.500.000,00		9 .000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	1	1	6.360.000,00	1	7.500.000,00	1	9 .000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.08 .0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.054.200.000,00		1.134.620.000,00		1.216.08 2.000,00		1.304.19 0.200,00		1.38 0.353.220,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyang Disediakan	72	72	1.054.200.000,00	72	1.134.620.000,00	72	1.216.08 2.000,00	72	1.304.19 0.200,00	72	1.38 0.353.220,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.08 .0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		110.000.000,00		120.500.000,00		131.550.000,00		143.205.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	120.500.000,00	2	131.550.000,00	2	143.205.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.08 .0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.129 .640.000,00		2.312.604.000,00		2.343.704.400,00		2.538 .074.8 40,00		2.58 0.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	72	2.129 .640.000,00	72	2.312.604.000,00	72	2.343.704.400,00	72	2.538 .074.8 40,00	72	2.58 0.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.09 5.242.400,00		1.505.479 .769 ,00		1.58 4.124.304,00		1.764.536.734,00		1.063.8 9 0.408 ,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dipelihara	20	43	-	10	5.000.000,00	12	5.500.000,00	15	6.050.000,00	15	6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	25.842.400,00	5	30.726.640,00	5	45.199.304,00	5	50.719.234,00	5	61.791.158,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	11	433.000.000,00	11	474.000.000,00	11	510.000.000,00	11	560.000.000,00	11	610.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	45	242.500.000,00	45	266.750.000,00	45	293.425.000,00	45	322.767.500,00	45	355.044.250,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	323.900.000,00	5	659.003.129,00	5	700.000.000,00	5	800.000.000,00	5	5.400.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	10.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09.0001 - Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				433.000.000,00		474.000.000,00		510.000.000,00		560.000.000,00		610.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	11	433.000.000,00	11	474.000.000,00	11	510.000.000,00	11	560.000.000,00	11	610.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09.0002 - Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakkan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan				242.500.000,00		266.750.000,00		293.425.000,00		322.767.500,00		355.044.250,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakkan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	45	242.500.000,00	45	266.750.000,00	45	293.425.000,00	45	322.767.500,00	45	355.044.250,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelyang Dipelihara	20	43	-	10	5.000.000,00	12	5.500.000,00	15	6.050.000,00	15	6.655.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya				323.900.000,00		659.003.129,00		700.000.000,00		800.000.000,00		5.400.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	323.900.000,00	5	659.003.129,00	5	700.000.000,00	5	800.000.000,00	5	5.400.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	10.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	

			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN			

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.1.09 .0011 - Pem elih araan/Reh abilitasiSarana d an Prasarana Pend ukung G ed ung Kantor atau Bang unan Lainnya				25.8 42.400,00		30.726.640,00		45.19 9 .304,00		50.719 .234,00		61.79 1.158 ,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem elih araan/Reh abilitasiSarana d an Prasarana Pend ukung G ed ung Kantor atau Bang unan Lainnya	Jum lah Sarana d an Prasarana Pend ukung G ed ung Kantor atau Bang unan Lainnya yang Dip elih ara/Direh abilitasi	5	5	25.8 42.400,00	5	30.726.640,00	5	45.19 9 .304,00	5	50.719 .234,00	5	61.79 1.158 ,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02 - PROG RAM PEMBERDAY AAN SOSIAL				325.000.000,00		323.015.8 23,00		333.138 .730,00		343.566.242,00		351.143.037,00		
Mening katnya p em berd ayaan sosial	Persentase Lem bag a d ibid ang kesejah teraan sosialyang m ening katkualitasnya d alam p elayanan sosial	0	0	325.000.000,00	0	323.015.8 23,00	0	333.138 .730,00	0	343.566.242,00	0	351.143.037,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Persentase SDM Kesejah teraan Sosialyang m ening kat kom p etensinya d alam p elayanan sosial	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Persentase p ekerja sosial/tenag a kesejah teraan sosialyang m elaksanakan p elayanan sosiald i d alam p antireh abilitasi, p anti reh abilitasiPPKS lainnya d iluar H IV/AIDS d an NAPZ A	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Persentase p ekerja sosial/tenag a kesejah teraan sosiald an/atau relaw an sosialyang m elaksanakan p enang anan korban bencana p rovinsip ad a m asa tang g ap d arurat d an p asca bencana sesuaistand ar	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.01 - Penerbitan Iz in Peng um p ulan Sum bang an Lintas Daerah Kabup aten/Kota d alam 1 (Satu)Daerah Provinsi				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Penyeleng g araan PUB d an UG B yang d ilaksanakan sesuaistand ar	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an SinkronisasiPenyeleng g araan Und ian G ratis Berh ad iah d an Peng um p ulan Uang atau Barang	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.01.0003 - Koord inasid an Sinkronisasi Penyeleng g araan Und ian G ratis Berh ad iah d an Peng um p ulan Uang atau Barang				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Koord inasid an SinkronisasiPenyeleng g araan Und ian G ratis Berh ad iah d an Peng um p ulan Uang atau Barang	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an SinkronisasiPenyeleng g araan Und ian G ratis Berh ad iah d an Peng um p ulan Uang atau Barang	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02 - Pem berd ayaan Potensi Sum ber Kesejah teraan SosialProvinsi				300.000.000,00		29 3.015.8 23,00		29 8 .138 .730,00		303.566.242,00		306.143.037,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
PSKS yang m end ap atkan p em berd ayaan sosial	Jum lah Bad an Usah a yang Melaksanakan Tang g ung Jaw ab Sosiald an Ling kung an	0	0	-	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah W arakaw uri/Keluarg a Pah law an, Perintis Kem erd ekaan, d an Jand a Dud a Perintis Kem erd ekaan yang m em p eroleh p eng h arg aan d an santunan sosial	0	0	-	350	30.000.000,00	350	35.000.000,00	350	40.000.000,00	350	45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Sum ber Daya Manusia Kesejah teraan SosialDaerah Provinsiyang d iusulkan Mend ap at Sertifikasi	0	0	-	20	5.015.8 23,00	20	8 .138 .730,00	20	8 .566.242,00	20	9 .143.037,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jum lah Puskesos Kabup aten/Kota yang Mem berikan Layanan Sosial Satu Pintu d an Berp eran sebag ai H ub Prog ram G rad uasi	0	0	-	100	38 .000.000,00	100	20.000.000,00	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah PotensiSum ber Kesejah teraan SosialDaerah yang Mend ap atkan Pem berd ayaan Ekonom i	0	0	-	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	1.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Penyuluh Sosial, Penyuluh SosialMasyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja SosialMasyarakatd an/atau Tenag a Kesejah teraan Sosial Kecam atan yang Mening kat Kap asitasnya	100	150	100.000.000,00	150	30.000.000,00	150	35.000.000,00	150	40.000.000,00	150	45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Meng ikutid an Mend ap atkan Peng enalan, Penanam an, d an Peng h ayatan Nilai-NilaiKep ah law anan, Kep erintisan, Kesetiakaw anan d an RestorasiSosial	0	0	-	20	30.000.000,00	20	35.000.000,00	20	40.000.000,00	20	45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Diusulkan sebag aiCalon Pah law an Nasional	0	0	-	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Lem bag a Kesejah teraan Sosialyang Mening kat Kap asitasnya Kew enang an Provinsi	172	172	100.000.000,00	172	30.000.000,00	172	30.000.000,00	172	30.000.000,00	172	30.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Keluarg a yang Mening kat Kap asitasnya Kew enang an Provinsi	50	50	100.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	50.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Kabup aten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terp ad u Kesejah teraan SosialSesuai Stand ar	0	0	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0003 - Pening katan Kem am p uan PotensiSum ber Kesejah teraan SosialKeluarg a Kew enang an Provinsi				100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Mening katnya Kap asitas Keluarg a Kew enang an Provinsi	Jum lah Keluarg a yang Mening kat Kap asitasnya Kew enang an Provinsi	50	50	100.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	50.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0004 - Pening katan Kem am p uan PotensiSum ber Kesejah teraan SosialKelem bag aan MasyarakatKew enang an Provinsi				100.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Mening katnya Kap asitas Lem bag a Kesejah teraan SosialKew enang an Provinsi	Jum lah Lem bag a Kesejah teraan Sosialyang Mening kat Kap asitasnya Kew enang an Provinsi	172	172	100.000.000,00	172	30.000.000,00	172	30.000.000,00	172	30.000.000,00	172	30.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0008 - Pening katan Kem am p uan PotensiSum ber Kesejah teraan SosialPerseorang an Kew enang an Provinsi				100.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Mening katnya Kap asitas PotensiSum ber Kesejah teraan SosialPerseorang an Kew enang an Provinsi	Jum lah Penyuluh Sosial, Penyuluh SosialMasyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja SosialMasyarakatd an/atau Tenag a Kesejah teraan Sosial Kecam atan yang Mening kat Kap asitasnya	100	150	100.000.000,00	150	30.000.000,00	150	35.000.000,00	150	40.000.000,00	150	45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0010 - FasilitasiPem berian Peng h arg aan d an Santunan Sosialbag i W arakaw uri/Keluarg a Pah law an Nasional, Perintis Kem erd ekaan, d an Jand a Dud a Perintis Kem erd ekaan				-		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberian pengharagaan dan santunan sosialbagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Jandaa Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Jandaa Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh pengharagaan dan santunan sosial	0	0	-	350	30.000.000,00	350	35.000.000,00	350	40.000.000,00	350	45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Pengayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan RestorasiSosial				-		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Pengayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan RestorasiSosial	Jumlah Orang yang Mengikutidan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Pengayatan Nilai-NilaiKepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan RestorasiSosial	0	0	-	20	30.000.000,00	20	35.000.000,00	20	40.000.000,00	20	45.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0012 - Pembinaan KoordinasiLayanan Terpadu Kesejahteraan SosialKabupaten/Kota				-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan SosialSesuai Standar	0	0	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0013 - Koordinasi Pengusulan SertifikasiSumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan SosialDaerah Provinsi				-		5.015.823,00		8.138.730,00		8.566.242,00		9.143.037,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Usulan Sertifikasibagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan SosialDaerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan SosialDaerah Provinsiyang diusulkan Mendapat Sertifikasi	0	0	-	20	5.015.823,00	20	8.138.730,00	20	8.566.242,00	20	9.143.037,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0014 - Fasilitasi Pengembangan PotensiSumber Kesejahteraan SosialDaerah melalui Pemberdayaan Ekonomi				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		1.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi iPotensiSumber Kesejahteraan SosialDaerah	Jumlah PotensiSumber Kesejahteraan SosialDaerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	0	0	-	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	1.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0015 - Koordinasi dan SinkronisasiBadan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiBadan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan	0	0	-	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	20.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0016 - Fasilitasi Pembangan PusatKesejahteraan Sosial(Puskesos)Lintas Kabupaten/Kota				-		38.000.000,00		20.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Meningkatnya Peran Puskesos sebagai Layanan SosialSatu Pintu dan Hub Program Grasi	Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Grasi	0	0	-	100	38.000.000,00	100	20.000.000,00	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.1.02.0017 - Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional				-		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagaiCalon Pahlawan Nasional	0	0	-	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				500.000.000,00		49 5.59 0.717,00		518 .08 6.066,00		541.258 .315,00		558 .09 5.637,00		

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Mening katnya layanan p enang anan w arg a neg ara m ig ran korban tind ak kekerasan	Persentase Penang anan Pem ulang an W arg a Neg ara Im ig ran, Orang Terlantar, Korban Tind akKekerasan	0	0	500.000.000,00	0	49 5.59 0.717,00	0	518 .08 6.066,00	0	541.258 .315,00	0	558 .09 5.637,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Persentase W arg a Neg ara Mig ran Korban Tind akKekerasan yang Tertang ani	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.03.1.01 - Pem ulang an W arg a Neg ara Mig ran Korban Tind ak Kekerasan d ariTitikDebarkasid iDaerah ProvinsiuntukDip ulang kan ke Daerah Kabup aten/Kota Asal				500.000.000,00		49 5.59 0.717,00		518 .08 6.066,00		541.258 .315,00		558 .09 5.637,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Orang terlantar yang d ip ulang kan	Jum lah W arg a Neg ara Mig ran Korban Tind akKekerasan Dalam d an Luar Neg eri yang Dip ulang kan d ariTitikDebarkasid iDaerah ProvinsiuntukDip ulang kan ke Daerah Kabup aten/Kota	500	600	500.000.000,00	600	49 5.59 0.717,00	600	518 .08 6.066,00	600	541.258 .315,00	600	558 .09 5.637,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.03.1.01.0003 - Fasilitasi Pem ulang an W arg a Neg ara Mig ran Korban Tind akKekerasan Dalam d an Luar Neg erid ariTitikDebarkasid i Daerah ProvinsiuntukDip ulang kan ke Daerah Kabup aten/Kota Asal				500.000.000,00		49 5.59 0.717,00		518 .08 6.066,00		541.258 .315,00		558 .09 5.637,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya FasilitasiPem ulang an W arg a Neg ara Mig ran Korban Tind ak Kekerasan Dalam d an Luar Neg erid ari TitikDebarkasid iDaerah Provinsiuntuk Dip ulang kan ke Daerah Kabup aten/Kota	Jum lah W arg a Neg ara Mig ran Korban Tind akKekerasan Dalam d an Luar Neg eri yang Dip ulang kan d ariTitikDebarkasid iDaerah ProvinsiuntukDip ulang kan ke Daerah Kabup aten/Kota	500	600	500.000.000,00	600	49 5.59 0.717,00	600	518 .08 6.066,00	600	541.258 .315,00	600	558 .09 5.637,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04 - PROG RAM REH ABILITASI SOSIAL				12.29 3.18 8 .357,00		12.18 4.78 0.067,00		12.737.8 59 .19 2,00		13.307.08 0.8 34,00		13.715.49 9 .568 ,00		
Mening katnya reh abilitasisosial	Ind eks Kesejah teraan Sosial Penyand ang Disabilitas	0	0	12.29 3.18 8 .357,00	0	12.18 4.78 0.067,00	0	12.737.8 59 .19 2,00	0	13.307.08 0.8 34,00	0	13.715.49 9 .568 ,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Ind eks Kesejah teraan SosialLanjut Usia	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Ind eks Peranan Sosial	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Penyand ang Disabilitas, Anakterlantar, LanjutUsia, G eland ang Peng em is, PPKS lainnya d iluar H IV/AIDS d an NAPZ A yang terp enuh ikebutuh an d asamya	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01 - Reh abilitasiSosialDasar Penyand ang Disabilitas TerlAntar d i d alam Panti				4.741.633.042,00		4.741.633.042,00		4.9 72.571.609 ,00		5.161.019 .100,00		5.300.8 15.020,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Reh abilitasiSosialDasar Disabilitas Terlantar	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	90	90	39 0.000.000,00	90	39 0.000.000,00	90	400.000.000,00	90	410.000.000,00	90	420.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an FasilitasiReh abilitasiSosial Dasar Penyand ang Disabilitas Terlantar	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	71.500.000,00	1	78 .650.000,00	1	8 3.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	90	90	25.050.000,00	90	25.050.000,00	90	27.555.000,00	90	30.310.500,00	90	33.341.550,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan AlatBantu d an AlatBantu Perag a SesuaiKebutuh an Kew enang an Provinsi	90	90	100.500.000,00	90	100.500.000,00	90	110.550.000,00	90	121.605.000,00	90	133.765.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	90	90	70.000.000,00	90	70.000.000,00	90	77.000.000,00	90	8 4.700.000,00	90	9 1.08 5.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi	90	90	70.000.000,00	90	70.000.000,00	90	77.000.000,00	90	8 4.700.000,00	90	9 0.08 5.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Kew enang an Provinsi	90	90	250.000.000,00	90	250.000.000,00	90	275.000.000,00	90	29 6.500.000,00	90	305.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan Sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	90	90	2.8 04.9 23.042,00	90	2.8 04.9 23.042,00	90	2.8 9 1.19 0.609 ,00	90	2.9 8 0.000.000,00	90	3.035.754.010,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terakses Asram a LayakH uniKew enang an Provinsi	90	90	300.000.000,00	90	300.000.000,00	90	320.000.000,00	90	330.000.000,00	90	340.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terp enuh i Kebutuh an Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan bag iPenyand ang Disabilitas Kew enang an Provinsi	90	90	16.160.000,00	90	16.160.000,00	90	17.776.000,00	90	19 .553.600,00	90	21.508 .9 60,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	90	90	350.000.000,00	90	350.000.000,00	90	38 5.000.000,00	90	39 5.000.000,00	90	407.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	90	90	300.000.000,00	90	300.000.000,00	90	320.000.000,00	90	330.000.000,00	90	340.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0001 - Penyed iaan Perm akanan				2.8 04.9 23.042,00		2.8 04.9 23.042,00		2.8 9 1.19 0.609 ,00		2.9 8 0.000.000,00		3.035.754.010,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan Per Orang Sesuaid eng an Stand ar G iz i Minim alKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan Sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	90	90	2.8 04.9 23.042,00	90	2.8 04.9 23.042,00	90	2.8 9 1.19 0.609 ,00	90	2.9 8 0.000.000,00	90	3.035.754.010,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0002 - Penyed iaan Sand ang				39 0.000.000,00		39 0.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		420.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an Lainnya d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	90	90	39 0.000.000,00	90	39 0.000.000,00	90	400.000.000,00	90	410.000.000,00	90	420.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0003 - Penyed iaan Asram a yang Mud ah Diakses				300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Orang yang Terakses Asram a Layak H uniKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Terakses Asram a LayakH uniKew enang an Provinsi	90	90	300.000.000,00	90	300.000.000,00	90	320.000.000,00	90	330.000.000,00	90	340.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0004 - Penyed iaan Alat Bantu				100.500.000,00		100.500.000,00		110.550.000,00		121.605.000,00		133.765.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan AlatBantu d an AlatBantu Perag a Sesuai Kebutuh an Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan AlatBantu d an AlatBantu Perag a SesuaiKebutuh an Kew enang an Provinsi	90	90	100.500.000,00	90	100.500.000,00	90	110.550.000,00	90	121.605.000,00	90	133.765.500,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0005 - Penyed iaan Perbekalan Keseh atan d id alam Panti				250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		29 6.500.000,00		305.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Keseha tan di dalam PantiKewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	90	90	250.000.000,00	90	250.000.000,00	90	275.000.000,00	90	296.500.000,00	90	305.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritualan Sosial				300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritualan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritualan Sosial Kewenangan Provinsi	90	90	300.000.000,00	90	300.000.000,00	90	320.000.000,00	90	330.000.000,00	90	340.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				350.000.000,00		350.000.000,00		385.000.000,00		395.000.000,00		407.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-HariKewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-HariKewenangan Provinsi	90	90	350.000.000,00	90	350.000.000,00	90	385.000.000,00	90	395.000.000,00	90	407.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Keseha tan Dasar				25.050.000,00		25.050.000,00		27.555.000,00		30.310.500,00		33.341.550,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Keseha tan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Keseha tan Dasar Kewenangan Provinsi	90	90	25.050.000,00	90	25.050.000,00	90	27.555.000,00	90	30.310.500,00	90	33.341.550,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				70.000.000,00		70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		91.085.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	90	90	70.000.000,00	90	70.000.000,00	90	77.000.000,00	90	84.700.000,00	90	91.085.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0011 - Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga				70.000.000,00		70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		90.085.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan ReunifikasiKeluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan ReunifikasiKeluarga Kewenangan Provinsi	90	90	70.000.000,00	90	70.000.000,00	90	77.000.000,00	90	84.700.000,00	90	90.085.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0017 - FasilitasiPembuatan Dokumen Kependuduk an bagi Penyandang Disabilitas				16.160.000,00		16.160.000,00		17.776.000,00		19.553.600,00		21.508.960,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya Orang yang Memb utuhkan Pembuatan Dokumen Kependuduk an bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependuduk an bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	90	90	16.160.000,00	90	16.160.000,00	90	17.776.000,00	90	19.553.600,00	90	21.508.960,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Bidang Rehabilitasi SosialDasar Penyandang Disabilitas Terlantar				65.000.000,00		65.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		83.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Bidang Rehabilitasi SosialDasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	71.500.000,00	1	78.650.000,00	1	83.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02 - Rehabilitasi SosialDasar AnakTerlantar di dalam Panti				2.391.100.000,00		2.391.100.000,00		2.429.434.000,00		2.558.577.400,00		2.602.614.290,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Rehabilitasi SosialDasar AnakTerlantar	Jumlah Anakyang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	50	50	125.000.000,00	50	125.000.000,00	50	128.000.000,00	50	130.000.000,00	50	135.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	1	1	21.210.000,00	1	21.210.000,00	1	23.331.000,00	1	25.664.100,00	1	28.230.510,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	50	50	7.070.000,00	50	7.070.000,00	50	7.777.000,00	50	8.554.700,00	50	9.410.170,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	50	50	25.250.000,00	50	25.250.000,00	50	27.775.000,00	50	30.552.500,00	50	33.607.750,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	50	50	122.210.000,00	50	122.210.000,00	50	125.000.000,00	50	130.000.000,00	50	132.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Kew enang an Provinsi	50	50	8 2.8 20.000,00	50	8 2.8 20.000,00	50	8 5.000.000,00	50	9 3.500.000,00	50	9 4.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	50	50	1.050.000.000,00	50	1.050.000.000,00	50	1.055.000.000,00	50	1.120.000.000,00	50	1.130.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	50	50	236.340.000,00	50	236.340.000,00	50	240.000.000,00	50	245.000.000,00	50	250.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terakses Asram a LayakH uniKew enang an Provinsi	50	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	155.000.000,00	50	160.000.000,00	50	162.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terp enuh i Kebutuh an Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iAnakTerlantar Kew enang an Provinsi	50	50	6.060.000,00	50	6.060.000,00	50	6.666.000,00	50	7.332.600,00	50	8 .065.8 60,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi	50	50	35.350.000,00	50	35.350.000,00	50	38 .8 8 5.000,00	50	42.773.500,00	50	44.300.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	50	50	79 .79 0.000,00	50	79 .79 0.000,00	50	8 2.000.000,00	50	9 0.200.000,00	50	9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	50	50	450.000.000,00	50	450.000.000,00	50	455.000.000,00	50	475.000.000,00	50	48 0.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0001 - Peng asuh an				125.000.000,00		125.000.000,00		128 .000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Peng asuh an Kew enang an Provinsi	Jum lah Anakyang Mend ap atkan Layanan Peng asuh an Kew enang an Provinsi	50	50	125.000.000,00	50	125.000.000,00	50	128 .000.000,00	50	130.000.000,00	50	135.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0003 - Penyed iaan Sand ang				236.340.000,00		236.340.000,00		240.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an Lainnya d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	50	50	236.340.000,00	50	236.340.000,00	50	240.000.000,00	50	245.000.000,00	50	250.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0004 - Penyed iaan Asram a yang Mud ah Diakses				150.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		162.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Orang yang Terakses Asram a Layak H uniKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Terakses Asram a LayakH uniKew enang an Provinsi	50	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	155.000.000,00	50	160.000.000,00	50	162.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0005 - Penyed iaan Perbekalan Keseh atan d id alam Panti				8 2.8 20.000,00		8 2.8 20.000,00		8 5.000.000,00		9 3.500.000,00		9 4.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d i d alam PantiKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Kew enang an Provinsi	50	50	8 2.8 20.000,00	50	8 2.8 20.000,00	50	8 5.000.000,00	50	9 3.500.000,00	50	9 4.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.04.1.02.0006 - Pem berian Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial				79 .79 0.000,00		79 .79 0.000,00		8 2.000.000,00		9 0.200.000,00		9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	50	50	79 .79 0.000,00	50	79 .79 0.000,00	50	8 2.000.000,00	50	9 0.200.000,00	50	9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0007 - Pem berian Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ari				122.210.000,00		122.210.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		132.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	50	50	122.210.000,00	50	122.210.000,00	50	125.000.000,00	50	130.000.000,00	50	132.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar				450.000.000,00		450.000.000,00		455.000.000,00		475.000.000,00		48 0.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	50	50	450.000.000,00	50	450.000.000,00	50	455.000.000,00	50	475.000.000,00	50	48 0.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0010 - Pem berian Pelayanan Penelusuran Keluarg a				25.250.000,00		25.250.000,00		27.775.000,00		30.552.500,00		33.607.750,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	50	50	25.250.000,00	50	25.250.000,00	50	27.775.000,00	50	30.552.500,00	50	33.607.750,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0011 - Pem berian Pelayanan ReunifikasiKeluarg a				35.350.000,00		35.350.000,00		38 .8 8 5.000,00		42.773.500,00		44.300.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi	50	50	35.350.000,00	50	35.350.000,00	50	38 .8 8 5.000,00	50	42.773.500,00	50	44.300.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0015 - Penyed iaan Perm akanan				1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.055.000.000,00		1.120.000.000,00		1.130.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan p er Orang Sesuaid eng an Stand ar G iz i Minim alKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	50	50	1.050.000.000,00	50	1.050.000.000,00	50	1.055.000.000,00	50	1.120.000.000,00	50	1.130.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0017 - Koord inasi, Sinkronisasid an Pem binaan Pelaksanaan Reh abilitasiSosialDasar AnakTerlantar d id alam Panti				21.210.000,00		21.210.000,00		23.331.000,00		25.664.100,00		28 .230.510,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Koord inasid an SinkronisasiPem binaan Pelaksanaan Reh abilitasiSosialDasar AnakTerlantar d id alam PantiKew enang an Provinsi	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an Pem binaan Reh abilitasiSosial Dasar AnakTerlantar d id alam Panti	1	1	21.210.000,00	1	21.210.000,00	1	23.331.000,00	1	25.664.100,00	1	28 .230.510,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0022 - FasilitasiPem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iAnak Terlantar				6.060.000,00		6.060.000,00		6.666.000,00		7.332.600,00		8 .065.8 60,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mem butuh kan Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iAnakTerlantar Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Terp enuh i Kebutuh an Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iAnakTerlantar Kew enang an Provinsi	50	50	6.060.000,00	50	6.060.000,00	50	6.666.000,00	50	7.332.600,00	50	8 .065.8 60,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan Peng asuh an kep ad a Keluarg a Peng g anti				7.070.000,00		7.070.000,00		7.777.000,00		8 .554.700,00		9 .410.170,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersed ianya Akses Layanan Peng asuh an kep ad a Keluarg a Peng g anti Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang Mend ap atkan Peng asuh an Keluarg a Peng g anti Kew enang an Provinsi	50	50	7.070.000,00	50	7.070.000,00	50	7.777.000,00	50	8 .554.700,00	50	9 .410.170,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03 - Reh abilitasiSosialDasar LanjutUsia Terlantar d id alam Panti				3.160.459 .000,00		3.160.459 .000,00		3.29 9 .004.9 00,00		3.413.9 52.79 9 ,00		3.551.570.569 ,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Reh abilitasiSosialDasar LanjutUsiaTerlantar	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	73	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.204.447.409 ,00	100	2.270.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an FasilitasiReh abilitasiSosial Dasar LanjutUsia Terlantar Kew enang an Provinsi	1	1	21.630.000,00	1	21.630.000,00	1	23.79 3.000,00	1	26.172.300,00	1	27.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	73	100	21.630.000,00	100	21.630.000,00	100	23.79 3.000,00	100	26.172.300,00	100	27.8 00.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan AlatBantu d an AlatBantu Perag a SesuaiKebutuh an Kew enang an Provinsi	73	100	49 .440.000,00	100	49 .440.000,00	100	54.38 4.000,00	100	59 .8 22.400,00	100	65.8 04.640,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	73	100	19 0.000.000,00	100	19 0.000.000,00	100	209 .000.000,00	100	212.000.000,00	100	233.200.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	73	100	9 0.000.000,00	100	9 0.000.000,00	100	9 9 .000.000,00	100	108 .9 00.000,00	100	110.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Pem ulasaraan Kew enang an Provinsi	73	100	30.9 00.000,00	100	30.9 00.000,00	100	33.9 9 0.000,00	100	37.38 9 .000,00	100	39 .500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terp enuh i Kebutuh an Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan bag iLanjutUsia Terlantar Kew enang an Provinsi	73	100	5.459 .000,00	100	5.459 .000,00	100	6.004.9 00,00	100	6.605.39 0,00	100	7.265.9 29 ,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terakses Asram a LayakH uniKew enang an Provinsi	73	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	170.000.000,00	100	178 .000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	73	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	100	28 5.000.000,00	100	300.000.000,00	100	310.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Kew enang an Provinsi	73	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	170.000.000,00	100	18 7.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi	73	100	38 .200.000,00	100	38 .200.000,00	100	42.020.000,00	100	46.222.000,00	100	47.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	73	100	38 .200.000,00	100	38 .200.000,00	100	42.020.000,00	100	46.222.000,00	100	48 .000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0001 - Penyed iaan Perm akanan				2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.150.000.000,00		2.204.447.409 ,00		2.270.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan p er Orang Sesuaid eng an Stand ar G iz i Minim alKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	73	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.204.447.409 ,00	100	2.270.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0002 - Penyed iaan Sand ang				275.000.000,00		275.000.000,00		28 5.000.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an Lainnya d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	73	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	100	28 5.000.000,00	100	300.000.000,00	100	310.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.03.0003 - Penyed iaan Asram a yang Mud ah Diakses				150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		178 .000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Orang yang Terakses Asram a Layak H uniKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Terakses Asram a LayakH uniKew enang an Provinsi	73	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	170.000.000,00	100	178 .000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0004 - Penyed iaan Alat Bantu				49 .440.000,00		49 .440.000,00		54.38 4.000,00		59 .8 22.400,00		65.8 04.640,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan AlatBantu d an AlatBantu Perag a Sesuai Kebutuh an Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan AlatBantu d an AlatBantu Perag a SesuaiKebutuh an Kew enang an Provinsi	73	100	49 .440.000,00	100	49 .440.000,00	100	54.38 4.000,00	100	59 .8 22.400,00	100	65.8 04.640,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0005 - Penyed iaan Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Sosial				150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		18 7.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan kebutuh an Perbekalan Keseh atan d i d alam PantiKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Kew enang an Provinsi	73	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	170.000.000,00	100	18 7.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0006 - Pem berian Bim bing an Fisik, Mental, Sp rituald an Sosial				19 0.000.000,00		19 0.000.000,00		209 .000.000,00		212.000.000,00		233.200.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial	Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	73	100	19 0.000.000,00	100	19 0.000.000,00	100	209 .000.000,00	100	212.000.000,00	100	233.200.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0007 - Pem berian Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ari				9 0.000.000,00		9 0.000.000,00		9 9 .000.000,00		108 .9 00.000,00		110.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	73	100	9 0.000.000,00	100	9 0.000.000,00	100	9 9 .000.000,00	100	108 .9 00.000,00	100	110.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0010 - Pem berian Pelayanan Penelusuran Keluarg a				38 .200.000,00		38 .200.000,00		42.020.000,00		46.222.000,00		48 .000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	73	100	38 .200.000,00	100	38 .200.000,00	100	42.020.000,00	100	46.222.000,00	100	48 .000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0011 - Pem berian Pelayanan ReunifikasiKeluarg a				38 .200.000,00		38 .200.000,00		42.020.000,00		46.222.000,00		47.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi	73	100	38 .200.000,00	100	38 .200.000,00	100	42.020.000,00	100	46.222.000,00	100	47.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0012 - Pem ulasaraan				30.9 00.000,00		30.9 00.000,00		33.9 9 0.000,00		37.38 9 .000,00		39 .500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem ulasaraan Kew enang an Provinsi	Jum lah Pem ulasaraan Kew enang an Provinsi	73	100	30.9 00.000,00	100	30.9 00.000,00	100	33.9 9 0.000,00	100	37.38 9 .000,00	100	39 .500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0015 - FasilitasiPem buatan Dokum en Kep end ud ukan bag iLanjut Usia Terlantar				5.459 .000,00		5.459 .000,00		6.004.9 00,00		6.605.39 0,00		7.265.9 29 ,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mem butuh kan Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan bag iLanjutUsia Terlantar Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Terp enuh i Kebutuh an Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan bag iLanjutUsia Terlantar Kew enang an Provinsi	73	100	5.459 .000,00	100	5.459 .000,00	100	6.004.9 00,00	100	6.605.39 0,00	100	7.265.9 29 ,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Keseh atan Dasar				21.630.000,00		21.630.000,00		23.79 3.000,00		26.172.300,00		27.8 00.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	73	100	21.630.000,00	100	21.630.000,00	100	23.79 3.000,00	100	26.172.300,00	100	27.8 00.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.04.1.03.0017 - Koord inasi, Sinkronisasid an Pem binaan Pelaksanaan Reh abilitasiSosialLanjut Usia Terlantar d id alam Panti				21.630.000,00		21.630.000,00		23.79 3.000,00		26.172.300,00		27.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Koord inasi, Sinkronisasi d an Pem binaan Pelaksanaan Reh abilitasiSosialDasar LanjutUsia Terlantar d id alam PantiKew enang an Provinsi	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an FasilitasiReh abilitasiSosial Dasar LanjutUsia Terlantar Kew enang an Provinsi	1	1	21.630.000,00	1	21.630.000,00	1	23.79 3.000,00	1	26.172.300,00	1	27.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04 - Reh abilitasiSosialDasar G eland ang an d an Peng em is d id alam Panti				673.332.725,00		621.562.451,00		661.609 .722,00		712.470.69 3,00		742.657.763,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Reh abilitasiSosialDasar G eland ang an d an Peng em is	Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	30	60	75.000.000,00	60	75.000.000,00	60	78 .000.000,00	60	8 5.8 00.000,00	60	9 0.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an Pem binaan Reh abilitasiSosial Dasar G eland ang an d an Peng em is d id alam Panti	1	1	30.533.702,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah G eland ang an d an Peng em is/Keluarg a yang Dip ulang kan ke Daerah asal Kew enang an Provinsi	30	60	50.000.000,00	60	30.000.000,00	60	33.000.000,00	60	36.300.000,00	60	37.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Diberikan Bim bing an Keteram p ilan Dasar Kew enang an Provinsi	30	60	75.000.000,00	60	75.000.000,00	60	8 0.000.000,00	60	8 8 .000.000,00	60	9 0.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	30	60	6.106.740,00	60	6.106.740,00	60	6.717.414,00	60	7.38 9 .155,00	60	8 .128 .071,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan p em enuh an kebutuh an Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Kew enang an Provinsi	30	60	35.174.8 25,00	60	35.174.8 25,00	60	38 .69 2.308 ,00	60	42.561.538 ,00	60	46.8 17.69 2,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan Sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	30	60	175.000.000,00	60	175.000.000,00	60	18 3.000.000,00	60	19 0.000.000,00	60	19 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	30	60	73.28 0.8 8 6,00	60	73.28 0.8 8 6,00	60	75.000.000,00	60	8 2.500.000,00	60	8 9 .000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terakses Asram a/W ism a LayakH uni Kew enang an Provinsi	30	60	125.000.000,00	60	100.000.000,00	60	110.000.000,00	60	117.000.000,00	60	117.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terp enuh i Kebutuh an Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iG eland ang an d an Peng em is Kew enang an Provinsi	30	60	3.236.572,00	60	2.000.000,00	60	2.200.000,00	60	2.420.000,00	100	2.662.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	30	60	25.000.000,00	60	25.000.000,00	60	27.500.000,00	60	30.250.000,00	60	33.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0001 - Penyed iaan Perm akanan				175.000.000,00		175.000.000,00		18 3.000.000,00		19 0.000.000,00		19 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Perorang Sesuaidengan Standar Giz iMinimalKewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuaidengan Standar Giz iMinimalKewenangan Provinsi	30	60	175.000.000,00	60	175.000.000,00	60	183.000.000,00	60	190.000.000,00	60	195.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan Sandang				73.288.886,00		73.288.886,00		75.000.000,00		82.500.000,00		89.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30	60	73.288.886,00	60	73.288.886,00	60	75.000.000,00	60	82.500.000,00	60	89.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				125.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		117.000.000,00		117.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Orang yang Terakses Asrama/Wisma LayakHuniKewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma LayakHuni Kewenangan Provinsi	30	60	125.000.000,00	60	100.000.000,00	60	110.000.000,00	60	117.000.000,00	60	117.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan did alam Panti				35.174.825,00		35.174.825,00		38.692.308,00		42.561.538,00		46.817.692,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam PantiKewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan did alam Panti Kewenangan Provinsi	30	60	35.174.825,00	60	35.174.825,00	60	38.692.308,00	60	42.561.538,00	60	46.817.692,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritualdan Sosial				75.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		85.800.000,00		90.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritualdan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritualdan Sosial Kewenangan Provinsi	30	60	75.000.000,00	60	75.000.000,00	60	78.000.000,00	60	85.800.000,00	60	90.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				25.000.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-HariKewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-HariKewenangan Provinsi	30	60	25.000.000,00	60	25.000.000,00	60	27.500.000,00	60	30.250.000,00	60	33.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		88.000.000,00		90.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30	60	75.000.000,00	60	75.000.000,00	60	80.000.000,00	60	88.000.000,00	60	90.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.106.740,00		6.106.740,00		6.717.414,00		7.389.155,00		8.128.071,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	30	60	6.106.740,00	60	6.106.740,00	60	6.717.414,00	60	7.389.155,00	60	8.128.071,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal				50.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		37.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah AsalKewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	30	60	50.000.000,00	60	30.000.000,00	60	33.000.000,00	60	36.300.000,00	60	37.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi, Sinkronisasidan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi SosialDasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				30.533.702,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi SosialDasar Gelandangan dan Pengemis did alam Panti	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis did alam Panti	1	1	30.533.702,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.04.1.04.0013 - FasilitasiPem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag i G eland ang an d an Peng em is				3.236.572,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
TTerp enuh inya Orang yang Mem butuh kan Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iG eland ang an d an Peng em is Kew enang an	Jum lah Orang yang Terp enuh i Kebutuh an Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iG eland ang an d an Peng em is Kew enang an Provinsi	30	60	3.236.572,00	60	2.000.000,00	60	2.200.000,00	60	2.420.000,00	100	2.662.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.04.0015 - Pem berian Pelayanan ReunifikasiKeluarg a				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Kew enang an Provinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05 - Reh abilitasiSosialbag i Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS)Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A d id alam Panti				1.326.663.59 0,00		1.270.025.574,00		1.375.238 .9 61,00		1.461.060.8 42,00		1.517.8 41.9 26,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Reh abilitasiSosialDasar PMKS lainnya	Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	8 2.500.000,00	100	9 0.750.000,00	100	9 2.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	100	100	268 .104.8 38 ,00	100	240.262.8 8 2,00	100	252.500.000,00	100	265.750.000,00	100	275.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an Pem binaan Reh abilitasiSosial Dasar Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A	3	3	47.48 4.641,00	3	45.250.000,00	3	49 .775.000,00	3	54.752.500,00	3	60.227.750,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Diberikan Bim bing an Keteram p ilan Dasar Kew enang an Provinsi	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	8 2.500.000,00	100	9 0.750.000,00	100	9 4.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mem butuh kan Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iPenyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial (PMKS)Lainnya d iLuar H IV/AIDS Kew enang an Provinsi	100	100	5.353.000,00	100	5.353.000,00	100	5.8 8 8 .300,00	100	6.477.130,00	100	7.124.8 43,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	100	100	10.100.000,00	100	10.100.000,00	100	11.110.000,00	100	12.221.000,00	100	13.443.100,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Kew enang an Provinsi	100	100	6.9 46.368 ,00	100	6.9 46.368 ,00	100	7.641.005,00	100	8 .405.105,00	100	9 .245.616,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan Sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	4000	4000	334.069 .9 30,00	4000	314.069 .9 30,00	4000	332.476.9 23,00	4000	345.000.000,00	4000	350.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	100	100	133.103.39 4,00	100	133.103.39 4,00	100	146.413.733,00	100	155.055.107,00	100	164.060.617,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Terakses Asram a/W ism a LayakH uni Kew enang an Provinsi	100	100	19 4.9 40.000,00	100	19 4.9 40.000,00	100	214.434.000,00	100	228 .500.000,00	100	235.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jum lah Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	0	100	-	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) Lainnya d iLuar H IV/AIDS Kew enang an Provinsiyang Dip ulang kan ke Daerah Asal	100	100	176.561.419 ,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	173.400.000,00	100	18 2.240.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0001 - Penyed iaan Perm akanan				334.069 .9 30,00		314.069 .9 30,00		332.476.9 23,00		345.000.000,00		350.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan Per Orang Sesuaid eng an Stand ar G iz i Minim alKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perm akanan Sesuaid eng an Stand ar G iz iMinim alKew enang an Provinsi	4000	4000	334.069 .9 30,00	4000	314.069 .9 30,00	4000	332.476.9 23,00	4000	345.000.000,00	4000	350.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0002 - Penyed iaan Sand ang				133.103.39 4,00		133.103.39 4,00		146.413.733,00		155.055.107,00		164.060.617,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an Lainnya d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Menerim a Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia d alam 1 Tah un Kew enang an Provinsi	100	100	133.103.39 4,00	100	133.103.39 4,00	100	146.413.733,00	100	155.055.107,00	100	164.060.617,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0003 - Penyed iaan Asram a/W ism a yang Mud ah Diakses				19 4.9 40.000,00		19 4.9 40.000,00		214.434.000,00		228 .500.000,00		235.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Orang yang Terakses Asram a/W ism a LayakH uniKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Terakses Asram a/W ism a LayakH uni Kew enang an Provinsi	100	100	19 4.9 40.000,00	100	19 4.9 40.000,00	100	214.434.000,00	100	228 .500.000,00	100	235.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0004 - Penyed iaan Perbekalan Keseh atan d id alam Panti				6.9 46.368 ,00		6.9 46.368 ,00		7.641.005,00		8 .405.105,00		9 .245.616,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d i d alam PantiKew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d id alam Panti Kew enang an Provinsi	100	100	6.9 46.368 ,00	100	6.9 46.368 ,00	100	7.641.005,00	100	8 .405.105,00	100	9 .245.616,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0005 - Pem berian Bim bing an Fisik, Mental, Sp rituald an Sosial				268 .104.8 38 ,00		240.262.8 8 2,00		252.500.000,00		265.750.000,00		275.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Kew enang an Provinsi	100	100	268 .104.8 38 ,00	100	240.262.8 8 2,00	100	252.500.000,00	100	265.750.000,00	100	275.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0006 - Pem berian Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ari				75.000.000,00		75.000.000,00		8 2.500.000,00		9 0.750.000,00		9 2.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an Provinsi	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	8 2.500.000,00	100	9 0.750.000,00	100	9 2.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0007 - Pem berian Bim bing an Keteram p ilan Dasar				75.000.000,00		75.000.000,00		8 2.500.000,00		9 0.750.000,00		9 4.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Keteram p ilan Dasar Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Diberikan Bim bing an Keteram p ilan Dasar Kew enang an Provinsi	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	8 2.500.000,00	100	9 0.750.000,00	100	9 4.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0009 - Akses Kelayanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar				10.100.000,00		10.100.000,00		11.110.000,00		12.221.000,00		13.443.100,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Akses ke Layanan Pend id ikan d an Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi	100	100	10.100.000,00	100	10.100.000,00	100	11.110.000,00	100	12.221.000,00	100	13.443.100,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.1.05.0010 - Pem ulang an ke Daerah Asal				176.561.419 ,00		150.000.000,00		165.000.000,00		173.400.000,00		18 2.240.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pem ulang an Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) Lainnya d iLuar H IV/AIDS ke Daerah AsalKew enang an Provinsi	Jum lah Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) Lainnya d iLuar H IV/AIDS Kew enang an Provinsiyang Dip ulang kan ke Daerah Asal	100	100	176.561.419 ,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	173.400.000,00	100	18 2.240.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0011 - Koord inasi, Sinkronisasid an Pem binaan Pelaksanaan Bid ang Reh abilitasiSosial bag iPenyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS)Lainnya d i Luar H IV/AIDS d an NAPZ A				47.48 4.641,00		45.250.000,00		49 .775.000,00		54.752.500,00		60.227.750,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Koord inasiSinkronisasi d an Pem binaan Pelaksanaan Bid ang Reh abilitasiSosialbag iPenyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an Pem binaan Reh abilitasiSosial Dasar Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A	3	3	47.48 4.641,00	3	45.250.000,00	3	49 .775.000,00	3	54.752.500,00	3	60.227.750,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0013 - FasilitasiPem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag i Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS)Lainnya d iLuar H IV/AIDS				5.353.000,00		5.353.000,00		5.8 8 8 .300,00		6.477.130,00		7.124.8 43,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mem butuh kan Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iPenyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS)Lainnya d i Luar H IV/AIDS Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mem butuh kan Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Bag iPenyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial (PMKS)Lainnya d iLuar H IV/AIDS Kew enang an Provinsi	100	100	5.353.000,00	100	5.353.000,00	100	5.8 8 8 .300,00	100	6.477.130,00	100	7.124.8 43,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.05.0014 - Pem berian Pelayanan Penelusuran Keluarg a				-		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya orang yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	Jum lah Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A yang Mend ap atkan Pelayanan Penelusuran Keluarg a Kew enang an Provinsi	0	100	-	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05 - PROG RAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL				69 0.250.000,00		68 4.162.9 8 5,00		715.217.8 14,00		747.207.104,00		770.451.027,00		
Mening katnya p erlind ung an d an jam inan sosial	Persentase Penerim a Manfaatyang Terp enuh iKebutuh an Dasar	0	0	69 0.250.000,00	0	68 4.162.9 8 5,00	0	715.217.8 14,00	0	747.207.104,00	0	770.451.027,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Pening katan Ind eks Kebutuh an Dasar	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Keluarg a Miskin d an Rentan Penerim a Perlind ung an Sosialyang terg rad uasid ari kem iskinan	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Daerah yang m elaksanakan p eng elolaan d an p end ataan d ata Fakir Miskin	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.01 - Peng ang katan Anakantar W NId an Peng ang katan Anakoleh Orang Tua Tung g al				9 0.250.000,00		124.162.9 8 5,00		9 0.217.8 14,00		62.207.104,00		25.451.027,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Ad op siAnak	Jum lah Anakyang Mend ap atkan Orang Tua Asuh /Orang Tua Ang kat SesuaiKetentuan yang Berlaku Kew enang an Provinsi	20	20	45.250.000,00	20	64.162.9 8 5,00	20	45.217.8 14,00	20	32.207.104,00	20	15.451.027,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jum lah Anakyang Mend ap atkan Orang Tua Tung g alsesuai Ketentuan yang Berlaku Kew enang an Provinsi	10	10	45.000.000,00	10	60.000.000,00	10	45.000.000,00	10	30.000.000,00	10	10.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.01.0001 - Peng ang katan Anak antar W NI				45.250.000,00		64.162.9 8 5,00		45.217.8 14,00		32.207.104,00		15.451.027,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Peng ang katan Anakoleh Orang Tua Asuh /Oang Tua Ang kat SesuaiKetentuan yang Berlaku Kew enang an Provinsi	Jum lah Anakyang Mend ap atkan Orang Tua Asuh /Orang Tua Ang kat SesuaiKetentuan yang Berlaku Kew enang an Provinsi	20	20	45.250.000,00	20	64.162.9 8 5,00	20	45.217.8 14,00	20	32.207.104,00	20	15.451.027,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.01.0002 - Peng ang katan Anak oleh Orang Tua Tung g al				45.000.000,00		60.000.000,00		45.000.000,00		30.000.000,00		10.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Peng ang katan Anakoleh Orang Tua Tung g alSesuaiKetentuan yang Berlaku Kew enang an Provinsi	Jum lah Anakyang Mend ap atkan Orang Tua Tung g alsesuai Ketentuan yang Berlaku Kew enang an Provinsi	10	10	45.000.000,00	10	60.000.000,00	10	45.000.000,00	10	30.000.000,00	10	10.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.02 - Peng elolaan Data Fakir Miskin Cakup an Daerah Provinsi				600.000.000,00		560.000.000,00		625.000.000,00		68 5.000.000,00		745.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Data Fakir Miskin	Jum lah Pekerja Rentan Miskin yang Mend ap atkan Bantuan Jam inan SosialKetenag akerjaan Kew enang an Provinsi	0	0	-	20	100.000.000,00	20	120.000.000,00	20	130.000.000,00	20	140.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah p end am p ing p rog ram bantuan sosialyang m end ap atkan p eng em bang an p otensi	0	0	-	50	9 5.000.000,00	50	100.000.000,00	50	110.000.000,00	50	120.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Penerim a Manfaat(PM) yang Mend ap atkan Bantuan Sosial Kesejah teraan Keluarg a Kew enang an Provinsi	0	100	152.8 68 .448 ,00	100	8 0.000.000,00	100	8 5.000.000,00	100	9 0.000.000,00	100	9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Dokum en H asilKoord inasi d an SinkronisasiProg ram Bantuan SosialNon Tunai	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Kabup aten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pem utakh iran Data Fakir Miskin	1	1	148 .9 04.240,00	1	8 0.000.000,00	1	8 5.000.000,00	1	9 0.000.000,00	1	9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah keluarg a fakir m iskin yang m em p eroleh bantuan stim ulan m od ald an p end am p ing an usah a lintas d aerah kabup aten/kota	0	0	-	20	50.000.000,00	20	65.000.000,00	20	8 0.000.000,00	20	9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang Mend ap atkan Bantuan Peng em bang an Ekonom i MasyarakatKew enang an Provinsi	0	50	29 8 .227.312,00	50	55.000.000,00	50	60.000.000,00	50	65.000.000,00	50	70.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.02.0003 - FasilitasiBantuan Peng em bang an Ekonom iMasyarakat				29 8 .227.312,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Bantuan Peng em bang an Ekonom i MasyarakatKew enang an Provinsi	Jum lah Orang Mend ap atkan Bantuan Peng em bang an Ekonom i MasyarakatKew enang an Provinsi	0	50	29 8 .227.312,00	50	55.000.000,00	50	60.000.000,00	50	65.000.000,00	50	70.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.02.0006 - FasilitasiBantuan SosialKesejah teraan Keluarg a				152.8 68 .448 ,00		8 0.000.000,00		8 5.000.000,00		9 0.000.000,00		9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Penerim a Manfaat(PM) yang Mend ap atkan Bantuan Sosial Kesejah teraan Keluarg a Kew enang an Provinsi	Jum lah Penerim a Manfaat(PM) yang Mend ap atkan Bantuan Sosial Kesejah teraan Keluarg a Kew enang an Provinsi	0	100	152.8 68 .448 ,00	100	8 0.000.000,00	100	8 5.000.000,00	100	9 0.000.000,00	100	9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.02.0008 - Peng elolaan Data Fakir Miskin Cakup an Daerah Provinsi				148 .9 04.240,00		8 0.000.000,00		8 5.000.000,00		9 0.000.000,00		9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Peng elolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabup aten/Kota	Jum lah Kabup aten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pem utakh iran Data Fakir Miskin	1	1	148 .9 04.240,00	1	8 0.000.000,00	1	8 5.000.000,00	1	9 0.000.000,00	1	9 5.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.1.02.0009 - Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial				-		95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosialyang mendapatkan pengembangan potensi	0	0	-	50	95.000.000,00	50	100.000.000,00	50	110.000.000,00	50	120.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.02.0010 - Penyelenggaraan Koordinasi dan SinkronisasiProgram Bantuan SosialNon Tunai				-		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiProgram Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiProgram Bantuan SosialNon Tunai	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.02.0011 - FasilitasiBantuan Stimulan ModalUsaha dan pendamping an bagiFakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-		50.000.000,00		65.000.000,00		80.000.000,00		95.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya fasilitasibantuan stimulan modalusaha dan pendamping an bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modaldan pendamping an usaha lintas daerah kabupaten/kota	0	0	-	20	50.000.000,00	20	65.000.000,00	20	80.000.000,00	20	95.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.02.0012 - FasilitasiBantuan Jaminan Sosialbagi Pekerja Rentan Miskin				-		100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan SosialKetenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan SosialKetenagakerjaan Kewenangan Provinsi	0	0	-	20	100.000.000,00	20	120.000.000,00	20	130.000.000,00	20	140.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				18.474.600.000,00		18.858.068.717,00		19.442.408.279,00		20.285.675.000,00		20.912.412.161,00		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosialdan/atau non alam yang terpenuhikebutuhan dasar pada saatdan setelah tanggap darurat bencana	0	0	18.474.600.000,00	0	18.858.068.717,00	0	19.442.408.279,00	0	20.285.675.000,00	0	20.912.412.161,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Masyarakatdi aerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	0	0		0		0		0		0		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				18.474.600.000,00		18.858.068.717,00		19.442.408.279,00		20.285.675.000,00		20.912.412.161,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya perlindungan sosialbagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah AnakUsia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasirawan bencana			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0	0	-	50	16.000.000,00	50	20.000.000,00	50	52.000.000,00	50	65.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah TempatPengungsian Kewenangan Provinsi	3000	3000	316.130.000,00	3000	300.000.000,00	3000	300.000.000,00	3000	300.000.000,00	3000	300.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Daerah yang difasilitasi untukmelakukan pemetaan rawan konfliksosial			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROG RAM / OUTCOME /KEG IATAN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAG U		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jum lah d okum en h asilm onitoring d an evaluasiKeserasian Sosial (KS)d an Kearifan Lokal(KL)			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah kam p ung siag a bencana d an lum bung sosialyang d ifasilitasi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Korban Bencana yang m end ap atkan Bantuan Lang sung Berup a Uang Tunai			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Korban Bencana yang Mend ap atkan Layanan Dukung an PsikososialKew enang an Provinsi	3000	3000	55.550.000,00	3000	56.000.000,00	3000	61.600.000,00	3000	67.760.000,00	3000	70.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia p ad a Masa Tang g ap Darurat(Peng ung sian)d an Pasca Bencana Kew enang an Provinsi	3000	3000	400.000.000,00	3000	400.000.000,00	3000	410.000.000,00	3000	425.000.000,00	3000	430.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Penang anan Kh usus bag i Kelom p okRentan Kew enang an Provinsi	3000	3000	121.200.000,00	3000	122.000.000,00	3000	125.000.000,00	3000	130.000.000,00	3000	135.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Orang yang m end ap atkan p enyuluh an sosialberup a sosialisasi, kom unikasi, inform asi, d an ed ukasi(KIE)terkait p enang g ulang an bencana p ad a m asyarakatd ilokasiraw an			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
	Jum lah Peng ung siyang Mend ap atkan Perm akanan 3x1 H ari d alam Masa Tang g ap Darurat Kew enang an Provinsi	3000	3000	9 8 1.720.000,00	3000	9 64.068 .717,00	3000	1.025.8 08 .279 ,00	3000	1.054.525.675,00	3000	1.09 2.412.161,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0001 - Penyed iaan Perm akanan				9 8 1.720.000,00		9 64.068 .717,00		1.025.8 08 .279 ,00		1.054.525.675,00		1.09 2.412.161,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Peng ung siyang Mend ap atkan Perm akanan 3x1 H ari d alam Masa Tang g ap Darurat Kew enang an Provinsi	Jum lah Peng ung siyang Mend ap atkan Perm akanan 3x1 H ari d alam Masa Tang g ap Darurat Kew enang an Provinsi	3000	3000	9 8 1.720.000,00	3000	9 64.068 .717,00	3000	1.025.8 08 .279 ,00	3000	1.054.525.675,00	3000	1.09 2.412.161,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0004 - Penang anan Kh usus bag iKelom p okRentan				121.200.000,00		122.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Penang anan Kh usus bag iKelom p ok Rentan Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Penang anan Kh usus bag i Kelom p okRentan Kew enang an Provinsi	3000	3000	121.200.000,00	3000	122.000.000,00	3000	125.000.000,00	3000	130.000.000,00	3000	135.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukung an Psikososial				55.550.000,00		56.000.000,00		61.600.000,00		67.760.000,00		70.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Pelayanan Dukung an Psikososialbag iKorban Bencana Kew enang an Provinsi	Jum lah Korban Bencana yang Mend ap atkan Layanan Dukung an PsikososialKew enang an Provinsi	3000	3000	55.550.000,00	3000	56.000.000,00	3000	61.600.000,00	3000	67.760.000,00	3000	70.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0011 - Penyed iaan Sand ang				400.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		425.000.000,00		430.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia p ad a Masa Tang g ap Darurat (Peng ung sian)d an Pasca Bencana Peng ung sid alam Masa Tang g ap Darurat Kew enang an Provinsi	Jum lah Orang yang Mend ap atkan Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Tersed ia p ad a Masa Tang g ap Darurat(Peng ung sian)d an Pasca Bencana Kew enang an Provinsi	3000	3000	400.000.000,00	3000	400.000.000,00	3000	410.000.000,00	3000	425.000.000,00	3000	430.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0013 - Penyed iaan Tem p at Penam p ung an Peng ung si				316.130.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	

Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	3000	3000	316.130.000,00	3000	300.000.000,00	3000	300.000.000,00	3000	300.000.000,00	3000	300.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				-		16.000.000,00		20.000.000,00		52.000.000,00		65.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0	0	-	50	16.000.000,00	50	20.000.000,00	50	52.000.000,00	50	65.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0017 - FasilitasiBantuan Langsung Berupa Uang Tunaibagi Korban Bencana				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya FasilitasiBantuan Langsung Berupa Uang Tunaibagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0018 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah AnakUsia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasirawan bencana			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0019 - Penyuluhan sosial untuksosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi(KIE)kepada masyarakat terkaitpenanggulangan bencana pada masyarakatdilokasirawan bencana				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya penyuluhan sosialuntuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi(KIE)kepada masyarakatterkait penanggulangan bencana pada masyarakatdilokasirawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosialberupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi(KIE)terkait penanggulangan bencana pada masyarakatdilokasirawan			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0020 - FasilitasiPemetaan rawan konfliksosial				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konfliksosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untukmelakukan pemetaan rawan konfliksosial			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0021 - Monitoring dan evaluasikegiatan Keserasian Sosial(KS) dan Kearifan Lokal(KL)				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial(KS)dan Kearifan lokal(KL)	Jumlah dokumen hasilmonitoring dan evaluasiKeserasian Sosial (KS)dan Kearifan Lokal(KL)			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0022 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam)dalam penanganan korban bencana sosialdan non Alam				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosialdan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.1.01.0023 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosialbagi masyarakatdiwilayah rawan bencana				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosialbagi masyarakatdiwilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosialyang difasilitasi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				265.000.000,00		262.663.080,00		274.585.615,00		286.869.607,00		295.790.687,00		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	0	0	265.000.000,00	0	262.663.080,00	0	274.585.615,00	0	286.869.607,00	0	295.790.687,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi				265.000.000,00		262.663.080,00		274.585.615,00		286.869.607,00		295.790.687,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGUINDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan TMP	Jumlah DokumenHasilRehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah LaporanHasilPengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi	1		265.000.000,00		262.663.080,00		274.585.615,00		286.866.907,00		295.796.807,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.1.01.0001 - RehabilitasiSarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Rehabilitasiserta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah DokumenHasilRehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.1.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				265.000.000,00		262.663.080,00		274.585.615,00		286.866.907,00		295.796.807,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi	1		265.000.000,00		262.663.080,00		274.585.615,00		286.866.907,00		295.796.807,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.1.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan NasionalProvinsi	Jumlah LaporanHasilPengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.1.01.0004 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi iTaman Makam Pahlawan NasionalProvinsi				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi iTaman Makam Pahlawan NasionalProvinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.1.01.0005 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di iTaman Makam Pahlawan NasionalProvinsi				-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di iTaman Makam Pahlawan NasionalProvinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			-		-		-		-		-	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	

Tabel 4.3
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/ OutCome/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Out Come/Out Put	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	

Ctt : Tagging Program Kegiatan yang mendukung PPRG (Kode ARG pada kolom keterangan)

Tabel 4.4
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1 Penerbitan Iz in Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial - Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota - Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi - Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota - Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses - Penyediaan Alat Bantu - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti - Pengasuhan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritualdan Sosial - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			- Penyediaan Permakanan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar - Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses - Penyediaan Alat Bantu - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemulasaraan - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	

			- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	

Ctt : Tagging Program/Kegiatan yang mendukung kemiskinan dan disabilitas

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			- Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemulangan ke Daerah Asal - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZ A di dalam Panti - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari - Pemberian Bimbingan Keteram pilan Dasar - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemulangan ke Daerah Asal - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZ A - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tungg al Pengangkatan Anak antar W NI - Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tungg al 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakup an Daerah Provinsi - Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial - Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai - Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Mening katnya perlindungan sosial korban bencana	1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi - Penyediaan Permakanan - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Pelayanan Dukungan Psikososial - Penyediaan Sandang - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana)Dalam Penanganan Bencana - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			- Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana - Fasilitasi Pemetaan rawan konflik social - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	

Sebagaimana diketahui bahwa Indikator Kinerja Dinas SosialProvinsi Riau terkait dengan Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan serta jumlah PSKS yang diberdayakan dan menjadi acuan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan. Indikator ini menjadi acuan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai DinasSosial dalam lima tahun mendatang dalam periode 2025-2029. Sasaran Gubernur yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah dalam Meningkatnya perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif, sedangkan Dinas Sosial Provinsi Riau mengambil tujuan Meningkatnya Kesejehateraan Sosial yang Inklusif.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
2.	Indeks Keseiahteraan Sosial	poin	56,90	56,95	56,99	57,05	57,15	57,20	57,25	
3.	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4.	Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi)	%	82	84,62	86	87	88	89	90	
5.	Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,15	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	

Fokus utama Dinas Sosial dalam jangka menengah adalah meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial secara bertahap, dari baseline 56,90 poin di tahun 2024 menuju 57,25 poin pada tahun 2030. Upaya ini didukung penuh oleh konsistensi dalam pemutakhiran data kemiskinan. Target 100% aktifnya daerah dalam memperbarui data terpadu penanggulangan kemiskinan menunjukkan komitmen kuat agar seluruh program bantuan dan perlindungan sosial di wilayah Riau selalu tepat sasaran dan berbasis data terkini (real-time).

Dari sisi penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, terdapat target untuk meningkatkan persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang profesional. Dari angka 82% di tahun 2024, diharapkan pada tahun 2030 sebanyak 90% PSKS (baik perorangan maupun lembaga) telah memiliki sertifikasi atau akreditasi resmi. Hal ini sejalan dengan target pelayanan rehabilitasi sosial, di mana Dinas Sosial berkomitmen mempertahankan angka 100% dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat.

Selain fokus pada pelayanan masyarakat, Dinas Sosial juga memprioritaskan perbaikan tata kelola internal yang tercermin dalam target Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Terjadi tren kenaikan yang signifikan dari baseline 71,15 poin menuju target 77,5 poin pada tahun 2030. Kenaikan konsisten sebesar 1 poin setiap tahunnya ini menunjukkan upaya organisasi untuk menjadi instansi yang semakin transparan, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan setiap program kerja daerah.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	positif	Nilai	75	76	77	78	79	80	81	

3.	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	positif	Nilai	75	76	77	78	79	80	81	
4.	Indeks Peranan Sosial	positif	Nilai	70	71	72	73	74	75	76	
5.	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	positif	%	80	81	82	83	84	85	86	
6.	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	positif	%	40	45	50	55	60	65	70	
8.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	positif	%	65	67	69	71	73	75	77	
12.	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandang Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	positif	%	84,62	85	86	87	88	89	90	
18.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
19.	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia dengan menargetkan kenaikan Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dari baseline 75 di tahun 2024 menjadi 81 pada tahun 2030. Hal serupa juga diterapkan pada penyandang disabilitas, di mana Indeks Kesejahteraan Sosial mereka diproyeksikan tumbuh konsisten dari angka 75 menuju target 81 di akhir periode. Secara kolektif, Indeks Peranan Sosial masyarakat juga dipacu untuk meningkat dari angka 70 menjadi 76, seiring dengan upaya pemenuhan Indeks Kebutuhan Dasar yang ditargetkan naik secara bertahap dari 80% menjadi 86%.

Di sisi akurasi kebijakan, pemerintah mewajibkan 100% daerah untuk aktif melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data fakir miskin setiap tahun guna menjamin bantuan tepat sasaran. Salah satu target paling krusial adalah mendorong kemandirian melalui graduasi keluarga miskin dan rentan, yang dipatok meningkat signifikan dari baseline 40% di tahun 2024 menjadi 70% pada tahun 2030. Selain itu, jaminan perlindungan bagi korban bencana tetap menjadi prioritas utama dengan target pemenuhan

kebutuhan dasar serta layanan pemulihan sosial yang harus tercapai sempurna sebesar 100% tanpa terkecuali.

Aspek penghormatan terhadap nilai kepahlawanan dijaga melalui Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan yang tetap dipertahankan pada angka 100%. Sementara itu, untuk meminimalisir risiko dampak bencana, kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan ditargetkan meningkat dari 65% menjadi 77%. Penanganan kondisi darurat ini didukung penuh oleh tenaga kesejahteraan sosial dan relawan yang diwajibkan 100% bekerja sesuai standar profesionalisme tinggi dalam setiap tahapan penanganan korban, baik selama masa tanggap darurat maupun pasca-bencana.

Kualitas pelayanan profesional di dalam maupun di luar panti rehabilitasi dipastikan tetap berada pada level 100% bagi seluruh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Negara juga menjamin perlindungan penuh melalui persentase penanganan pemulangan warga negara imigran, orang terlantar, dan korban kekerasan sebesar 100%. Fokus perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh penerima manfaat, termasuk anak terlantar hingga gelandangan dan pengemis, yang secara konsisten ditargetkan mencapai angka 100%.

Guna mendukung keberhasilan seluruh agenda tersebut, kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial terus ditingkatkan dari baseline 84,62% menuju target 90% pada tahun 2030 agar memiliki keahlian yang mumpuni. Layanan perlindungan bagi warga negara migran korban kekerasan juga ditangani secara tuntas dengan target capaian 100%. Terakhir, penguatan kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial terus didorong agar 100% dari lembaga tersebut mengalami peningkatan kualitas pelayanan yang bermutu dan akuntabel bagi masyarakat luas.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 ini merupakan sebuah alat manajemen teknokratik untuk mengelola kondisi teraktual saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja dalam periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek teknokratik seperti diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan Program – program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan isu strategis yang dihadapi, permasalahan sosial teraktual, serta Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Provinsi Riau, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Riau

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau Provinsi Riau yang setiap tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang serta akan melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian secara responsif gender.

Pekanbaru, Oktober 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI DINAS SOSIAL RIAU

Ir. ZULFADLI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660803 199211 1 001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256
PEKANBARU

LAPORAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
TAHUN 2025-2029

NOMOR : 314/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025
TANGGAL : 08 OKTOBER 2025

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

Nomor : 314/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025 Pekanbaru, 08 Oktober 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji ubstansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1;

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.
   a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

      Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

   b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

      Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.
   a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

      Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 12 September 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

V. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
   a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah; dan
   b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
4. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah;
   a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; dan
   b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Strategis perangkat daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Dinas Sosial Provinsi Riau selanjutnya disebut Dinsos, merupakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah, yang dibentuk berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dinas Sosial menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
d. Pelaksanaan administasi kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD, yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

   a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

      Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - .4.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.
   a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

      Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

   b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

      Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.
5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

   Rekomendasi:

   Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memerintahkan Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Sosial Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Sosial Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256
PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2029

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh/ Tanggal	Romi F, Hidayat/ September 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto / September 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/ September 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif .

Sasaran :
1. Terpenuhinya Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memerintahkan Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, September 2025

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau	**Supervisor/Pengendali Teknis**
Ir. ZULFADLI	**RONI COKRO SUBAGIO, SE**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660803 199211 1 001	NIP 196712051998031003

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memerintahkan Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, September 2025

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau	**Supervisor/Pengendali Teknis**
Ir. ZULFADLI	**RONI COKRO SUBAGIO, SE**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660803 199211 1 001	NIP 196712051998031003

KESELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP	
									KESELARASAN	
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1					8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Ya	Program Kegiatan Dan Subkegiatan Sudah Selaras Dengan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
2						8.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Ya	
3					8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Ya	
4						8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Ya	
5					8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Ya	
6						8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Ya	
7					8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Ya	
8						8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Ya	
9					8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Ya	
10						8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Ya	
11						8.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Ya	
12						8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Ya	
13						8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Ya	
14						8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Materiel	Jumlah Paket Bahan/Materiel yang Disediakan	Paket	Ya	
15						8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Ya	
16						8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Ya	

17	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		8.01.01.1.08.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Ya
18				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Ya
19					8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Ya
20					8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Ya
21					8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Ya
22					8.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Ya
23				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Ya
24					8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Ya
25					8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Ya
26					8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Ya
27				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Ya
28					8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Ya
29					8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Ya
30					8.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Ya
31					8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Ya
32					8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Ya
33					8.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Ya

34	Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan	- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Ya
35					8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Ya
36					8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Ya
37					8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Ya
38					8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Ya
39					8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	Ya
40					8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Ya
41					8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Ya
42					8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	Ya
43					8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Ya
44					8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Dut ifa	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Ya

45	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM					8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	Ya
46		Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	- Meningkatnya etika dan budaya politik	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Ya
47						8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Ya
48						8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Ya
49						8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Ya
50						8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Ya
51						8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Ya

52					8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Ya
53	Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi	- Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Ya
54					8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Ya
55					8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Ya
56					8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Ya
57					8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Ya
58	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	- Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Ya

59						8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Ya
60						8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Ya
61						8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Ya
62						8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Ya
64	Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat	- Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Ya
65						8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Ya

66						8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	Ya	

KESELARASAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN BIDANG URUSAN PADA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	HASIL REVIU APIP	
					KESELARASAN	
					YA/TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Nilai	IKD	PROGRAM	Ya	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Sudah Selaras Dengan Bidang Urusan Pada Perangkat Daerah
2	Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Persentase	IKU	SASARAN	Ya	
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	IKD	PROGRAM	Ya	
4	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	IKD	PROGRAM	Ya	
5	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	IKD	PROGRAM	Ya	
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	poin	IKU	TUJUAN	Ya	
7	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandang Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	IKD	PROGRAM	Ya	
8	Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi)	%	IKU	SASARAN	Ya	
9	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin	%	IKD	PROGRAM	Ya	
10	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	IKD	PROGRAM	Ya	
11	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	IKD	PROGRAM	Ya	
12	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	%	IKD	PROGRAM	Ya	
13	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	IKD	PROGRAM	Ya	
14	Indeks Peranan Sosial	Nilai	IKD	PROGRAM	Ya	
15	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	IKD	PROGRAM	Ya	
16	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	IKD	PROGRAM	Ya	
17	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	IKD	PROGRAM	Ya	

18	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	IKD	PROGRAM	Ya	
19	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	IKU	SASARAN	Ya	
20	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan	Persentase	IKD	PROGRAM	Ya	
21	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	IKD	PROGRAM	Ya	
22	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Nilai	IKD	PROGRAM	Ya	

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS PADA RP JMD DENGANPROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PADA PERANGKAT DAERAH

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP	
				KESELARASAN	
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	Program Prioritas Pada RP JMD Sudah Konsisten Dengan Program Pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
2	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	
3	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	
4	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RP JMD DENGAN PROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PADA PERANGKAT DAERAH

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP	
				KESELARASAN	
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		YA/TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	Program Perangkat Daerah Pada RP JMD **Sudah Konsisten** Dengan Program Pada Rancangan Akhir Renstra Pada Perangkat Daerah
2	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (Prioritas)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	
3	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN(Non Prioritas)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	
4	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Prioritas)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	
5	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Prioritas)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	
6	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA (Prioritas)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	
7	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN(Non Prioritas)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Ya	

KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU	
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						KESELARASAN	
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	YA/TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Persentase	2.45	2.75	2.45	89090909090909091%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	Penetapan Target IKU Sudah Selaras Dengan Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Seebelumnya
2	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial	poin	N/A	N/A	N/A	NaN%	56.90	56.95	56.99	57.05	57.15	57.20	57.25	Ya	
3	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi)	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	82	84.62	86	87	88	89	90	Ya	
4	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	

KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) DENGAN PENGENDAALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T6							HASIL REVIU	
									TARGET						KESELARASAN	
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	T0	T1	T2	T3	T4	T5	YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Nilai	N/A	N/A	N/A	NaN%	75	76	77	78	79	80	81	Ya	Penetapan Target IKD Sudah Selaras Dengan Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya
2	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
3	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	65	67	69	71	73	75	77	Ya	
4	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
5	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandang Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
6	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin	%	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
7	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
8	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	18.84	19.16	16.16	10000%	84.62	85	86	87	88	89	90	Ya	
9	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	80	81	82	83	84	85	86	Ya	
10	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
11	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Indeks Perawan Sosial	Nilai	N/A	N/A	N/A	NaN%	70	71	72	73	74	75	76	Ya	
12	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	40	45	50	55	60	65	70	Ya	
13	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
14	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
15	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
16	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan	Persentase	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
17	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	10000%	100	100	100	100	100	100	100	Ya	
18	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Nilai	N/A	N/A	N/A	NaN%	75	76	77	78	79	80	81	Ya	

KESELARASAN PENETAPAN TARGET SUBKEGIATAN DENGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU	
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	KESELARASAN	
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						YA/TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi		14	9		Ya	Penetapan Target Sub Kegiatan Belum Selaras Dengan Data Statistik Sektoral Daerah Agar Menyajikan Satuan Dan Data Capaian Tahun 2024 Pada DSSD
2				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	1						Makam pahlawan		1	1		Ya	
3				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional		1	1		Ya	
4				Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	-	-	-	-	-	-	Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional		0	0		Ya	
5				Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	-	-	-	-	-	-	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional		0	0		Ya	
6		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga		50	50	50	50	50	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga		0	0		Ya	
7				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga		172	172	172	172	172	Lembaga Kesejahteraan Sosial		223	223		Ya	
8				Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	0	0	350	350	350	350	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial		0	0		Ya	
9				Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	0	0	20	20	20	20	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		0	0		Ya	
10				Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan	0	0	1	1	1	1	Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar		0	0		Ya	
11				Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang		0	20	20	20	20	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi		0	0		Ya	

12			Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	0	0	20	20	20	20	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		0	0		Ya
13			Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	0	0	50	50	50	50	Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan		0	0		Ya
14			Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Untuk Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga		0	100	100	100	100	Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi		0	0		Ya
15			Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	0	0	1	1	1	1	Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional		0	0		Ya
16		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	lanjut usia telantar yang mendapat pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti		73	73		Ya
17			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelangkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti		73	73		Ya
18												Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar		59	59		Ya
19			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar		6	6		Ya
20												Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar		27	27		Ya
21												Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar		12	12		Ya
22			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	Alat bantu yang diterima lanjut usia telantar di dalam panti		60	3		Ya
23			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar		59	59		Ya
24												lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		73	73		Ya
25			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya
26												Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya
27												Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar		59	59		Ya
28			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
29												Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
30												Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar		59	59		Ya

31		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	Te[illegible]yanan panti sosial lanjut usia telantar		59	59		Ya
32											lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga		73	18		Ya
33		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar		59	59		Ya
34											lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		73	18		Ya
35		Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	Orang	73	100	100	100	100	100	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar		59	59		Ya
36											Pemulasaraan		9	10		Ya
37		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		4000	4000	4000	4000	4000	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti		30	30		Ya
38		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100	100	100	100	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDSyang menerima kebutuhan sandang di dalam panti		30	30		Ya
39											Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		27	27		Ya
40		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100	100	100	100	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		6	6		Ya
41											Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Panti Sosial PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		42	42		Ya
42											Standar sarana prasarana Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		12	12		Ya
43		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100	100	100	100	Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		27	27		Ya
44											Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		30	30		Ya
45		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100	100	100	100	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya
46											Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya

47											Te . yanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		27	27		Ya
48	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100	100	100	100	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
49											Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
50											Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		27	27		Ya
51		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100	100	100	100	Instruktur yang memberikan Bimbingan Keterampilan Dasar		12	12		Ya
52											Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		27	27		Ya
53		Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100	100	100	100	Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		27	27		Ya
54											Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan		30	0		Ya
55											PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar		30	30		Ya
56		Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	100	100	100	100	100	100	Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS		27	27		Ya
57											Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal		30	40		Ya
58		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	3	3	3	3	3	3	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		11	1		Ya

59				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah [illegible]lang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		100	100	100	100	100	Pe[illegible] Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga		-	-		Ya
60				Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti		54	86		Ya
61				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti		54	86		Ya
62													Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar		93	93		Ya
63				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Tersedia Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar		9	6		Ya
64													Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar		46	46		Ya
65													Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar		12	12		Ya
66				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		14	7		Ya
67		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar		93	93		Ya
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		54	86		Ya
69			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar		93	93		Ya
70													Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya
71													Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya
72				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar		93	93		Ya
73													Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya

74											Pe[illegible]ial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
75			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar		93	93		Ya
76												Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan		35	52		Ya
77												Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar		35	52		Ya
78			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar		93	93		Ya
79												Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga		29	86		Ya
80			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	90	90	90	90	90	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar		93	93		Ya
81												Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga		29	86		Ya
82	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	Anak telantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti		35	46		Ya
83												Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak		1	1		Ya
84			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti		35	46		Ya
85												Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar		41	41		Ya
86			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar		7	7		Ya
87												Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar		15	15		Ya
88												Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar		12	12		Ya
89			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar		41	41		Ya
90												Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		35	46		Ya
91			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya
92												Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar		41	41		Ya
93												Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya

94			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	P[illegible]lesional/tenaga k[illegible]ri sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
95												Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar		41	41		Ya
96												Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
97			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar		41	41		Ya
98												Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan		35	46		Ya
99												Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar		35	46		Ya
100			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar		41	41		Ya
101												Anak telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga		35	3		Ya
102			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	50	50	50	50	50	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar		41	41		Ya
103												Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		35	3		Ya
104			Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		60	60	60	60	60	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti		50	40		Ya
105			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60	60	60	60	60	60	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti		50	40		Ya
106												Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis		0	0		Ya
107			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		60	60	60	60	60	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis		0	1		Ya
108												Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis		0	42		Ya
109												Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis		0	1		Ya
110												Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis		12	12		Ya
111			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	60	60	60	60	60	60	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis		0	0		Ya
112												Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		50	40		Ya
113			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	60	60	60	60	60	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya
114												Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		9	9		Ya

115												Te yanan panti sosial ge dan pengemis		0	0		Ya
116		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	60	60	60	60	60	60	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
117												Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		9	9		Ya
118												Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis		0	0		Ya
119			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	60	60	60	60	60	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis		0	0		Ya
120												Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar		12	12		Ya
121			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	60	60	60	60	60	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis		0	0		Ya
122												Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan		60	40		Ya
123												Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar		60	40		Ya
124			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	60	60	60	60	60	60	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis		0	0		Ya
125												Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal		60	40		Ya
126			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terdantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		1	1		Ya
127			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	-	-	-	-	-	-	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga		-	-		Ya
128		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	20	20	20	20	Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat		12	0		Ya
129			Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	10	10	10	10	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal		0	0		Ya
130			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang		50	50	50	50	50	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat		0	150		Ya
131												orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi		-	-		Ya
132	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	0	0	50	50	50	50	Pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi		0	0		Ya

133			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Dokumen	0	0	1	1	1	1	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai		0	0		Ya
134				Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	Orang	0	0	20	20	20	20	Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah		0	0		Ya
135				Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	20	20	20	20	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		0	0		Ya
136		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	3000	3000	3000	3000	3000	3000	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat		5515	13760		Ya
137				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang		3000	3000	3000	3000	3000	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan		27	143		Ya
138				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	3000	3000	3000	3000	3000	3000	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial		485	17522		Ya
139				Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	0	0	50	50	50	50	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi		0	0		Ya
140				Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga	-	-	-	-	-	-	Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai		0	0		Ya
141				Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	-	-	-	-	-	-	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana		0	0		Ya
142				Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	-	-	-	-	-	-	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan		0	0		Ya
143				Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	-	-	-	-	-	-	Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial		0	0		Ya
144				Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)		0	0		Ya
145													Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)		0	0		Ya
146				Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	-	-	-	-	-	-	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas		0	0		Ya
147				Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	-	-	-	-	-	-	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi		0	0		Ya

MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
1	**BAB I PENDAHULUAN**				
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.		√	Pada cover tambahkan Tag line P4GN, Tagline Riau Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah ,Menjaga Marwah, Takkan Melayu hilang di Bumi”
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum		√	Revisi dengan mencantumkan secara lengkap: • Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional • Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem • Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan Ekonomi nasional

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					• Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan janka menengah daerah dan strategi perangkat daerah tahun 2025-2029 • Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah • Peraturan Gubernur Nomor 5 tentang RAD Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 • Perda No 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 • Perda No 2 Tahun 2022 tentna pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029		√	Menambahkan Maksud Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. Tujuan Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.			
2	**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**				
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.		√	Menyajikan data SDM terkait ASN Disabilitas Menyajikan data sarana prasaran pendukung inklusi dan gender. Narasi yang menjelaskan tentang sarpras yang telah ada harus dapat menggambarkan kondisi layanan sarpras untuk dibailitas baik di kantor maupun di UPT. Penjelasan tentang kondisi Sarpras tidak hanya terkait kondisi kerusakan tapi juga kondisi sarpras terhadap layanan aksesibilitas bagi
		Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					disabilitas dan lansia. Tambahkan data IKS berserta Komponen Komponen yang ada di IKS
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah		√		
	Sumber daya Perangkat Daerah			√	Lengkapi dengan SDA Penyandang Disabilitas yang ada.
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya			√	Lengkapi table yang masih kosong, seperti pada table 2.10, dan lainnya. Perbaiki kalimat Pada Bab II , hal 55, trdapat narasi yang menjelaskan “ ada bentuk penilaian yang berbeda dst….. , harap di analisa kembali pernyataan tersebut, karena ketika di kaitkan dengan jumlah PPKS dan kewenangan Provinsi hal tersebut tidak didukung dengan sinkronisasi data dan kewenangan masyarakat terlantar didalam panti, jadi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan data yang telah di sajikan diatas. Pernyataan ini juga berkaitan dengan anggaran yang harus dipertanggung jawabkan , sejalan dengan kinerja dan realisasi yang dicapai.

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Kelompok sasaran layanan		√		
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)			√	Belum ada narasi penjelasan, tambahkan. Contoh: forum tjsblu, LKD yang ada di desa, Perguruan tinggi ,, (Komponen pomponen yang ada di kesejahteraan sosial)
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)			√	Belum ada narasi penjelasan, tambahkan
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)			√	Belum ada narasi penjelasan, tambahkan (Untuk Pmenuhan SPM dan IKS)
	Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat Daerah		√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan menampilkan data-data yang lebih spesifik dan mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.	√		
		Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya *(bukan menarasikan tabel)*. Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis “mengapa” suatu kondisi terjadi dan “apa” implikasinya			
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.	√		
3	**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan: a. Kalimat kondisi; b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;		√	Sesuaikan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dari OPD Dinas Sosial. Pedomani cascading dan pohon kinerja RPJMD dan Renstra. Karena pada BAB. III disebutkan bahwa: “TujuanRenstraDinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian penjabaran dari Sasaran RPJMD Provinsi RiauTahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yangdigital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Dari sasaran RPJMD tersebut, Dinas Sosial Provinsi Riau menetapkan Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 adalah“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”. Pada halaman Bab.III, halaman 140. Terdapat pernyataan “Daritabel diatas,TujuanOPD Dinas Sosial Provinsi Riau adalah untuk menjamin keberfungsian sosial dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di Provinsi Riau, sehingga dari

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					pernyataan ini terdapat lagi Tujuan dari Dinas Soial yang berbeda dari yang di sajikan di subbab diatasnya, dan tidak sesuai dengan yang disajikan pada tabel2 diatasnya. Pastikan Tujuan Dinas Soial, dan disesuaikan dengan matriks Kerja RPJMD, cascading dan Pohon kinerja yang telah disepakati.
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*. *(Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan utama)*		√	Perbaiki sesuaikan dengan cascading dan Pohon kinerja.
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.		√	Perbaiki sesuaikan dengan cascading dan Pohon kinerja
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD		√	Perbaiki sesuaikan dengan cascading dan Pohon kinerja
4	**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**				
	Uraian Program	Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, target dan pagu indikatif Perangkat Daerah memperhatikan: 1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan. 2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. *(dengan menggunakan nomenklatur **Terlaksananya, Terpenuhinya, Tersedianya, dst..**)*	√		
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	√		
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir **poin 6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)** ***- (Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA, DLL..)*** ***- Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan Prioritas di SIPD Renstra***		√	Menambahkan Program Priroitas Kemiskinan dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 pada uraian sub kegiatan dalam rangka mendkung program prioritas pembangunan daerah Tabel terlampir
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin **7. Indikator Kinerja Utama (Tabel 4.5)** ***Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU***		√	Cermati kembali.

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin **8. Indikator Kinerja Kunci (Tabel 4.6)** ***Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Program OPD ke IKK***		√	Cermati kembali
	Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.	**(dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - Bagan)**		√	Cermati kembali
5	**BAB V PENUTUP**				
	Penutup Lampiran	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah 1.Hasil Reviev Apip 2.Matriks Verifikasi Renstra 2025-2029 3.SK Tim Penyusun Rernstra 2025 – 2029; 3.Penyelarasan Renstra Perangkat daerah terhadap RPJMN 2025 – 2029. 4. Metadata		√	Lengkapi

Pekanbaru, Oktober 2025

VERIFIKATOR BAPPEDA PROVINSI RIAU :

Pekanbaru, Oktober 2025

VERIFIKATOR BAPPEDA PROVINSI RIAU :

1. **RAJA JUARISMAN, ST.,M.Si**
   Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia .....

2. **Ir. RIA ETTIKA, M.Si**
   Fungsional Perencana Ahli Madya .....

3. **ARI DIANUARI, ST .**
   Fungsioanal Perencana Ahli Muda .....

4. **RAJI RAHMAT HIDAYAT, S.Sos**
   Fungsional Perencana Ahli Pertama .....

Metadata

1. **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif**

   Indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial

- **Institusi Penghasil :**
  a. Badan Pusat Statistik
  b. Dinas Sosial Provinsi
  c. Dinas Sosial Kab/Kota
  d. Kementerian Sosial
  e. Dinas Pendidikan
  f. Dinas Kesehatan
  g. Badan Pangan Nasional
  h. BPKAD
  i. BAPPEDA
  j. Sekretariat Dewan
  k. KESBANGPOL
  l. Sekretariat Daerah
  m. POLDA
  n. Inspektorat
  o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- **Definisi :**

  Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah instrumen pengukuran komprehensif untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, yang dibangun atas tiga dimensi utama yaitu kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi
- **Interpretasi :**

  Indeks Kesejahteraan Sosial menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0-100 dengan interpretasi sebagai berikut :
  1. Nilai yang mendekati 100 menunjukan tingkat kesejahteraan sosial semakin baik
  2. Nilai yang mendekati o menunjukan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin rendah

$$\text{IKESOS Provinsi}_i = \sum_{i=1}^{n} \text{Dimensi}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i$$

$$\text{IKESOS Provinsi}_i = (\text{Dimensi}_1 \times 0{,}27) + (\text{Dimensi}_2 \times 0{,}31) + (\text{Dimensi}_3 \times 0{,}42)$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial, maka nilai Indeks Kesejahteraan Sosial di atas dikonversikan dengan rentang nilai antara 0-100.

$$\text{IKESOS Provinsi}_i \times 100$$

- **Metode/Rumus Perhitungan :**
- **Ukuran/Satuan**:

  Persentase / Indeks (0-1) atau 0-100

Rentang Nilai	Kategori
0,00 – 20,00	Tidak Sejahtera
20,01 – 40,00	Berkembang
40,01 – 60,00	Maju
60,01 – 80,00	Inklusif
80,01 – 100	Sejahtera

- **Judul Publikasi/Sumber Data**:

  1. Indeks Kesejahteraan Sosial dirilis oleh Kementerian Sosial setiap tahun
- **Tahun Data Tersedia**:

  2025
- **Level Estimasi**:

  Provinsi
- **Frekuensi Pengumpulan**:

  Tahunan
- **Apakah Indikator dapat diakses umum**:

  Ya

2. **Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) – Indikator : Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial**

- **Institusi Penghasil :**
  - ✓ Dinas Sosial Provinsi Riau
- **Definisi :**

  Meningkatnya keberfungsian sosial PPKS merujuk pada capaian kualitas standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti dan Penanganan Bencana Tingkat Provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- **Interpretasi :**

  Nilai 0- 100% adalah nilai kualitas layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dan UPT sesuai standar layanan. Adapun kuantitas yaitu jumlah PPKS yang dilayani sesuai dengan standar layanan
- **Metode/Rumus Perhitungan :**

  Capaian SPM Provinsi : % Program Rehabilitasi Sosial + % Program Penanganan Bencana
- **Ukuran/Satuan**:

  Persentase
- **Judul Publikasi/Sumber Data**:
  - ✓ Dinas Sosial Provinsi
  - ✓ Kementerian Dalam Negeri
- **Tahun Data Tersedia:**

  2023 – 2025
- **Level Estimasi**:
  - ✓ Provinsi/Kabupaten/Kota
- **Frekuensi Pengumpulan**:
  - ✓ Triwulan/Tahunan
- **Apakah Indikator dapat diakses umum**:
  - ✓ Ya

3. **Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial**

   Indikator : Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi) (%)

   - **Institusi Penghasil :**
     Dinas Sosial Provinsi Riau
   - **Definisi :**
     Sumber daya manusia dan kelembagaan kesejahteraan sosial merupakan komponen utama dalam pelaksanaan pendampingan program kesejahteraan sosial guna menjamin efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan program. Pendampingan yang dilakukan harus bersifat valid dan komprehensif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan kinerja manajemen kelembagaan, serta dukungan regulasi dan kebijakan untuk mewujudkan layanan kesejahteraan sosial yang profesional
   - **Interpretasi :**
     Semakin banyak masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka program kesejahteraan sosial dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berarti semakin tinggi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai standar
   - **Metode/Rumus Perhitungan :**
     Peran Masyarakat yang melaksanakan pelayanan sesuai standar =
     % SDM Perorangan tersertifikasi + % PSKS Kelembagaan terakreditasi + % layanan UGB/PUB yang dilaksanakan
   - **Ukuran/Satuan**: Persentase
   - **Judul Publikasi/Sumber Data**: Dinas Sosial Provinsi Riau
   - **Tahun Data Tersedia**: 2023– 2025

- **Level Estimasi**: Provinsi
- **Frekuensi Pengumpulan**: Tahunan
- **Apakah Indikator dapat diakses umum**: Ya

4. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial

Indikator : Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

- **Institusi Penghasil :**

1. Dinas Sosial Kab/Kota
2. BPS/BAPPENAS/Pusdatin Kementerian Sosial

- **Definisi :**

  Pemutakhiran DTSEN secara berkala untuk memastikan ketepatan pensasaran, dengan verifikasi data berbasis ground checking dan validasi partisipatif (musyawarah desa/kelurahan) yang dapat dimanfaatkan sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan

- **Interpretasi :**

  Data termutakhirkan menjadi data sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan terutama bantuan sosial. Semakin sering data termutakhirkan maka pengelolaan data kemiskinan / kesejahteraan semakin valid untuk dijadikan sasaran program bantuan sosial dan kesejahteraan sosial lainnya

- **Metode/Rumus Perhitungan :**

  Capaian : % Capaian updating Kab/Kota + % Lembaga yang memanfaatkan data untuk program kesejahteraan sosial

- **Ukuran/Satuan**: Persen
- **Judul Publikasi/Sumber Data**:

  1. Dinas Sosial Kab/Kota
  2. BPS/BAPPENAS/Pusdatin Kementerian Sosial

- **Tahun Data Tersedia**: 2024 - 2025
- **Level Estimasi**: Provinsi
- **Frekuensi Pengumpulan**: Triwulan/Tahunan
- **Apakah Indikator dapat diakses umum**: Data agregat " Ya" dan Data BNBA "tidak"

Form Penyelarasan
(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum			1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	01 - Investasi pelayanan kesehatan primer	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan			1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			1. Dinas Kesehatan
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	- Program Penanggulangan Bencana			1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Program Pengelolaan Sumber Daya Air			2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum			1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air			1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Lingkungan dan Kehutanan
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik *(Blue Food)*	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			1. Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program (diisi oleh PD terkait)	Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan lrigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	*Biorefinary* Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (l:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan - Kontribusi PDRB sektor perdagangan	- Nilai Ekspor Barang - Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2. Dinas Perkebunan 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Sekretariat Daerah Biro Ekonomi 5. Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Dinas Pariwisata
4 5	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini	Indeks Kesejahteraan Sosial	- Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial - Persentase PSKS	- Meningkatnya pemberdayaan sosial - Meningkatnya layanan penanganan warga	1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi) - Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	negara migran korban tindak kekerasan - Meningkatnya rehabilitasi sosial - Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial - Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Sosial
6	Indeks Modal Manusia				1. Dinas Pendidikan 2. Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
7 8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) IKLH Daerah				1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Kesejahteraan Sosial	- Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial - Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi) - Persentase (%) daerah yang aktif melakukan	- Meningkatnya pemberdayaan sosial - Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan - Meningkatnya rehabilitasi sosial - Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial - Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN ..... / LEMBAGA..... DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
1	Kabupaten/Kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM	30	200	Kementerian Kesehatan	Umur Harapan Hidup			74,3	75,44	Dinas Kesehatan
						Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)		98,6	99	
							Cakupan penemuan kasus Tuberkolosis (Treatment Coverage)	91	95	
2	Angka kematian ibu	122	77	Kementerian Kesehatan						Dinas Kesehatan
3	Angka kematian balita	15,00	11,90	Kementerian Kesehatan						
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	18,8	14,2	Kementerian Kesehatan						
5	Prevalensi remaja putri anemia	25	15	Kementerian Kesehatan						

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
6	Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja	10	50	Kementerian Kesehatan						
7	Persentase lanjut usia yang mandiri	75	83	Kementerian Kesehatan						
8	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	36	70	Kementerian Kesehatan						
9	Persentase persalinan di fasyankes	88	95	Kementerian Kesehatan						
10	Persentase kab/kota dengan RS PONEK sesuai standar	25	85	Kementerian Kesehatan						
11	Persentase kab/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	20	80	Kementerian Kesehatan						
12	Persentase kab/kota dengan CFR *direct obstetric* (eklampsi & pendarahan postparfum) < 1%	25	80	Kementerian Kesehatan						
13	Dst....	80	80							
dst...										

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing *(dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029)*

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:**				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kemampuan	Dinas Sosial

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sanda - Penyediaan Asran yang Mudah Diaks - Penyediaan Alat Bantu - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dala Panti - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual d Sosial - Pemberian Bimbingan Aktivit Hidup Sehari- Har	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	- Fasilitasi Pembuat Nomor Induk Kependudukan ba Penyandang Disabilitas - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelaya Penelusuran Kelu - Pemberian Pelaya Reunifikasi Keluar - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bida Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlant - Pengasuhan - Penyediaan Makanan - Penyediaan Sandang	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari - Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak - Akses ke Layanan	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Penyediaan Permaka - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama Mudah Diakses - Penyediaan Alat Ban - Penyediaan Perbeka Kesehatan di dalam Sosial - Pemberian Bimbinga Fisik, Mental, Spritua dan Sosial - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayana Penelusuran Keluarg - Pemberian Pelayana Reunifikasi Keluarga - Pemulasaraan - Koordinasi, sinkronis dan pembinaan pelaksanaan rehabili sosial dasar - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses - Penyediaan Alat Bantu - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemulasaraan - Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				- Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses - Penyediaan Alat Bantu - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemulasaraan - Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar	
		Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Pengembangan	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Ekonomi Masyarakat - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Pelayanan Dukungan Psikososial	
	2) Sekolah Rakyat	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Dinas Sosial

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kewenangan Provinsi	
B	**Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan pengadaan dan Pengeloaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah**				
C	**Kesehatan Untuk Semua dengan Proyek/Kegiatan**				
	1) Jaminan Kesehatan Nasional				1. Dinas Kesehatan 2. dst....
D	**Perluasan Akses Pendidikan dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah**				1. Dinas Pendidikan 2. dst...
E	**Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan**				
	1) Pengendalian Inflasi				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM 2. Dinas Pangan 3. Biro Perekonomian 4. Dinas Peternakan 5. Dinas Perikanan dan Kelautan 6. Dst...

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM 2. Dst....
	3) Kemudahan perizinan di daerah				1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dst.....
F	**Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden**				1. Semua OPD

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Koordinator;

e. Anggota.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025
TANGGAL : 19 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitasi Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdangangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Bina Laras			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disablilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
UPT Latihan Kerja			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikst Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisataan)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
UPT Bandar Serai			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi. Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
UPT Riau Science Techno Park			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025
TANGGAL : 19 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025–2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	*2*	*3*	*4*
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra 2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah 3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	*2*	*3*	*4*
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

Indikator Tujuan RPJMD

Indikator Tujuan RPJMD 1
Tingkat Kemiskinan (%)

Indikator Tujuan RPJMD 2
Rasio Gini (Poin)

Indikator Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran RPJMD 1
Presentase Penduduk yang memiliki setidaknya satu jaminan sosial (Q1) (%)

Indikator Tujuan RENSTRA

Indikator Tujuan RENSTRA 1
Indeks Keseiahteraan Sosial (poin)

Indikator Sasaran RENSTRA

Indikator Sasaran RENSTRA 1
Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial (Persentase)

Per

Te

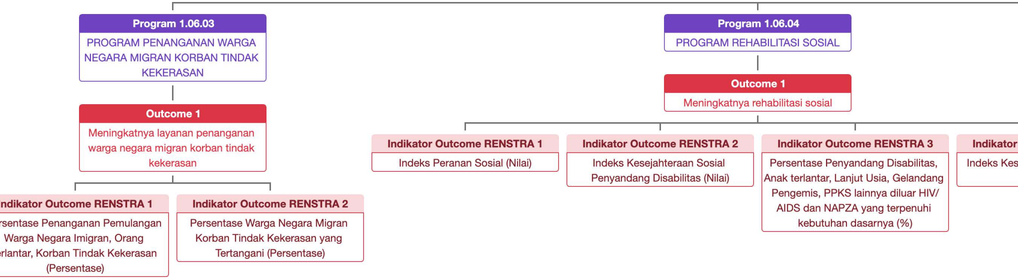
Program 1.06.03
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Outcome 1
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
ndikator Outcome RENSTRA 1
rsentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang erlantar, Korban Tindak Kekerasan (Persentase)
Indikator Outcome RENSTRA 2
Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)
Program 1.06.04
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Outcome 1
Meningkatnya rehabilitasi sosial
Indikator Outcome RENSTRA 1
Indeks Peranan Sosial (Nilai)
Indikator Outcome RENSTRA 2
Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Nilai)
Indikator Outcome RENSTRA 3
Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandang Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)
Indikator
Indeks Kes

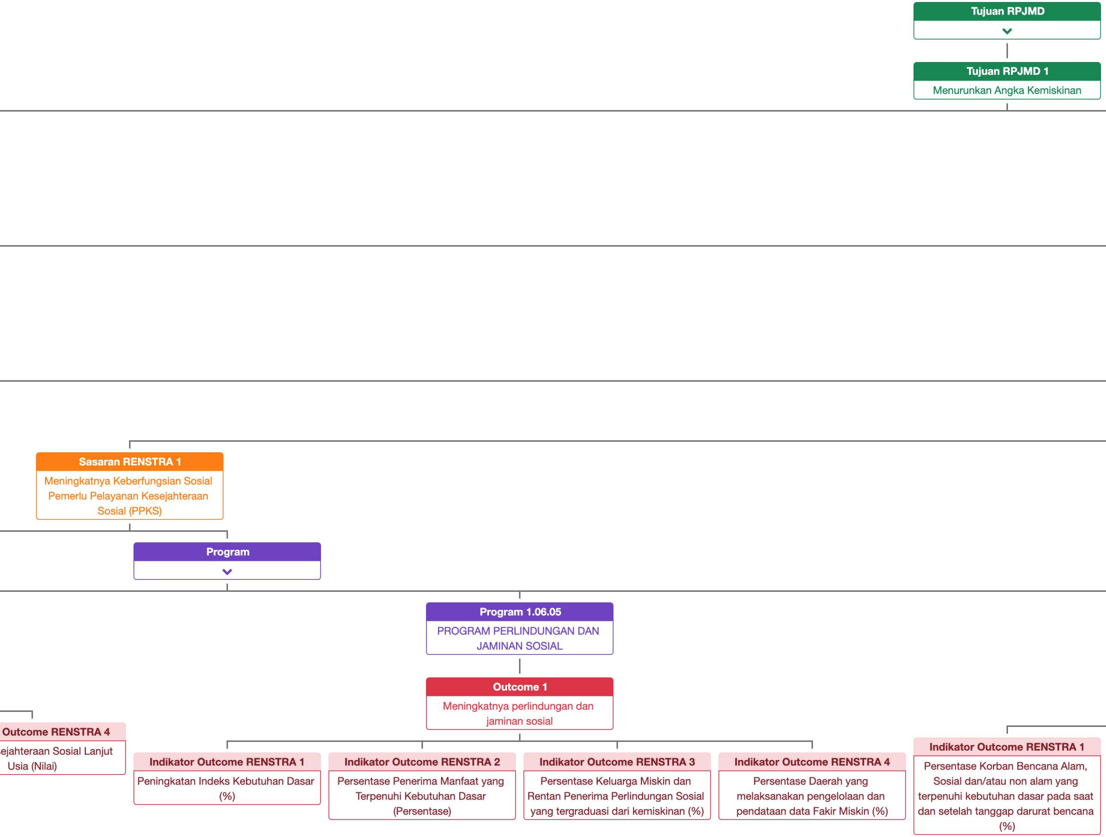

Tujuan RPJMD

Tujuan RPJMD 1

Menurunkan Angka Kemiskinan

Sasaran RENSTRA 1

Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Program

Program 1.06.05

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Outcome 1

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Outcome RENSTRA 4

ejahteraan Sosial Lanjut Usia (Nilai)

Indikator Outcome RENSTRA 1

Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)

Indikator Outcome RENSTRA 2

Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)

Indikator Outcome RENSTRA 3

Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)

Indikator Outcome RENSTRA 4

Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin (%)

Indikator Outcome RENSTRA 1

Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)

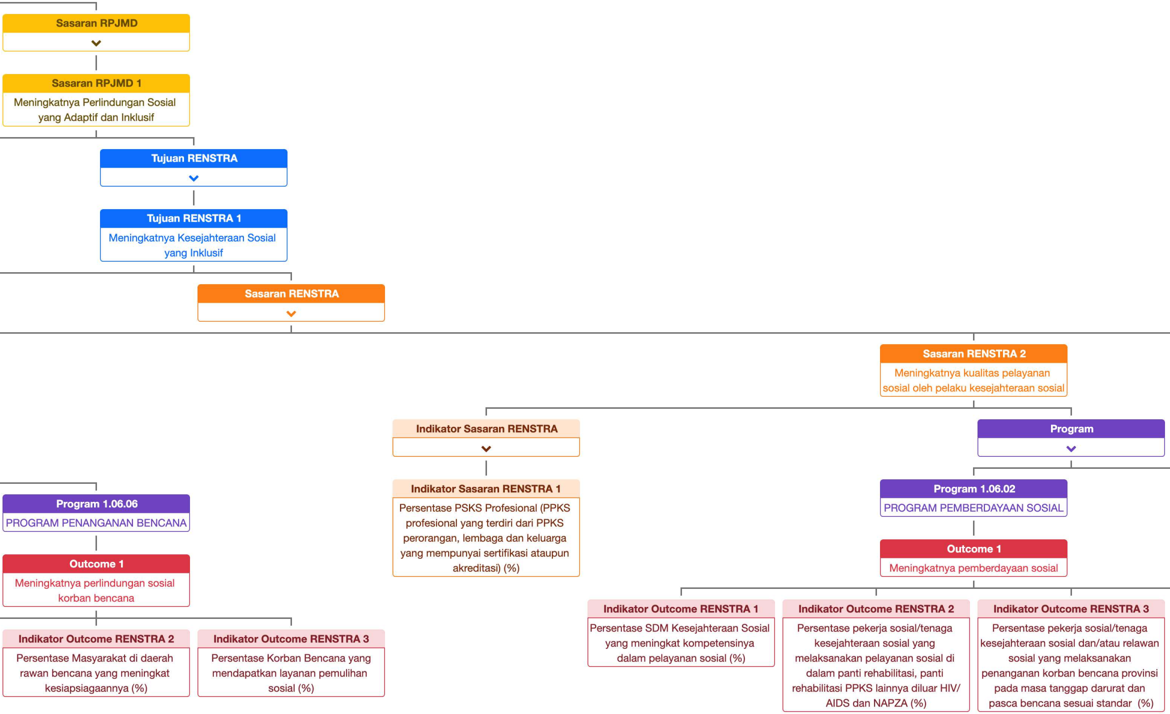

Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD 1
Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif

Tujuan RENSTRA

Tujuan RENSTRA 1
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Sasaran RENSTRA

Sasaran RENSTRA 2
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial

Indikator Sasaran RENSTRA

Program

Program 1.06.06
PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator Sasaran RENSTRA 1
Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi) (%)

Program 1.06.02
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Outcome 1
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana

Outcome 1
Meningkatnya pemberdayaan sosial

Indikator Outcome RENSTRA 1
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)

Indikator Outcome RENSTRA 2
Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%)

Indikator Outcome RENSTRA 3
Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)

Indikator Outcome RENSTRA 2
Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)

Indikator Outcome RENSTRA 3
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)

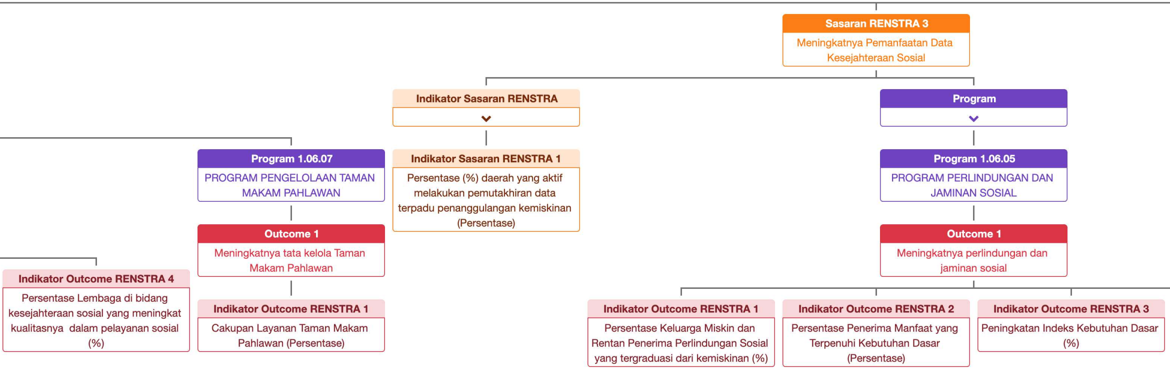

Sasaran RENSTRA 3
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial

Indikator Sasaran RENSTRA

Indikator Sasaran RENSTRA 1
Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)

Program

Program 1.06.05
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Outcome 1
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Indikator Outcome RENSTRA 1
Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)

Indikator Outcome RENSTRA 2
Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)

Indikator Outcome RENSTRA 3
Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)

Program 1.06.07
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Outcome 1
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan

Indikator Outcome RENSTRA 1
Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)

Indikator Outcome RENSTRA 4
Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)

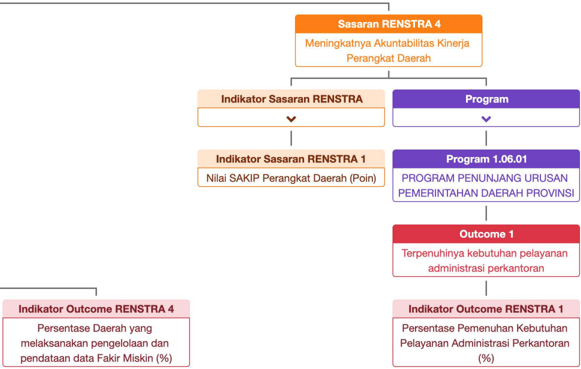

Sasaran RENSTRA 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran RENSTRA

Indikator Sasaran RENSTRA 1

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)

Program

Program 1.06.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome 1

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Outcome RENSTRA 1

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

Indikator Outcome RENSTRA 4

Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin (%)